



Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN KABUPATEN CIREBON

Laporan Akhir

Tahun Anggaran 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas tersusunnya laporan akhir dari kegiatan Kajian Pengembangan Kawasan Pegaraman di Kabupaten Cirebon. Buku laporan akhir ini termuat materi mengenai pembahasan akhir, mulai dari latar belakang penyusunan kajian, kemudian maksud dan tujuan dan sasaran yang ingin di capai, kemudian membahas juga mengenai kajian kebijakan yang terkait dengan substansi kajian termasuk membahas mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait, selanjutnya membahas gambaran umum wilayah Kabupaten Cirebon yaitu letak geografis dan batas administrasi khusus untuk lokasi kajian, kondisi kependudukan, kemudian kondisi ekonomi, dan kondisi terkait gambaran kawasan pegaraman laporan akhir ini juga membahas mengenai metodologi pekerjaan terkait tahapan-tahapan yang dilalui, mulai dari tahapan persiapan, tahapan pengumpulan data dan yang terakhir tahapan analisis dan hasil-hasil dari analisis.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menitikberatkan pada kesesuaian pemanfaatan ruang, pemetaan potensi dan permasalahan yang ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, serta rekomendasi pengembangan kawasan pegaraman terkait kebutuhan infrastruktur untuk pembentukan kawasan pegaraman agar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan juga memberikan perhitungan nilai ekonomi kawasan pegaraman.

Diharapkan kegiatan Kajian Pengembangan Kawasan Pegaraman di Kabupaten Cirebon ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini, diucapkan terima kasih.

Cirebon, Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
1.3.1 Maksud.....	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.3.3 Sasaran	3
1.4 Lokasi Pekerjaan.....	3
1.5 Ruang Lingkup.....	4
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	4
1.5.2 Ruang Lingkup Kegiatan	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN	7
2.1 Arahan Kebijakan Nasional.....	7
2.2 Intensifikasi Lahan Garam.....	10
2.2.1 Arahan Kriteria Penentuan Lokasi Lahan Produksi Garam di Indonesia	10
2.2.2 Lahan Pembuatan Garam	14
2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Garam	14
2.2.4 Sarana Prasarana Kawasan	15
2.3 Pendekatan Perundang-Undangan.....	16
2.3.1 Peraturan Presiden No 126 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Pegaraman Nasional	16
2.3.2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 7 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038	18
BAB 3 GAMBARAN UMUM.....	20
3.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi.....	20
3.2 Kondisi Sosial Kependudukan	23
3.3 Kondisi Perekonomian	29
3.4 Kondisi Kawasan Pegaraman.....	29
3.4.1 Intervensi KKP melalui PUGaR	29
3.4.2 Sentra Ekonomi Garam (SEGAR).....	31
3.4.3 Kondisi Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon.....	33
BAB 4 METODOLOGI	45
4.1 Tahap Persiapan	45

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

4.2 Tahap Pengumpulan dan Kompilasi Data.....	45
4.3 Tahap Analisis dan Kajian	47
4.3.1 Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	48
4.3.2 Analisis Daya Dukung Lingkungan.....	49
4.3.3 Analisis Supply - Demand dan Nilai Tambah.....	50
4.3.4 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Pengembangan Sentra Garam.....	51
4.3.5 Analisis Potensi dan Masalah	52
4.3.6 Analisis Lokasi Prioritas untuk Pengembangan SEGAR.....	53
4.3.7 Arahan Pengembangan Konsep SEGAR.....	53
BAB 5 ANALISIS.....	56
5.1 Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	56
5.2 Analisis Daya Dukung Lingkungan	61
5.3 Analisis Supply - Demand dan Nilai Tambah	67
5.4 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Sentra Garam ...	73
5.5 Analisis Potensi dan Permasalahan	85
5.6 Analisis Lokasi Prioritas untuk Pengembangan SEGAR	87
5.7 Arahan Pengembangan Konsep SEGAR	90
5.7.1 Intervensi KKP melalui PUGaR	90
5.7.2 Sentra Ekonomi Garam (SEGAR).....	91
5.8 Kesimpulan dan Rekomendasi	94
5.8.1 Kesimpulan	94
5.8.2 Rekomendasi	95

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Kapetakan Tahun 2020	23
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Kapetakan Tahun 2020	24
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Kapetakan Tahun 2020	24
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Kecamatan Suranenggala Tahun 2020.....	24
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Suranenggala Tahun 2020	25
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Kecamatan Gunungjati Tahun 2020.....	25
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Gunungjati Tahun 2020	25
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk Kecamatan Mundu Tahun 2020.....	25
Tabel 3.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Mundu Tahun 2020	26
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk Kecamatan Pangenan Tahun 2020	26
Tabel 3.11	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Pangenan Tahun 2020	26
Tabel 3.12	Jumlah Penduduk Kecamatan Astanajapura Tahun 2020	27
Tabel 3.13	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Astanajapura Tahun 2020	27
Tabel 3.14	Jumlah Penduduk Kecamatan Gebang Tahun 2020	27
Tabel 3.15	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Gebang Tahun 2020	28
Tabel 3.16	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Losari Tahun 2020	28
Tabel 3.17	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Losari Tahun 2020	28
Tabel 3.18	PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan	29
Tabel 3.19	Data Petambak Garam Kabupaten Cirebon Tahun 2021	33
Tabel 3.20	Luas Lahan Tambak Garam Kabupaten Cirebon Tahun 2021	33
Tabel 3.21	Produksi Garam Tahun 2019	35
Tabel 3.22	Produksi Garam Tahun 2020	35
Tabel 3.23	Produksi Garam Tahun 2021	36
Tabel 3.24	Produksi Garam Tahun 2022	36
Tabel 3.25	Gudang Garam di Kabupaten Cirebon	38
Tabel 4.1	Kerangka Metode Analisis SWOT	52
Tabel 5.1	Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon	56
Tabel 5.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon.....	56
Tabel 5.3	Analisis Daya Dukung Lingkungan Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon.....	61
Tabel 5.4	Kebutuhan Garam Nasional.....	67

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Tabel 5.5	Kebutuhan Garam Provinsi	67
Tabel 5.6	Kebutuhan Garam Kabupaten Cirebon.....	68
Tabel 5.7	Analisis Produktifitas.....	71
Tabel 5.8	Analisis Produktifitas Kontribusi Terhadap Nasional	72
Tabel 5.9	Analisis Produktifitas Per Kecamatan	72
Tabel 5.10	Analisis Nilai Tambah Pegaraman Kabupaten Cirebon	72
Tabel 5.11	Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pegaraman Kabupaten Cirebon.....	73
Tabel 5.12	Analisis SWOT.....	86
Tabel 5.13	Potensi Lahan Produksi Garam Kabupaten Cirebon.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Lokasi Kajian Pengembangan Kawasan Pegaraman di Kabupaten Cirebon.....	5
Gambar 2.1	Sentra Produksi Garam dalam RPJMN 2020-2024.....	7
Gambar 2.2	Model Pencapaian Swasembada Garam.....	9
Gambar 2.3	Metode Rumah Tunnel	12
Gambar 2.4	Metode Evaporasi.....	13
Gambar 2.5	Metode Prisma.....	13
Gambar 2.6	Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Cirebon.....	19
Gambar 3.1	Lokasi Kajian Pengembangan Kawasan Pegaraman di Kabupaten Cirebon.....	23
Gambar 3.2	Program PUGaR dan Isu Off Farm	30
Gambar 3.3	Ilustrasi Konsep SEGAR (1).....	31
Gambar 3.4	Ilustrasi Konsep SEGAR (1).....	31
Gambar 3.5	Produksi Garam Tahun 2018-2022.....	37
Gambar 3.6	Hasil Survey Lapangan Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapatekan.....	43
Gambar 3.7	Hasil Survey Lapangan Desa Tawangsari, Kecamatan Losari	44
Gambar 4.1	Tahapan Pengumpulan Data Dan Informasi.....	46
Gambar 4.2	Kerangka Analisis	48
Gambar 4.3	Metode Analisis Pemanfaatan Ruang.....	49
Gambar 4.4	Metode Analisis Daya Dukung Lingkungan.....	50
Gambar 4.5	Metode Analisis Supply dan Demand.....	51
Gambar 4.6	Metode Analisis Kebutuhan Infrastruktur Pegaraman.....	52
Gambar 4.7	Metode Analisis Potensi dan Permasalahan.....	53
Gambar 5.1	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	58
Gambar 5.2	Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Cirebon.....	59
Gambar 5.3	Peta Analisis Analisis Pemanfaatan Ruang Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon.....	60
Gambar 5.4	Peta Curah Hujan.....	63
Gambar 5.5	Peta Jenis Tanah.....	64
Gambar 5.6	Peta Tekstur Tanah	65
Gambar 5.7	Peta Analisis Daya Dukung Lingkungan Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon	66
Gambar 5.8	Konsep Rantai Pasok Kawasan Pegaraman	69
Gambar 5.9	Metode Tambak Garam Konvensional	69
Gambar 5.10	Metode Tambak Garam Rumah Tunnel	70
Gambar 5.11	Skema Tambak Garam Rumah Tunnel Eksisting di Kabupaten Cirebon	71
Gambar 5.12	Skema Tambak Garam Rumah Tunnel Rencana di Kabupaten Cirebon.....	71
Gambar 5.13	Program Ruang Kebutuhan Infrastruktur Kabupaten Cirebon	74
Gambar 5.14	Mesin Pompa Air	75
Gambar 5.15	Kincir Angin	76
Gambar 5.16	Baumemeter.....	76
Gambar 5.17	Pemadat	77
Gambar 5.18	Pengais atau Pakem.....	77
Gambar 5.19	Panyacca.....	77
Gambar 5.20	Keranjang Atau Pikulan	78

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Gambar 5.21	Gerobak Sorong.....	78
Gambar 5.22	Geisolator.....	79
Gambar 5.23	Rabunan.....	79
Gambar 5.24	Drainase.....	80
Gambar 5.25	Pintu Saluran Air.....	80
Gambar 5.26	Tanggul.....	81
Gambar 5.27	Gedeg Bambu.....	81
Gambar 5.28	Saluran Primer.....	82
Gambar 5.29	Saluran Sekunder.....	82
Gambar 5.30	Saluran Tersier.....	83
Gambar 5.31	Gudang.....	84
Gambar 5.32	Moda Transportasi.....	84
Gambar 5.33	Jaringan Jalan.....	84
Gambar 5.34	Peta Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon.....	88
Gambar 5.35	Peta Akses Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon.....	89
Gambar 5.36	Lahan Pegaraman Desa Bungko Lor A.....	89
Gambar 5.37	Lahan Pegaraman Desa Bungko Lor B.....	90
Gambar 5.38	Program PUGaR dan Isu Off Farm.....	91
Gambar 5.39	Ilustrasi Konsep SEGAR (1).....	92
Gambar 5.40	Ilustrasi Konsep SEGAR (1).....	92

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kawasan laut yang begitu luas, didalamnya banyak terkandung potensi sumber daya alam terutama di Wilayah Pesisir salah satunya produksi tambak garam. Dalam Perencanaan pembangunan nasional telah dituangkan dalam Perpres 18/2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Dalam dokumen tersebut juga disebut rencana pembangunan terkait dengan komoditas garam. Dalam dokumen tersebut target produksi garam nasional pada 2024 disebutkan harus mencapai 3,4 juta ton. Salah satu strategi yang dilakukan akselerasi produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pegaraman dan peningkatan kualitas garam. Sentra produksi garam direncanakan di wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Peningkatan produksi garam 3 juta ton pada 2020 dan terus meningkat 3,1 juta ton, 3,2 juta ton, 3,3 juta ton dan 3,4 juta ton pada 2024 menjadi program prioritas. Guna pencapaiannya maka akan dilakukan fasilitasi lahan pegaraman 600 hektar pada 2020 dan meningkat menjadi 750 hektar pada 2021-2024 di 12 provinsi.

Salah satunya Kabupaten Cirebon bagian dari provinsi Jawa barat berada sepanjang pantai Utara Laut Jawa memiliki potensi usaha tambak garam didukung faktor geografis curah hujan kecil rata-rata 1808,45 mm/thn, suhu rata-rata 30° – 40° C, berada di ketinggian ± 0 – 2 mdpl dan kemiringan lereng antara 0 – 1 %, memiliki jenis tanah alluvial kelabu tua cocok sebagai petakan pembuatan garam dan kadar salinitas yang tinggi mencapai 25 – 28‰. Usaha tambak garam dikerjakan oleh petani berpengalaman bertani garam lebih dari 10 tahun dengan luas lahan 0.5 – 1 ha, mayoritas status lahan sewaan, serta. Produksi garam dihasilkan rata-rata mencapai 35 – 65ton tetapi dengan kualitas garam nomor dua. Walaupun menjadi daerah penyangga untuk memenuhi kebutuhan nasional, namun ternyata hingga kini produksi garam di beberapa wilayah Indonesia tidak mampu memenuhi tingginya kebutuhan garam, sehingga Indonesia terpaksa melakukan impor garam. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan produksi garam di Kabupaten Cirebon diperlukan kajian pengembangan kawasan Pegaraman di Kabupaten Cirebon.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Sebagai upaya untuk mendorong perkembangan Kawasan Pegaraman ke arah yang lebih baik. Pada kegiatan tahun anggaran 2022 ini, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon mencoba melakukan kajian terhadap Kawasan Pegaraman di Kabupaten Cirebon dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Kawasan dengan perwujudan bangunan dan lingkungan sehingga mampu memberikan landasan dan/atau acuan dalam melakukan pengembangan Kawasan Pegaraman. Diharapkan hasil dari kajian ini akan menjadi pemicu awal dalam upaya-upaya penataan kawasan melalui kegiatan perencanaan dan implementasinya pada masa-masa mendatang, khususnya untuk pertumbuhan kawasan lainnya di Kabupaten Cirebon.

1.2 Dasar Hukum

Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
7. Peraturan Pemerintah 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah dan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038.

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyusun kajian Pengembangan Kawasan Pegaraman di Kabupaten Cirebon yang menitikberatkan pada kesesuaian pemanfaatan ruang, pemetaan potensi dan permasalahan yang ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, serta rekomendasi pengembangan kawasan Pegaraman terkait kebutuhan infrastruktur untuk pembentukan kawasan pegaraman agar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan juga memberikan perhitungan nilai ekonomi kawasan pegaraman.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen kajian pengembangan kawasan Pegaraman dalam upaya peningkatan produksi garam di Kabupaten Cirebon

1.3.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya pemanfaatan ruang yang akan dikembangkan sebagai kawasan Pegaraman.
2. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan kawasan Pegaraman; dan
3. Tersusunnya rekomendasi terkait pengembangan kawasan Pegaraman terkait kebutuhan infrastruktur.

1.4 Lokasi Pekerjaan

Lokasi kegiatan dalam kajian ini adalah seluruh kawasan pesisir Kabupaten Cirebon yang diarahkan dalam RTRW Kabupaten Cirebon sebagai kecamatan produksi garam meliputi:

- a. Kecamatan Kapetakan;
- b. Kecamatan Suranenggala;
- c. Kecamatan Gunungjati;
- d. Kecamatan Mundu;
- e. Kecamatan Pangenan;
- f. Kecamatan Astanajapura;
- g. Kecamatan Gebang; dan
- h. Kecamatan Losari.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah seluruh kawasan pesisir di Kabupaten Cirebon.

1.5.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Adapun lingkup ini terdiri dari:

a. Persiapan

Kegiatan pada tahap persiapan, meliputi:

- 1) Perencanaan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Metodologi pelaksanaan kegiatan;
- 3) Review terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait.

b. Pengumpulan dan Kompilasi Data

Kegiatan pada tahap pengumpulan dan kompilasi data, meliputi:

1) Persiapan Survei

- a) Penyusunan checklist pengumpulan data dan instrument pengumpulan data yang memuat kebutuhan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- b) Pembuatan program kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan survei; dan
- c) Persiapan personil (surveyor).

2) Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan survei meliputi:

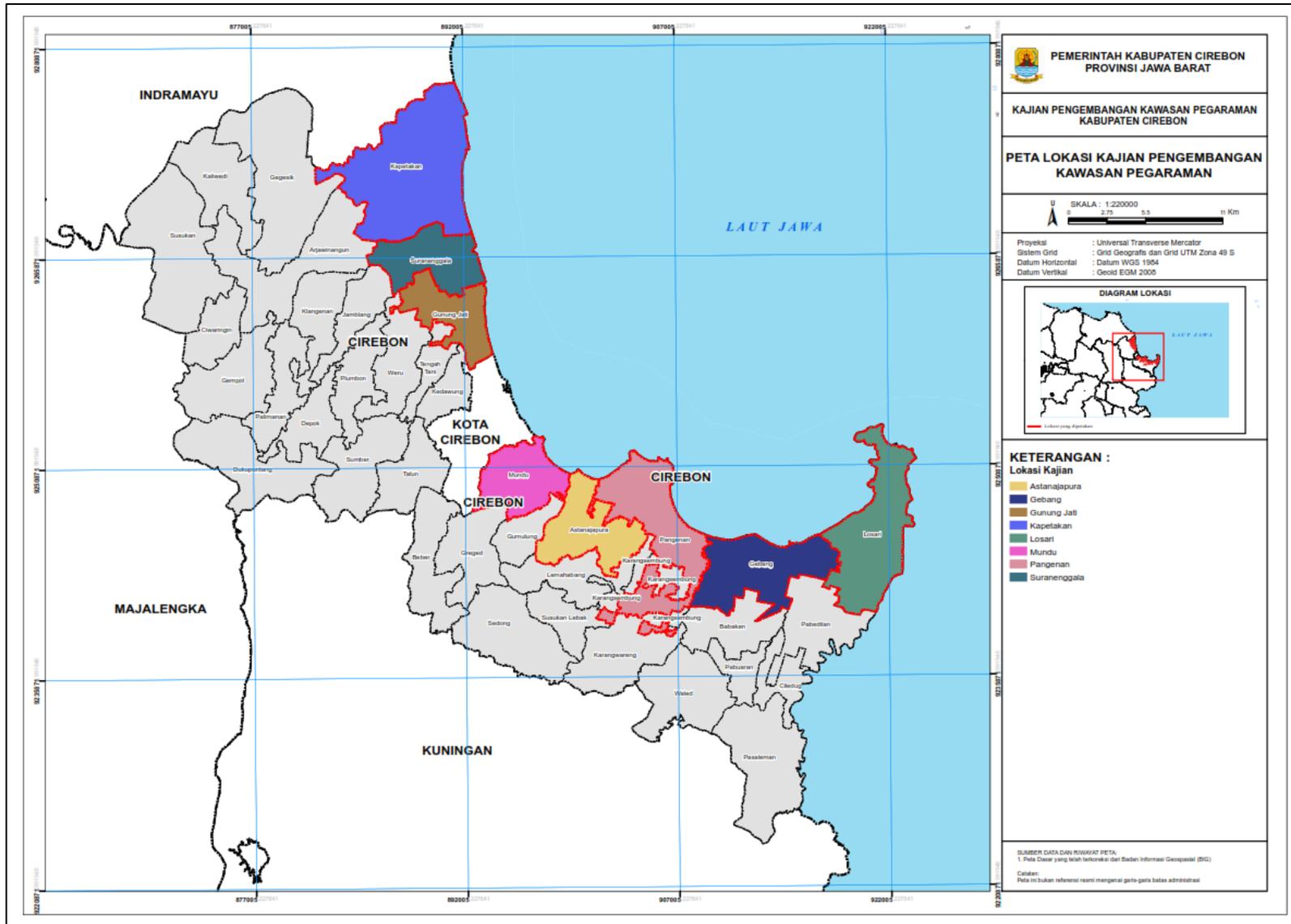
- a) Survei Sekunder (Instansional), merupakan kegiatan pengumpulan data sekunder ke instansi terkait.
- b) Survei Primer (Lapangan), merupakan kegiatan pengumpulan data langsung ke lokasi perencanaan untuk menemukan permasalahan, hambatan, potensi dan tantangan, yang diperoleh melalui diskusi dan wawancara, kuisisioner, dokumentasi.

c. Analisis dan Kajian

Dalam rangka penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Pegaraman, maka diperlukan kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci sebagai data dasar, meliputi:

- 1) Analisis pemanfaatan ruang;
- 2) Analisis potensi dan masalah; dan
- 3) Analisis kebijakan pengembangan kawasan Pegaraman.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 1.1 Lokasi Kajian Pengembangan Kawasan Pegaraman di Kabupaten Cirebon

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini merupakan langkah-langkah yang disusun dalam melakukan proses penyusunan Laporan Kajian Pengembangan Kawasan Pegaraman di Kabupaten Cirebon yang terbagi menjadi lima bab, kelima bab tersebut disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup kegiatan, dan sistematika pembahasan.

BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN

Bab ini berisikan penjelasan kebijakan nasional tentang pegaraman nasional, kemudian pendekatan penentuan lokasi yang sesuai untuk dijadikan kawasan pegaraman, juga membahas mengenai peraturan perundang-undangan terkait pegaraman.

BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum yang menjelaskan kondisi wilayah di Kabupaten Cirebon seperti letak geografis dan batas administrasi, social kependudukan, perekonomian, dan profil kondisi kawasan pegaraman yang ada di Kabupaten Cirebon.

BAB 4 METODOLOGI

Bab ini berisikan metodologi pelaksanaan pekerjaan dengan uraian mengenai tahapan persiapan, tahapan pengumpulan data dan informasi, dan tahapan analisis terkait pengembangan kawasan pegaraman.

BAB 5 ANALISIS

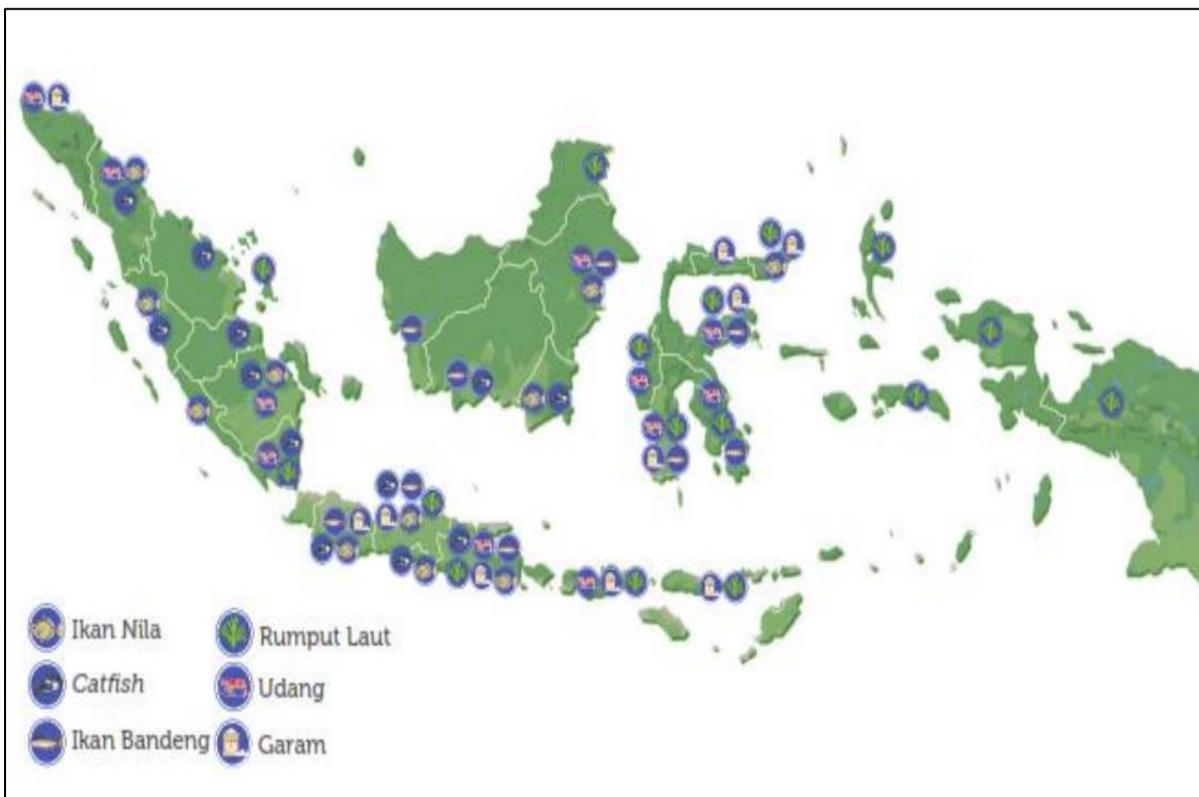
Bab ini berisikan mengenai Analisis yang digunakan dan hasil-hasil analisis dari kajian pengembangan kawasan pegaraman

BAB 2

KAJIAN KEBIJAKAN

2.1 Arah Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional telah dituangkan dalam Perpres 18/2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Dalam dokumen tersebut juga disebut rencana pembangunan terkait dengan komoditas garam. Dalam dokumen tersebut target produksi garam nasional pada 2024 disebutkan harus mencapai 3,4 juta ton. Salah satu strategi yang dilakukan akselerasi produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pegaraman dan peningkatan kualitas garam. Sentra produksi garam direncanakan di wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Pabrik garam industri juga ditetapkan menjadi poin peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi.



Gambar 2.1 Sentra Produksi Garam dalam RPJMN 2020-2024
(Sumber: Perpres 18/2020)

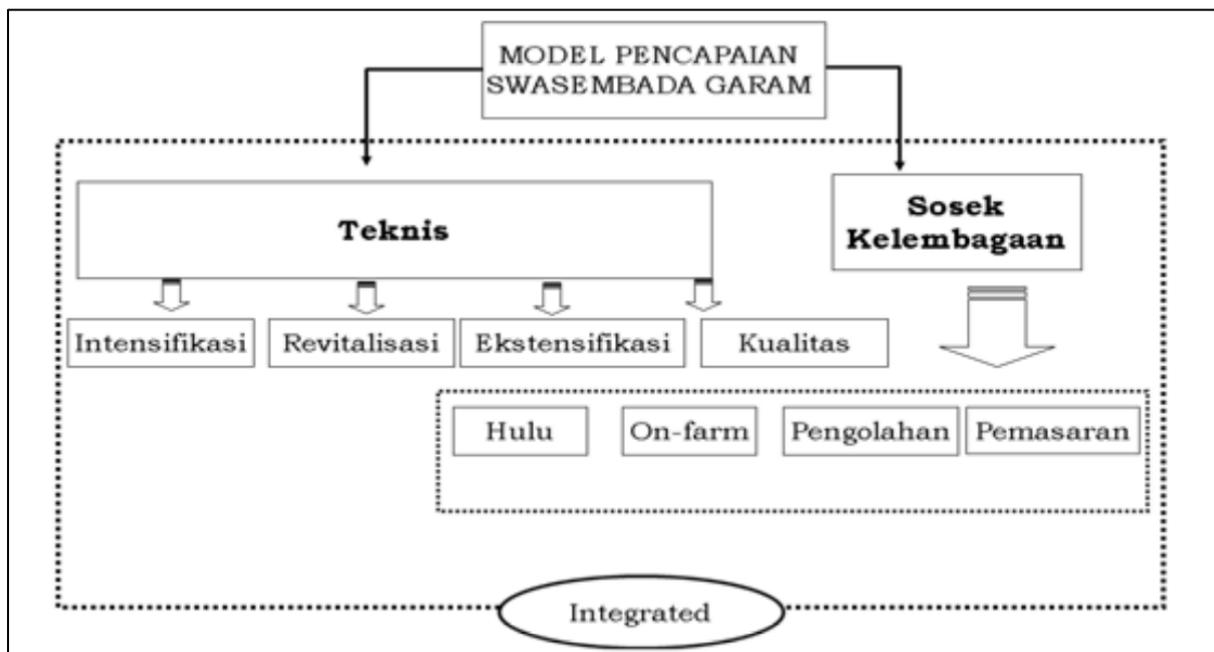
KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Peningkatan produksi garam 3 juta ton pada 2020 dan terus meningkat 3,1 juta ton, 3,2 juta ton, 3,3 juta ton dan 3,4 juta ton pada 2024 menjadi program prioritas. Guna pencapaiannya maka akan dilakukan fasilitasi lahan pegaraman 600 hektar pada 2020 dan meningkat menjadi 750 hektar pada 2021-2024 di 12 provinsi. Demikian juga akan dilakukan revitalisasi sarana niaga garam rakyat di 12 provinsi sebanyak 70 unit pada 2020 dan meningkat menjadi 100 unit pada 2021 hingga 2024. Dukungan terhadap peningkatan produksi garam juga akan dilakukan pembangunan saran dan prasarana sebanyak 4 unit pada 2020 dan 2 unit pada 2021 hingga 2024 di kawasan garam terpadu di 4 provinsi. Demikian juga akan dilakukan pengadaan sarana dan prasarana tambak garam di 4 provinsi sebanyak 4 unit pada 2020 dan 2 unit pada 2021 hingga 2024 melalui KKP. Sementara pelaksanaannya melalui Pemda/DAK akan dibangun sarana dan prasarana tambak garam di 13 provinsi sebanyak 13 unit pada 2020 hingga 2024. Terkait dengan inovasi teknologi akan dikembangkan teknologi pilot project garam terintegrasi dan garam industri mulai 2020 hingga 2024.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku leading sector komoditas garam telah mengeluarkan Permen KKP 17/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020- 2024. Dalam rencana strategis tersebut disebut bahwa presiden secara khusus telah memberikan arahan kepada menteri KKP diantaranya adalah membangun komunikasi dengan pemangku petambak garam. Produksi garam direncanakan meningkat menjadi 3 juta ton pada 2020 dan terus meningkat 3,1 juta ton, 3,2 juta ton, 3,3 juta ton sampai menjadi 3,4 juta ton pada 2024. Dalam sasaran program indikator disebut akan ada fasilitasi lahan garam 600 hektar pada 2020, meningkat berturut-turut menjadi 750 hektar pada 2021 hingga 2024. Kesejahteraan pegaram rakyat yang ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) juga menjadi sasaran dengan menentukan besaran indeks 102,75 pada 2020 dan meningkat menjadi berturut-turut 103; 103,25; 103,50 dan 103,75 pada 2024. Bidang pemasaran juga akan disentuh dengan revitalisasi sarana niaga garam dengan indikasi pendanaan sebesar 70 milyar pada 2020 dan meningkat menjadi 100 milyar pada 2021 hingga 2024. Demikian juga sarana dan/ atau kawasan terpadu yang akan dibangun dengan indikasi pendanaan pada 2020 adalah 4 milyar dan pada 2021 hingga 2024 sebanyak 2 milyar. Strategi yang akan dilakukan diantaranya melalui peningkatan produktivitas dan kualitas garam dengan pengelolaan dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam. Secara regulasi KKP juga telah memasukkan UU 7/2016 Tentang perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam RUU Cipta Kerja.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Terbukti, hingga 2019 Indonesia masih mengalami defisit garam sebesar 1.042.306 ton. Hal ini dikarenakan dari kebutuhan 4.566.753 ton hanya mampu dipenuhi dari stok awal, produksi dan penyusutan total sebesar 3.524.447 ton. Akhirnya negara mengimpor 2.724.772 ton dengan memberikan surplus 1.682.466 ton. Kondisi ini layak mendapat perhatian serius dengan agar Indonesia mampu berswasembada garam dengan menerapkan beberapa strategi yang integratif baik secara teknis, sosial kelembagaan, antar kementerian/ lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat (Ihsannudin. 2017).



Gambar 2.2 Model Pencapaian Swasembada Garam

Berbicara produksi garam maka akan berbicara masalah teknis terkait kuantitas dan kualitas garam yang akan dihasilkan. Dalam hal kuantitas saja pegaram rakyat masih belum dapat memenuhi kebutuhan garam nasional sebagaimana paparan data sebelumnya. Hal ini dikarenakan pertama, masih rendahnya produktivitas garam (rasio produksi garam yang dihasilkan dengan luasan lahan pegaraman). Dimana sebagian besar pegaram rakyat masih memiliki produktivitas pada kisaran 50 ton per hektar. Kedua, produksi garam masih mengalami fluktuasi yang sangat signifikan antar tahun. Ketiga, Terjadi penyusutan luasan lahan pegaraman. Beberapa penyebab tersebut didasar beberapa kondisi. Perubahan iklim dan cuaca demikian sering terjadi pada akhir-akhir ini.

Hal ini sangat berkorelasi dengan produksi garam mengingat Teknik produksi garam rakyat yang menggunakan solar evaporation menjadi sangat tergantung pada intensitas dan lama paparan matahari dalam artian lama musim kemarau. Merespon kondisi ini ternyata teknologi

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

yang coba diintroduksi juga masih belum dapat berkembang dengan cepat. Skala usaha pegaraman rakyat yang kecil dan terpencar-pencar (belum terintegrasi) menjadikan mekanisme produksi tidak optimal. Sementara penyutan luasan lahan pegaraman banyak disebabkan alih fungsi lahan (menjadi perumahan atau fungsi lain) maupun ditinggalkan karena dirasa tidak menguntungkan.

2.2 Intensifikasi Lahan Garam

2.2.1 Arahan Kriteria Penentuan Lokasi Lahan Produksi Garam di Indonesia

Garam merupakan benda padat berwarna putih berbentuk kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar NaCl (>80%) serta senyawa lainnya, seperti magnesium klorida, magnesium sulfat, dan kalsium klorida. Garam merupakan komoditas penting yang banyak digunakan baik dari kepentingan konsumsi sampai dengan kepentingan industri. Garam dapat bersumber dari air laut, air danau asin, deposit dalam tanah, tambang garam, sumber air dalam tanah ataupun sungai berair payau. Produksi garam di Indonesia umumnya dilakukan menggunakan metode evaporasi. Produksi dilakukan di musim kemarau pada lahan tanah yang berdekatan dengan sumber air bahan baku garam, baik langsung dari laut maupun dari aliran sungai atau muara sungai berair payau dimana secara umum garam diproduksi mulai dari kolam penampungan air (bozem), peminihan, dan meja kristalisasi.

Dalam perkembangannya, metode produksi garam semakin berkembang. Sebut saja ada metode ulir filter, metode rumah kaca, metode rumah tunnel, dan metode rumah prisma. Lokasi menjadi faktor penting dalam penentuan metode produksi garam di Indonesia. Tim peneliti dari Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya menyampaikan penilaian kesesuaian suatu lokasi untuk menjadi lokasi produksi garam dikembangkan dalam bentuk Indeks Kesuaian Garam (IKG). Penyusunan IKG didasarkan pada sembilan parameter yang menentukan proses produksi garam, yaitu:

1. Curah hujan

Curah hujan merupakan salah satu penentu keberhasilan produksi garam. Rata-rata intensitas curah hujan dan pola hujan dalam setahun merupakan indikator yang terkait erat dengan lama musim kemarau. Lama musim kemarau ini akan mempengaruhi tingkat penguapan air di lokasi produksi garam. Tingkat curah hujan yang tinggi akan berdampak negatif pada produksi garam.

2. Permeabilitas tanah

Permeabilitas tanah merupakan parameter untuk mengukur tingkat porositas tanah yang merupakan faktor penting dalam mempengaruhi keberhasilan produksi garam. Permeabilitas

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

tanah rendah dan tidak mudah retak adalah salah satu kriteria dalam persyaratan lokasi tambak garam.

3. Jenis tanah.

Tanah yang didominasi fraksi pasir akan mempunyai pori makro (porous), tanah dengan dominasi debu akan banyak mempunyai pori meso (agak porous), sementara tanah dengan fraksi liat akan mempunyai banyak pori mikro (kecil) atau tidak porous. Pengembangan lahan tambak garam harus didasarkan pada potensi teknis yang dimiliki wilayah pengembangan, salah satu potensi teknis tersebut adalah jenis tanah yang tidak porous untuk menjamin ketersediaan air tua dan pengendapan sempurna.

4. Lama penyinaran.

Lama penyinaran matahari merupakan faktor dalam produksi garam yang juga mempengaruhi laju evaporasi air. Evaporasi air akan dapat tercapai dengan baik jika didukung oleh radiasi surya serta bantuan rekayasa iklim mikro pada areal pegaraman.

5. Kelembaban udara.

Kelembaban udara berkaitan erat dengan proses evaporasi pada produksi garam. Jika kelembaban tinggi, laju evaporasi menjadi rendah karena kejenuhan udara akan lebih cepat tercapai. Kelembaban udara mempengaruhi kecepatan penguapan air, dimana makin besar penguapan maka makin besar jumlah kristal garam yang mengendap.

6. Kecepatan angin.

Kecepatan angin sangat berpengaruh dalam penentuan lokasi tambak garam karena akan mempengaruhi kecepatan penguapan air, dimana makin besar evaporasi (penguapan) maka makin besar jumlah kristal garam yang mengendap.

7. Suhu udara.

Suhu udara mempengaruhi kecepatan penguapan air, dimana makin besar penguapan maka makin besar jumlah kristal garam yang mengendap.

8. Tingkat penguapan.

Penguapan merupakan faktor utama dalam produksi garam yang dipengaruhi oleh angin dan matahari. Proses pembuatan garam pada dasarnya adalah proses pengoptimalan proses penguapan sehingga dapat menghasilkan Kristal garam. Faktor yang paling menentukan kecepatan penguapan air dalam proses pembuatan garam adalah kecepatan angin dan radiasi sinar matahari. Kecepatan angin berpengaruh karena angin membawa uap air dari permukaan air sehingga proses penguapan tetap dapat berlangsung. Radiasi sinar matahari berpengaruh karena merupakan sumber energi untuk proses penguapan yang terjadi.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

9. Tingkat kejenuhan air bahan baku garam.

Proses pembentukan kristal garam dipengaruhi banyak faktor termasuk tingkat kejenuhan air bahan baku garam. Tingkat kejenuhan ini akan menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi garam. Nilai IKG ditentukan dengan melakukan skoring pada sembilan indikator kesesuaian lokasi produksi garam tersebut. Adapun kriteria kesesuaian berdasarkan skor IKG adalah sebagaimana berikut:

- 85 % : Sangat sesuai (S1)
- 80-84 % : Cukup Sesuai (S2)
- 75-79 % : Sesuai bersyarat (S3)
- <75 % : Tidak sesuai (N)

IKG berhubungan dengan kesesuaian lokasi produksi garam menggunakan metode produksi di lahan (evaporasi). Lokasi yang sesuai dengan metode evaporasi adalah S1 dan S2. Untuk produksi garam pada lokasi dengan kriteria S3 dan N, perlu ada cara lain dalam produksi lahan, seperti penambahan rumah prisma atau rumah tunnel.



Gambar 2.3 Metode Rumah Tunnel



Gambar 2.4 Metode Evaporasi



Gambar 2.5 Metode Prisma

2.2.2 Lahan Pembuatan Garam

Lahan pembuatan garam adalah lahan yang digunakan sebagai lahan produksi garam atau sering disebut tambak garam. Lahan pembuatan garam merupakan suatu lahan yang digunakan untuk memproduksi garam dengan memakai bahan baku air laut yang diuapkan dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi untuk menguapkan (*solar evaporation*).

Menurut Purbani (2006) menyatakan bahwa terdapat dua macam konstruksi penggaraman yang sering digunakan di wilayah Indonesia, yaitu:

1. Konstruksi tangga (*getrapte*) merupakan konstruksi yang dirancang secara khusus dan teratur. Konstruksi tangga merupakan suatu areal penggaraman yang termasuk komplit, karena terdiri dari peminihan-peminihan dan meja-meja garam dengan konstruksi tangga, sehingga aliran air berjalan secara alamiah dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi.
2. Konstruksi kompleks meja (*tafel complex*) merupakan suatu konstruksi areal penggaraman yang cukup luas yang dirancang berkelompok-kelompok. Di areal tersebut terdapat areal kelompok peminihan dan areal kelompok meja garam. Letaknya juga tidak teratur (alamiah) sehingga pembuatan kelompok peminihan maupun meja secara kolektif.

2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Garam

Faktor yang dapat mempengaruhi produksi garam terdiri dari beberapa faktor, diantaranya sifat fisik tanah berupa tekstur tanah, retensi tanah, suhu tanah, topografi, iklim, cuaca, suhu udara, kecepatan dan arah angin, kelembaban yang mampu mempengaruhi proses evaporasi dan siklus filtrasi air dari bahan pengotor pada garam (Purbani 2006).

1. Iklim

Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata dalam kurun waktu satu tahun dan mencakup luasan wilayah yang besar. Wilayah Indonesia memiliki musim hujan dan musim kemarau, apabila angin bergerak kencang dari barat ke arah timur maka akan terjadi musim penghujan dan apabila angin bergerak kencang dari timur ke arah barat maka akan terjadi musim kemarau sedangkan saat musim pancaroba angin bertiup ke arah tidak beraturan (Syarifuddin 1996). Rata-rata intensitas atau curah hujan dan pola hujan distribusi hujan dalam ukuran waktu satu tahun merupakan indikator yang erat kaitannya dengan panjang periode kemarau dan sangat mempengaruhi daya penguapan (evaporasi) air laut. Panjang periode musim kemarau sangat berpengaruh langsung terhadap kesempatan yang diberikan kepada para petani garam untuk memproduksi garam dengan memanfaatkan penyinaran sinar matahari penuh (Purbani 2006).

2. Kualitas Air

Kualitas Air merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kesesuaian atau kecocokan air tersebut untuk penggunaan tertentu misalnya tambak garam, air minum, perikanan, pengairan/irigasi, industri, rekreasi dan sebagainya. Dengan melakukan pengujian kualitas air terhadap air tersebut maka dapat diketahui tingkat kualitas air tersebut. Pengujian kualitas air yang biasa dilakukan meliputi uji kimia, uji fisik atau uji kenampakan (bau dan warna).

Sifat air, kandungan makhluk hidup, dan zat energi atau komponen lain di dalam air merupakan kualitas air. Kualitas air dapat diketahui dengan beberapa parameter diantaranya parameter fisika (suhu, cahaya, warna, konduktifitas, padatan total, padatan tersuspensi, kekeruhan, padatan terlarut dan salinitas) dan parameter kimia (pH, oksigen terlarut, alkalinitas, potensi redoks, bahan organik, kesadahan dan karbondioksida) (Effendi 2003).

3. Tekstur Tanah

Pada dasarnya tanah merupakan suatu sistem mekanik yang kompleks yang terdiri dari tiga fase, diantaranya bahan-bahan padat, cair dan gas. Fase padat memiliki prosentase kurang lebih 50 % dari volume tanah, dimana sebagian besar terdiri dari bahan mineral dan bahan organik. Sedangkan sisa volume yang lain merupakan ruang pori-pori yang sebagian besar ditempati oleh fase cair dan fase gas. Perbandingan volume antara fase cair dan fase gas dapat bervariasi sesuai dengan musim dan pengelolaan tanah (Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian 2006).

2.2.4 Sarana Prasarana Kawasan

1. Kolam Penampungan Air laut (menampung air laut, luas 25 % total tambak garam kedalaman < 1 m.
2. Kolam peminihan (penguapan) 3,5 o Be -16 o Be di meja meja garam. Kedalaman air 10 -30 cm (L 25 % total tambak garam).
3. Meja Garam (Kristalisasi) petakan penguapan garam, kedalaman air 5 – 12 cm. (Luas 50 % total tambak garam).
4. Pintu air, pintu masuk dan pintu keluar .
5. Saluran air tua. Berfungsi menyalurkan air dr penampungan ke peminihan. Lebar saluran disesuaikan dengan luas lahan pegaraman
6. Gudang Berfungsi sebagai tempat penyimpanan garam setelah dipanen. Volume Gudang penyimpanan di sesuaikan dengan kapasitas produksi. Gudang tidak boleh bocor dan terkena rembesan air hujan

2.3 Pendekatan Perundang-Undangan

2.3.1 Peraturan Presiden No 126 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

A. Definisi

- Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
- Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
- Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
- Petambak Garam adalah setiap jiwa yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman
- Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.

B. Pembangunan Pergaraman Nasional

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional. Kebutuhan Garam nasional:

1. Garam konsumsi;
2. Garam untuk industri aneka pangan;
3. Garam untuk industri penyamakan kulit;
4. Garam untuk water treatment,
5. Garam untuk industri pakan ternak;
6. Garam untuk industri pengasinan ikan;
7. Garam untuk peternakan dan perkebunan;
8. Garam untuk industri sabun dan deterjen;
9. Garam untuk industri tekstil;
10. Garam untuk pengeboran minyak;
11. Garam untuk industri farmasi;
12. Garam untuk kosmetik; dan
13. Garam untuk industri kimia atau *chlor alkali*.

Kebutuhan harus dipenuhi dari Garam produksi dalam negeri oleh Petambak Garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024. Selain untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, percepatan pembangunan Pergaraman nasional dilakukan untuk pengembangan Garam

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Indikasi Geografis. Percepatan pembangunan Pergaraman nasional dilaksanakan pada SEGAR.

C. Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR)

Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan Usaha Pergaraman dengan kriteria:

1. tersedia lahan untuk produksi Garam;
2. tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman;
3. terdapat pangsa pasar Garam; dan
4. terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan.

Percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada SEGAR sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui sistem bisnis Pergaraman yang meliputi tahapan:

1. praproduksi;
2. produksi;
3. pascaproduksi;
4. pengolahan; dan
5. pemasaran.

Pelaksanaan sistem bisnis Pergaraman dilakukan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional

Rencana induk pergaraman daerah paling sedikit memuat:

1. kondisi umum lokasi Pergaraman;
2. kondisi eksisting prasarana dan sarana Pergaraman;
3. kebutuhan dan pasokan;
4. kondisi pasar Garam;
5. arah kebijakan dan strategri dan
6. rencana aksi pembangunan Pergaraman daerah.

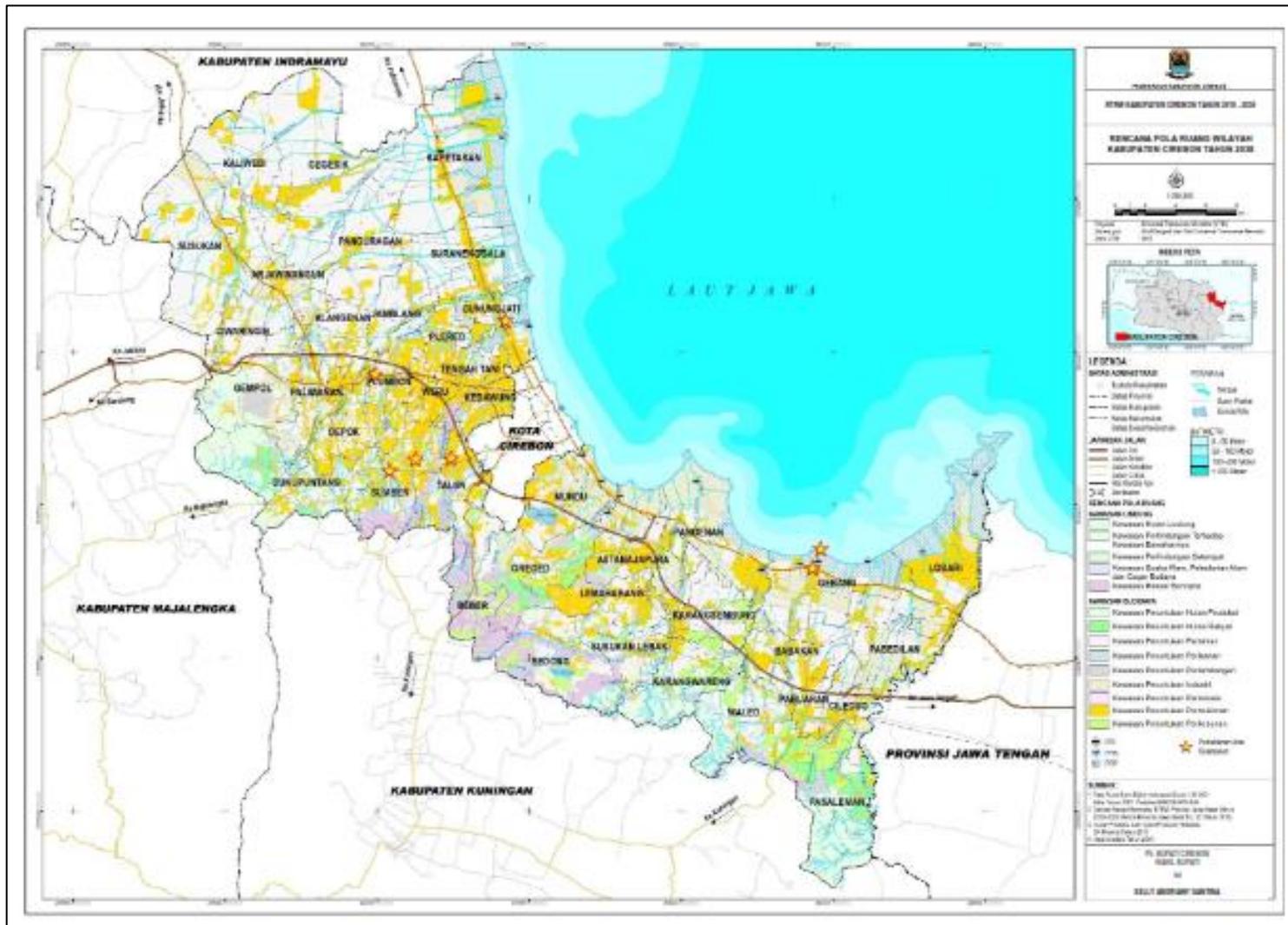
Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional diukur berdasarkan besaran target indikator kinerja yang terdiri atas:

1. produksi Garam pada SEGAR;
2. kualitas Garam pada SEGAR; dan
3. penyerapan hasil produksi Garam pada SEGAR.

2.3.2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 7 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038

- A. Strategi untuk pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan sentra budidaya perikanan air payau, dan **sentra budidaya garam**;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang Pengembangan kegiatan budidaya di kawasan pesisir dan laut.
- B. Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d seluas kurang lebih 7.114 (tujuh ribu seratus empat belas) hektar, terdiri atas:
- a. perikanan budidaya air payau;
 - b. perikanan budidaya air tawar;
 - c. produksi garam**;
 - d. pengolahan perikanan; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- C. **Produksi garam** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 1.624 (seribu enam ratus dua puluh empat) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Kapetakan;
 - b. Kecamatan Suranenggala;
 - c. Kecamatan Gunungjati;
 - d. Kecamatan Mundu;
 - e. Kecamatan Pangenan;
 - f. Kecamatan Astanajapura;
 - g. Kecamatan Gebang; dan
 - h. Kecamatan Losari.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 2.6 Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Cirebon

BAB 3

GAMBARAN UMUM

3.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi

Luas administrasi Kabupaten Cirebon sebesar 99.036 Ha yang terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan. Luas wilayah perairan Kabupaten Cirebon mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada kabupaten untuk mengelola perairan pesisir dalam zona 0-4 mil. Berdasarkan hal tersebut, luas perairan pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebesar 39.960 Ha (54km x 4mil x 1.85km). Secara geografis, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108019'30"- 108050'03" Bujur Timur (BT) dan 6030'58" - 7000'24" Lintang Selatan (LS). Jarak terjauh dari Utara ke Selatan sepanjang 39 km dan jarak terjauh dari Barat ke Timur sepanjang 54 km. Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan
- Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka
- Sebelah Timur : Kota Cirebon, Kabupaten Brebes (Jawa Tengah)

Lokasi kajian pengembangan kawasan pegaraman terdiri dari 8 kecamatan dengan yang berada di pesisir utara Kabupaten Cirebon. Untuk batas wilayah kecamatan dari masing-masing yaitu:

1. Kecamatan Kapetakan

Kecamatan Kapetakan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kecamatan Kapetakan memiliki luas wilayah sebesar 59,79 km² dan terdiri dari 9 Desa/Kelurahan. Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Kapetakan dikelilingi dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- Sebelah Timur : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kecamatan Suranenggala
- Sebelah Barat : Kecamatan Gegesik dan Panguragan

2. Kecamatan Suranenggala

Kecamatan Suranenggala merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kecamatan Suranenggala memiliki luas wilayah sebesar 22,03 km² dan terdiri dari 9 Desa/Kelurahan. Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Suranenggala dikelilingi dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara : Kecamatan Kapetakan, Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Gunungjati
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jamblang, Kecamatan Panguragan
- Sebelah Barat : Kecamatan Kapetakan

3. Kecamatan Gunungjati

Kecamatan Gunungjati sebelumnya bernama Kecamatan Cirebon Utara. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kota Cirebon. Kecamatan Gunungjati memiliki luas wilayah sebesar 20,55 km² dan terdiri dari 15 Desa/Kelurahan. Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Suranenggala dikelilingi dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara : Kecamatan Suranenggala
- Sebelah Timur : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kota Cirebon
- Sebelah Barat : Kecamatan Plered

4. Kecamatan Mundu

Kecamatan Mundu memiliki luas wilayah sebesar 30,62 km² dan berada di ketinggian 1-5 mdpl. Kecamatan ini terdiri dari 12 Desa/Kelurahan. Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Suranenggala dikelilingi dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara : Laut Jawa, Kota Cirebon
- Sebelah Timur : Kecamatan Astana, Kecamatan Japura
- Sebelah Selatan : Kecamatan Greged
- Sebelah Barat : Kota Cirebon

5. Kecamatan Pangenan

Kecamatan Pangenan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Cirebon. Kecamatan ini memiliki luas sebesar 31,10 km² dan terdiri dari sembilan desa/kelurahan. Kecamatan Pangenan memiliki batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Gebang
- Sebelah Barat : Kecamatan Mundu dan Kecamatan Astanajapura
- Sebelah Selatan : Kecamatan Karangsembung

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

6. Kecamatan Astanajapura

Kecamatan Pangenan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon. Kecamatan ini memiliki luas sebesar 27,22 km² dan terdiri dari sebelas desa/kelurahan. Kecamatan Astanajapura berbatasan langsung secara administratif dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Pangenan
- Sebelah Barat : Kecamatan Mundu dan Kecamatan Greged
- Sebelah Selatan : Kecamatan Lemahabang

7. Kecamatan Gebang

Kecamatan Gebang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon. Kecamatan ini memiliki luas sebesar 32,32 km² dan terdiri dari 13 desa/kelurahan. Kecamatan Gebang memiliki batas administrasi antara lain:

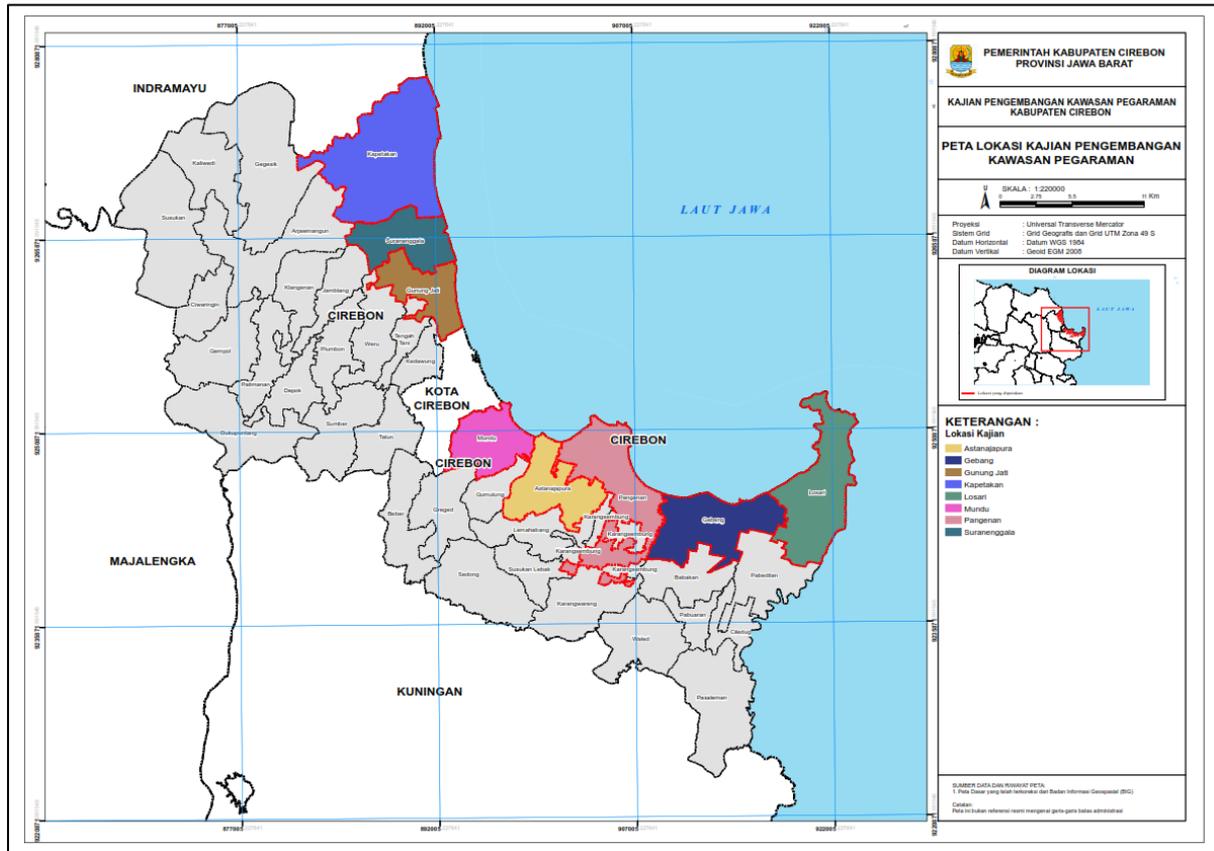
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Gebang
- Sebelah Barat : Kecamatan Pangenan dan Kecamatan Karanggembung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Babakan dan Kecamatan Pabedilan

8. Kecamatan Losari

Kecamatan Losari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon. Kecamatan ini memiliki luas sebesar 45,39 km² dan terdiri dari sepuluh desa/ kelurahan. Kecamatan Losari memiliki batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Barat : Kecamatan Gebang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pabedilan

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 3.1 Lokasi Kajian Pengembangan Kawasan Pegaraman di Kabupaten Cirebon

3.2 Kondisi Sosial Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu aspek yang penting dalam perencanaan perkembangan suatu wilayah. Perkembangan suatu wilayah ditentukan berdasarkan karakteristik penduduk seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, mata pencarian, tingkat pendidikan serta dinamika penduduk. Berikut merupakan jumlah penduduk secara total di lokasi kajian dan berdasarkan jenis kelamin serta berdasarkan mata pencaharian.

1. Kecamatan Kapetakan

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kapetakan Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)
Bungko	4689
Kertasura	8329
Pegagan Kidul	7910
Pegagan Lor	9104
Dukuh	4458
Karangkendal	7986
Grogol	6591
Kapetakan	7441
Bungko Lor	4467

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2021

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Kapetakan Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	7366	7087	14453
15-64	22275	21642	43917
65+	1336	1269	2605
Jumlah	30977	29998	60975

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Cirebon, 2021

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Kapetakan Tahun 2020

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	9. 256 jiwa
2.	Pedagang	2. 390 jiwa
3.	PNS	493 jiwa
4.	Buruh	109 jiwa
5.	Peternak	55 jiwa
6.	Nelayan dan Perikanan	1.451 jiwa
7.	Industri	4.881 jiwa
8.	TNI	135 jiwa
9.	Polri	117 jiwa
10.	Karyawan	3.716 jiwa
11.	Honor	155 jiwa
12.	Supir angkot	50 jiwa
13.	Pengrajin	20 jiwa
14.	Kelompok Tani	90 jiwa
15.	Pengusaha	79 jiwa
16.	Lain-Lain	6. 264 jiwa
	Jumlah	29. 291 jiwa

Sumber: Monografi Kecamatan Kapetakan , 2016

2. Kecamatan Suranenggala

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Suranenggala Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)
Suranenggala Kulon	5564
Surakarta	4985
Keraton	4423
Purwawinangun	8410
Muara	4254
Karangreja	4367
Suranenggala Kidul	4732
Suranenggala Lor	4579
Suranenggala	4767

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Cirebon, 2021

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Suranenggala Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	5559	5363	10922
15-64	16510	16430	32940
65+	1094	1125	2219
Jumlah	23163	22918	46081

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Cirebon, 2021

3. Kecamatan Gunungjati

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Kecamatan Gunungjati Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)
Adidharma	6444
Pasindangan	5127
Jadimulya	7389
Klayan	9938
Jatimerta	5088
Astana	4887
Kalisapu	4093
Wanakaya	5580
Grogol	4895
Babadan	3672
Buyut	6698
Mayung	3482
Sambeng	3596
Sirnabaya	4573
Mertasinga	7016

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Cirebon, 2021

Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Gunungjati Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	9521	9002	18523
15-64	29927	29890	59817
65+	1944	2158	4102
Jumlah	41392	41050	82442

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Cirebon, 2021

4. Kecamatan Mundu

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Kecamatan Mundu Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)
Setupatok	10269
Penpen	9791

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)
Mundu Mesigit	4955
Luwung	5847
Waruduwur	4492
Citemu	3952
Bandengan	3467
Mundu Pesisir	7013
Suci	4114
Banjarwangunan	10940
Pamengkang	13322
Sinarancang	3059

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Cirebon, 2021

Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Mundu Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	10538	9861	20399
15-64	29538	28262	57800
65+	1516	1506	3022
Jumlah	41592	39629	81221

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Cirebon, 2021

5. Kecamatan Pangenan

Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Kecamatan Pangenan Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)
Astanamukti	3726
Pangerangan	5030
Japura Lor	8221
Beringin	3523
Rawaurip	7030
Bendungan	3811
Pangenan	3226
Getrakamoyan	5144
Ender	7159

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2021

Tabel 3.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Pangenan Tahun 2020

Desa	Kelompok Umur		
	0 - 14	15 - 64	65 +
Astanamukti	950	2633	143
Pangerangan	1285	3558	187
Japura Lor	2149	5725	347
Beringin	861	2466	196
Rawaurip	1699	5094	237

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Desa	Kelompok Umur		
	0 - 14	15 - 64	65 +
Bendungan	935	2739	137
Pangenan	779	2317	130
Getrakamoyan	1263	3572	309
Ender	1704	5123	332

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2021

6. Kecamatan Astanajapura

Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Kecamatan Astanajapura Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)
Munjul	9907
Sidamulya	5714
Mertapada Kulon	5902
Mertapada Wetan	8618
Buntet	7930
Kanci Kulon	6883
Kanci	6489
Astanajapura	7560
Kendal	4340
Japura Kidul	8045
Japurabakti	8496

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2021

Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Astanajapura Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	10745	10163	20908
15-64	28615	27177	55792
65+	1575	1609	3184
Jumlah	40935	38949	79884

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2021

7. Kecamatan Gebang

Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Kecamatan Gebang Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)
Dompyong Kulon	4149
Dompyong Wetan	4594
Kalimekar	3178
Kalimaro	2955
Gagasari	4381
Kalipasung	4502
Gebang Kulon	7780
Gebang	7042

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)
Gebang Udik	7294
Gebang Ilir	5742
Gebang Mekar	7679
Pelayangan	4747
Melakasari	3818

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2021

Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Gebang Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	8122	7814	15936
15-64	24283	24038	48321
65+	1808	1796	3604
Jumlah	34213	33648	67861

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2021

8. Kecamatan Losari

Tabel 3.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Losari Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)
Astanalanggar	6166
Barisan	4264
Losari Kidul	3582
Panggangsari	6220
Losari Lor	5964
Mulyasari	6071
Kalirahayu	7326
Kalisari	8117
Ambulu	7821
Tawang Sari	6820

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2021

Tabel 3.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kecamatan Losari Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	7542	7114	14656
15-64	22579	22091	44670
65+	1464	1561	3025
Jumlah	31585	30766	62351

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2021

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

3.3 Kondisi Perekonomian

PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan merupakan gambaran kondisi perekonomian secara umum berdasarkan sektor lapangan usaha. Menunjukkan bahwa sektor dengan kontribusi tertinggi adalah sektor industri pengolahan yang terlihat dari data tabel PDRB mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.18 PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha/Industri	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.485,18	4.563,11	4.559,21
Pertambangan dan Penggalian	416,88	417,12	445,47
Industri Pengolahan	6.889,05	6.809,81	6.984,48
Pengadaan Listrik dan Gas	56,63	54,01	61,28
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	28,36	33,19	36,17
Konstruksi	4.046,87	3.869,18	4.018,35
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.242,93	4.874,19	5.036,25
Transportasi dan Pegudangan	2.674,48	2.574,72	2.585,90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.224,37	1.108,02	1.096,77
Informasi dan Komunikasi	1.103,91	1.440,25	1.510,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.286,47	1.303,60	1.365,38
Real Estat	847,61	858,27	938,10
Jasa Perusahaan	321,66	288,51	311,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	903,40	862,30	854,35
Jasa Pendidikan	1.952,55	2.100,66	2.102,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	794,03	786,74	844,74
Jasa Lainnya	1.393,72	1.360,82	1.377,24
Produk Domestik Bruto	33.668,10	33.304,50	34.128,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2021

3.4 Kondisi Kawasan Pegaraman

3.4.1 Intervensi KKP melalui PUGaR

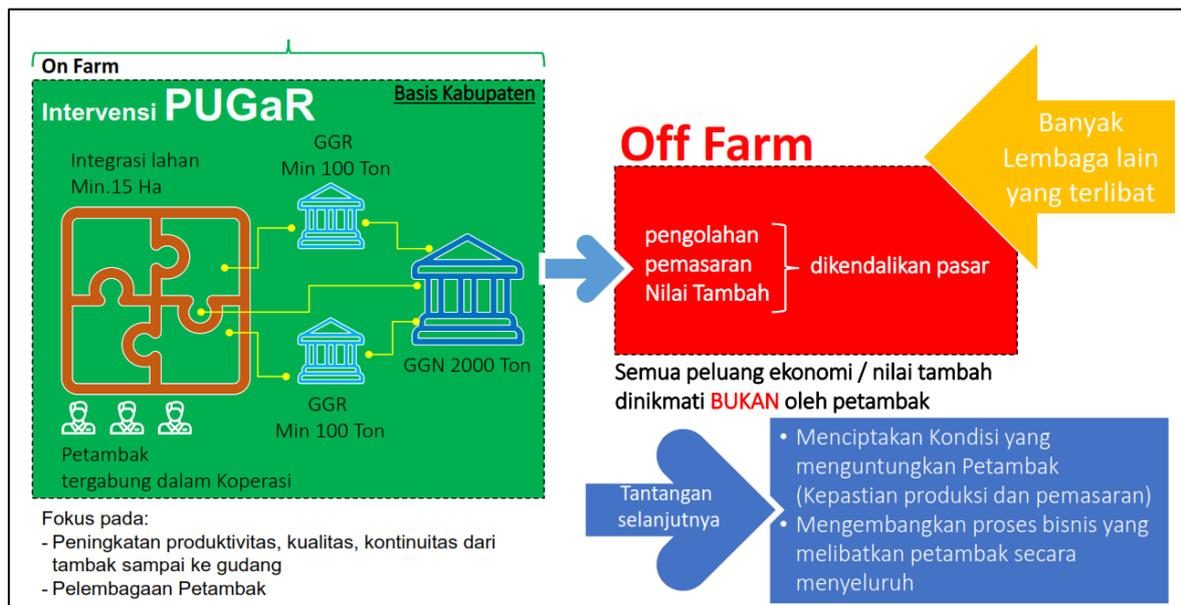
Indonesia merupakan kepulauan dengan total garis pantai mencapai 95 ribu km. Wilayah perairan lautnya yang lebih luas dibanding wilayah daratannya menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Salah satu potensi sektor kelautan dan perikanan yang perlu digali dan dikembangkan adalah garam. Garam merupakan komoditas penting karena merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dikonsumsi. Tetapi di sisi lain, produksi garam dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Hal ini mengakibatkan Indonesia masih melakukan impor garam. Pada dasarnya, dengan potensi kelautan yang besar, Indonesia seharusnya mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan garam sendiri. Oleh karena itu, upaya pengembangan usaha garam melalui penguatan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas garam di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor cuaca dan iklim, kualitas garam rakyat yang kurang bersaing, teknologi yang belum berkembang, sarana dan prasarana produksi garam rakyat yang kurang memadai, serta kemampuan pemasaran garam rakyat yang umumnya masih skala lokal. Hal ini menyebabkan garam lokal cenderung kalah bersaing dengan garam impor. Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu usaha strategis dan sistematis yang dapat membantu petambak garam untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus jangkauan pasar. Program pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi petambak garam. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengembangkan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) sejak tahun 2011.

PUGaR dibentuk sebagai program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam Nasional.

- Kegiatan peningkatan produktivitas lahan garam, kualitas dan kontinuitas pasokan garam berbasis kelembagaan usaha garam rakyat
- Pendekatan PUGaR
 1. Penguatan SDM dan Kelembagaan
 2. Peningkatan sarana/prasarana usaha pegaraman

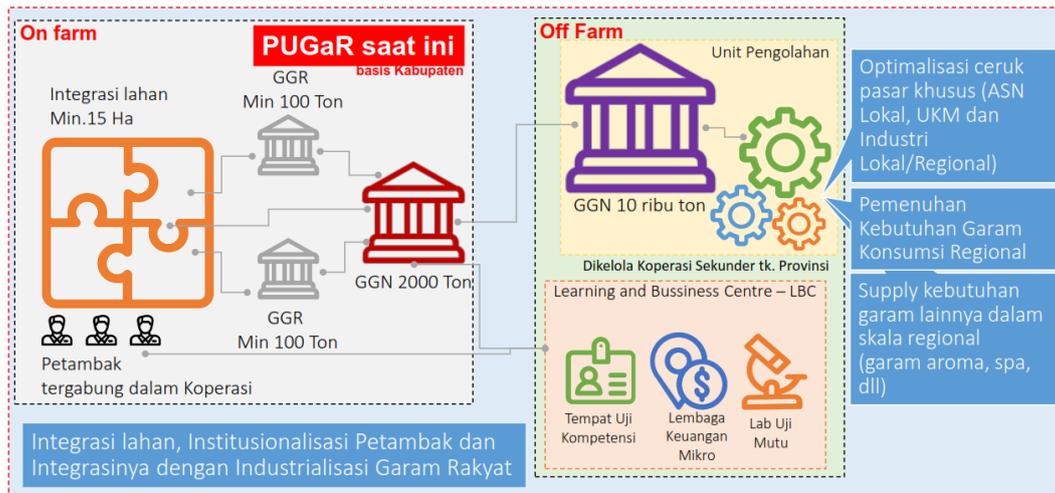


Gambar 3.2 Program PUGaR dan Isu Off Farm

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

3.4.2 Sentra Ekonomi Garam (SEGAR)

Sentra Ekonomi Garam (SEGAR) merupakan Implementasi teknis Perpres No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Salah satu pilar kebijakan kelautan Indonesia adalah ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, yang dilakukan melalui "pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu, dengan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis"



Gambar 3.3 Ilustrasi Konsep SEGAR (1)



Gambar 3.4 Ilustrasi Konsep SEGAR (1)

Dukungan Jangka Panjang KKP mewujudkan SEGAR dalam rangka meningkatkan nilai tambah

1. Mengusulkan RanPerpres Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional sebagai Payung Hukum
2. Menyusun RaPermen KP Sentra Ekonomi Garam Nasional
3. Dukungan Pendanaan Reguler untuk Provinsi dan Kabupaten (antara lain: Penyusunan Master Plan Sentra Ekonomi Pembangunan fisik Fasilitas dan Kelembagaan)

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Peranan SEGAR Melalui payung hukum Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (1)

1. Media Integrasi-sinkronisasi inter K/L
2. Media Pengelolaan garam indikasi geografis, peternakan, perkebunan, jasa spa, dan garam lainnya sebagai garam konsumsi non iodium
3. Media Pengelolaan pasokan bahan baku (Konsumsi dan Industri)
4. Media Pengembangan industry garam, khususnya Pemberdayaan IKM garam
5. Media pengembangan investasi industri pengolah dan pengguna Garam

Pondasi yang dikembangkan KKP menuju SEGAR

1. Penguatan Unit Bisnis Koperasi
Mengoptimalkan fungsi GGN-GGR yang dikelola Koperasi sebagai 'Pusat Transaksi Garam', termasuk implementasi Skema SRG dalam skala luas
2. Pengembangan Jaringan Koperasi Primer melalui Pembentukan Koperasi Sekunder
Intermediasi Pasar, Modal dan Teknologi
3. Sertifikasi Kompetensi dan Standarisasi usaha
Penyiapan Koperasi sebagai pelaku utama Sentra Ekonomi Garam
4. Pengembangan Konsep Korporasi Koperasi
Pilot Project Koperasi Ronggolawe Makmur dengan dukungan Kemenkop dan UKM dan Agriterra Indonesia
5. Intermediasi Koperasi dengan Industri Pengguna dan Swasta
Implementasi konsep Business to business yang setara, termasuk implementasi skema Joint Venture dengan investor

Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan Usaha Pergaraman dengan kriteria:

1. tersedia lahan untuk produksi Garam;
2. tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman;
3. terdapat pangsa pasar Garam; dan
4. terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan.

Percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada SEGAR sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui sistem bisnis Pergaraman yang meliputi tahapan:

1. praproduksi;
2. produksi;
3. pascaproduksi;
4. pengolahan; dan

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

5. pemasaran.

Pelaksanaan sistem bisnis Pergaraman dilakukan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional

Rencana induk pergaraman daerah paling sedikit memuat:

1. kondisi umum lokasi Pergaraman;
2. kondisi eksisting prasarana dan sarana Pergaraman;
3. kebutuhan dan pasokan;
4. kondisi pasar Garam;
5. arah kebijakan dan strategi dan
6. rencana aksi pembangunan Pergaraman daerah.

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional diukur berdasarkan besaran target indikator kinerja yang terdiri atas:

1. produksi Garam pada SEGAR;
2. kualitas Garam pada SEGAR; dan
3. penyerapan hasil produksi Garam pada SEGAR

3.4.3 Kondisi Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon data petambak garam yang ada di kabupaten Cirebon secara total 1.216 jiwa yang terdiri dari 9 wilayah, dengan dominasi jumlah terbanyak berada di wilayah Pangenan dengan jumlah 645 jiwa.

Tabel 3.19 Data Petambak Garam Kabupaten Cirebon Tahun 2021

No.	Wilayah	Jumlah Petambak
1	Astanajapura	61
2	Babakan	7
3	Gebang	80
4	Kapetakan	92
5	Lemahabang	1
6	Losari	161
7	Mundu	138
8	Pangenan	645
9	Suranenggala	31
Total Petambak		1216

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Tabel 3.20 Luas Lahan Tambak Garam Kabupaten Cirebon Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas lahan Produksi (Ha)	Potensi Lahan (Ha)	Produksi Garam (Ton)
1	Kapetakan	288	400	18
2	Suranenggala	120	250	113

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

No	Kecamatan	Luas lahan Produksi (Ha)	Potensi Lahan (Ha)	Produksi Garam (Ton)
3	Mundu	41,3	62	80
4	Astanajapura	62	80	160
5	Pangenan	800	1628	510
6	Losari	109,65	250	57
7	Gebang	136	420	240
8	Gunungjati	0,8	50	25,5
Total		1557,75	3140	1203,5

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Tabel 3.21 Produksi Garam Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Lahan Produksi (Ha)	Jumlah Produksi/Bulan (Ton)												Jumlah Petambak	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Kapetakan	288	0	0	0	0	0	0	0	40	2645	3526	2915	790	0	386
2.	Suraneggala	120	0	0	0	0	0	0	0	50	121	222	688	583	0	14
3.	Mundu	41,3	0	0	0	0	0	0	0	90	510,82	489,11	793,5	468	0	118
4.	Astanajapura	62	0	0	0	0	0	0	0	107	390	805	935	885	0	61
5.	Pangenan	800	0	0	0	0	0	0	0	6400	16.080	22.513	27.000	20.351	0	1.900
6.	Losari	109,6	0	0	0	0	0	0	0	548,3	2.509	2.915	2.925	2.121	0	194
7.	Gebang	136	0	0	0	0	0	0	0	1400	3100	3375	4937	3.252	0	210
8.	Gunungjati	0,8	0	0	0	0	0	0	0	8,7	84,65	36,7	38,4	38,6	0	4
Total		1.558	136.687												2.887	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Tabel 3.22 Produksi Garam Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Lahan Produksi (Ha)	Jumlah Produksi/Bulan (Ton)												Jumlah Petambak	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Kapetakan	288	0	0	0	0	0	0	0	0	25	10	30	0	0	386
2.	Suraneggala	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	108	0	0	14
3.	Mundu	41,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	84,78	0	0	118
4.	Astanajapura	62	0	0	0	0	0	0	0	0	345	190	210	0	0	61
5.	Pangenan	800	0	0	0	0	0	0	0	0	15	40	100	0	0	1.900
6.	Losari	109,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	151	161	0	0	194
7.	Gebang	136	0	0	0	0	0	0	0	0	10	300	600	0	0	210
8.	Gunungjati	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	9	45	50	0	0	4
Total		1.558	2.664												2.887	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Tabel 3.23 Produksi Garam Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Lahan Produksi (Ha)	Jumlah Produksi/Bulan (Ton)												Jumlah Petambak
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Kapetakan	288	0	0	0	0	0	0	0	5	3	10	0	0	92
2.	Suraneggala	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	31
3.	Mundu	41,3	0	0	0	0	0	0	0	0	21,5	58,5	0	0	138
4.	Astanajapura	62	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	30	0	61
5.	Pangenan	800	0	0	0	0	0	0	0	60	0	450	0	0	645
6.	Losari	109,6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	54	0	0	161
7.	Gebang	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	80
8.	Gunungjati	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	6,4	15,3	3,8	0	4
Total		1.558	1.204												1.212

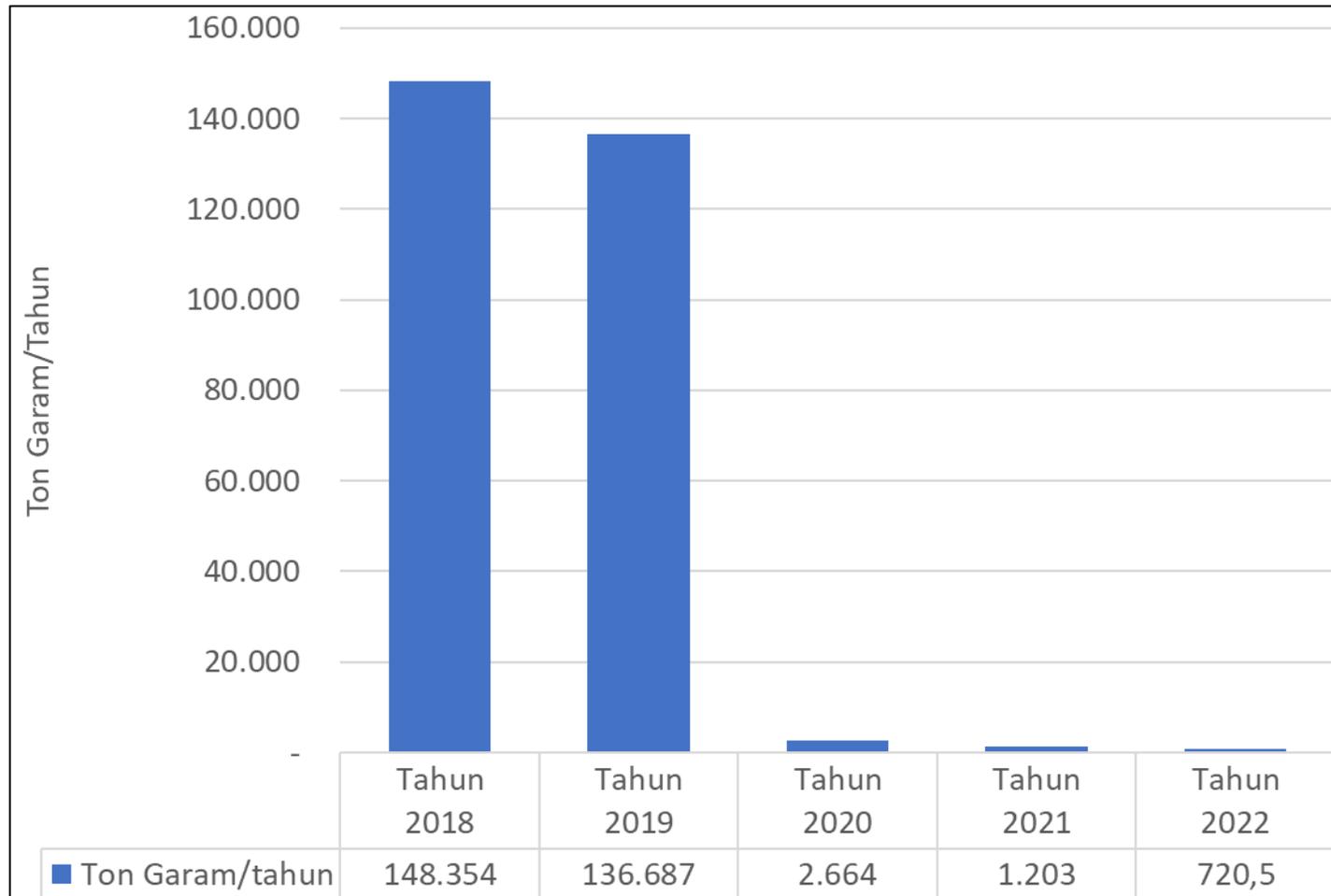
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Tabel 3.24 Produksi Garam Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas Lahan Produksi (Ha)	Jumlah Produksi/Bulan (Ton)												Jumlah Petambak
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Kapetakan	288	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	113		92
2.	Suraneggala	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6,1		31
3.	Mundu	41,3	0	0	0	0	0	0	0	0	15,2	48,3	0		138
4.	Astanajapura	62	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0		61
5.	Pangenan	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0		645
6.	Losari	109,6	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	6,5	85,7		161
7.	Gebang	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		80
8.	Gunungjati	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	0		4
Total		1.558	720,5												1.212

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 3.5 Produksi Garam Tahun 2018-2022

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Tabel 3.25 Gudang Garam di Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Desa	Nama Petambak	Kapasitas Gudang Garam (Ton)	Tahun Pembangunan	Status Kepemilikan Gudang	Status Lahan Gudang
1	Astanajapura	Kanci	Kurnengsih	120	-	Persejawaan	Pribadi
2	Astanajapura	Kanci	Runta	160	-	Persejawaan	-
3	Astanajapura	Kanci	Suhendra	170	-	Persejawaan	-
4	Astanajapura	Kanci Kulon	Fahri	130	-	Persejawaan	-
5	Astanajapura	Kanci Kulon	Ilyas	160	-	Persejawaan	-
6	Astanajapura	Kanci Kulon	Jangkung	140	-	Persejawaan	-
7	Gebang	Gebang Kulon	Kusnadi	100	2015*	Persejawaan	Shm
8	Gebang	Pelayangan	Heru Hiptitonus	150	2000*	Sewa	Pribadi
9	Kapetakan	Bungko	Nurdin (Alm) Diganti Hj.Tanisi	150	-	Persejawaan	Tanah Negara
10	Kapetakan	Pegagan Lor	Sariba	300	2011*	Persejawaan	Tanah Negara
11	Kapetakan	Bungko Lor	Wadiya	200	2018*	Persejawaan	Tanah Negara
12	Losari	Ambulu	Ratim	140	2015*	Persejawaan	Ajb
13	Losari	Ambulu	Kosidah	140	-	Persejawaan	Ajb
14	Losari	Kalisari	Tori	150	-	Persejawaan	-
15	Mundu	Waruduwur	Carmin	100	-	Persejawaan	Pribadi
16	Pangenan	Bendungan	Abd Manaf	100	-	Persejawaan	-
17	Pangenan	Bendungan	Abdul Gofar	130	-	Persejawaan	Shm
18	Pangenan	Bendungan	Abdul Manap	130	-	Persejawaan	Shm
19	Pangenan	Bendungan	Abu Bani	120	-	Persejawaan	-
20	Pangenan	Bendungan	Adma	110	-	Persejawaan	Shm
21	Pangenan	Rawa Urip	Amir	150	2003*	Persejawaan	Pribadi
22	Pangenan	Bendungan	Amirudin	100	-	Persejawaan	-
23	Pangenan	Bendungan	Asep	105	-	Persejawaan	Shm
24	Pangenan	Rawa Urip	Asep	300	2017*	Persejawaan	Pribadi

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

No	Kecamatan	Desa	Nama Petambak	Kapasitas Gudang Garam (Ton)	Tahun Pembangunan	Status Kepemilikan Gudang	Status Lahan Gudang
25	Pangenan	Bendungan	Carmin	110	-	Persejiwaan	Shm
26	Pangenan	Pangenan	Dede	175	2006*	Persejiwaan	Pribadi
27	Pangenan	Bendungan	Diding	100	-	Persejiwaan	Shm
28	Pangenan	Bendungan	Dulajid	100	-	Persejiwaan	-
29	Pangenan	Pangenan	Dulkhair	150	2006*	Persejiwaan	Pribadi
30	Pangenan	Bendungan	H Yusuf	120	-	Persejiwaan	-
31	Pangenan	Bendungan	H. Abdussalaam	270	-	Persejiwaan	Shm
32	Pangenan	Bendungan	H. Junaedi	250	-	Persejiwaan	Shm
33	Pangenan	Rawa Urip	H. Komar	140	2006*	Persejiwaan	Pribadi
34	Pangenan	Bendungan	H. Kosim	130	-	Persejiwaan	Shm
35	Pangenan	Bendungan	H. Kudma	105	-	Persejiwaan	Shm
36	Pangenan	Bendungan	H. Maduki	105	-	Persejiwaan	Shm
37	Pangenan	Pangenan	H. Rusja	100	2003*	Persejiwaan	Pribadi
38	Pangenan	Bendungan	H. Saroni	160	-	Persejiwaan	Shm
39	Pangenan	Bendungan	H. Takrib	150	-	Persejiwaan	Shm
40	Pangenan	Bendungan	H. Tamid	100	-	Persejiwaan	-
41	Pangenan	Rawa Urip	H. Tori	150	2010*	Persejiwaan	Pribadi
42	Pangenan	Pangenan	H. Umar	100	2003*	Persejiwaan	Pribadi
43	Pangenan	Pangenan	H. Wasiram	100	2005*	Persejiwaan	Pribadi
44	Pangenan	Bendungan	Hamzah	100	-	Persejiwaan	-
45	Pangenan	Pangenan	H. Tori	150	2003*	Persejiwaan	Pribadi
46	Pangenan	Bendungan	Imanudin	170	-	Persejiwaan	Shm
47	Pangenan	Bendungan	Ismail	100	-	Persejiwaan	-
48	Pangenan	Bendungan	Jamhari	100	-	Persejiwaan	Shm
49	Pangenan	Bendungan	Kasidin	130	-	Persejiwaan	Shm

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

No	Kecamatan	Desa	Nama Petambak	Kapasitas Gudang Garam (Ton)	Tahun Pembangunan	Status Kepemilikan Gudang	Status Lahan Gudang
50	Pangenan	Bendungan	Kusnan	100	-	Persejiwaan	-
51	Pangenan	Bendungan	M. Juhari	100	-	Persejiwaan	-
52	Pangenan	Bendungan	Madali	100	-	Persejiwaan	-
53	Pangenan	Rawa Urip	Maud	300	2008*	Persejiwaan	Pribadi
54	Pangenan	Rawa Urip	Mukrom	150	2009*	Persejiwaan	Pribadi
55	Pangenan	Pangenan	Nono	300	2009*	Persejiwaan	Pribadi
56	Pangenan	Bendungan	Rais	100	2017*	Persejiwaan	Shm
57	Pangenan	Pangenan	Rasman	150	2004*	Persejiwaan	Pribadi
58	Pangenan	Bendungan	Rokhmat	100	-	Persejiwaan	Shm
59	Pangenan	Rawa Urip	Rosidi	100	2018*	Persejiwaan	Pribadi
60	Pangenan	Bendungan	Sabur	110	-	Persejiwaan	Shm
61	Pangenan	Bendungan	Said	120	-	Persejiwaan	Shm
62	Pangenan	Bendungan	Syaikhu	250	-	Persejiwaan	Shm
63	Pangenan	Bendungan	Syamsul Arifin	100	-	Sewa	-
64	Pangenan	Bendungan	Syarofi	115	-	Persejiwaan	-
65	Pangenan	Bendungan	Syaropi	115	-	Persejiwaan	Shm
66	Pangenan	Rawa Urip	Taslim	300	2017*	Persejiwaan	Pribadi
67	Pangenan	Rawa Urip	Sodikin	100	-	Persejiwaan	-
68	Pangenan	Rawa Urip	H. Sugini	100	-	Persejiwaan	-
69	Pangenan	Rawa Urip	Karijan	100	-	Persejiwaan	-
70	Pangenan	Bendungan	Komar	140	-	Persejiwaan	Shm
71	Pangenan	Rawa Urip	Mujri	100	-	Persejiwaan	-
72	Pangenan	Rawa Urip	Rokani	100	-	Persejiwaan	-
73	Pangenan	Rawa Urip	Sari Sahari	100	-	Persejiwaan	-
74	Pangenan	Rawa Urip	Tariyah	100	-	Persejiwaan	-

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

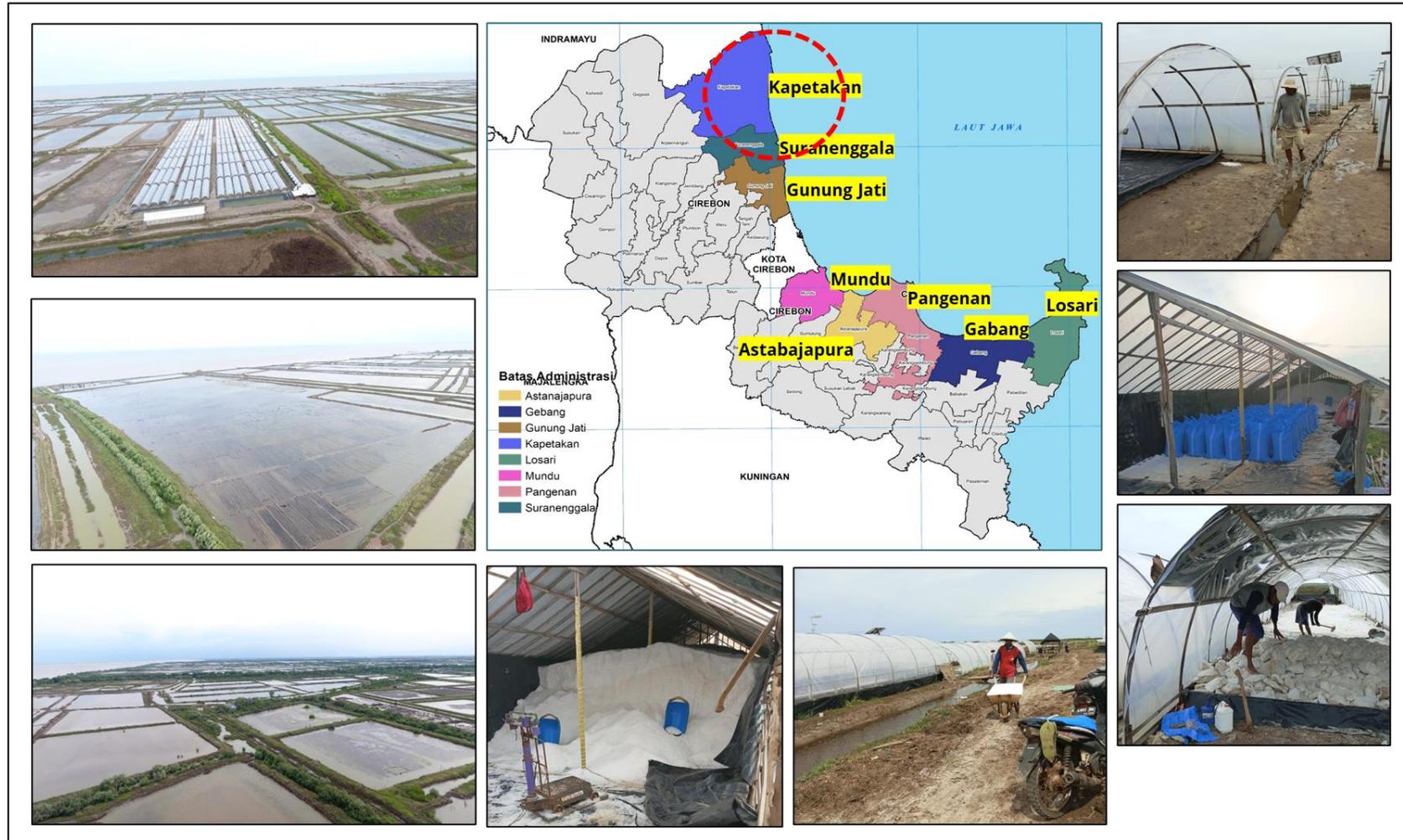
No	Kecamatan	Desa	Nama Petambak	Kapasitas Gudang Garam (Ton)	Tahun Pembangunan	Status Kepemilikan Gudang	Status Lahan Gudang
75	Pangenan	Rawa Urip	Wasma	100	-	Persejiwaan	-
76	Pangenan	Rawa Urip	Wardiah	300	-	Persejiwaan	-
77	Pangenan	Rawa Urip	Darsono	300	-	Persejiwaan	-
78	Pangenan	Rawa Urip	Toya	100	-	Persejiwaan	-
79	Pangenan	Rawa Urip	H.Tasma	100	-	Persejiwaan	-
80	Pangenan	Rawa Urip	Rasji	300	-	Persejiwaan	-
81	Pangenan	Rawa Urip	H.Salman	150	-	Persejiwaan	-
82	Pangenan	Rawa Urip	H.Siman	150	-	Persejiwaan	-
83	Pangenan	Rawa Urip	Darsam	100	-	Persejiwaan	-
84	Pangenan	Rawa Urip	Carwadi	100	-	Persejiwaan	-
85	Pangenan	Rawa Urip	Karijan	100	-	Persejiwaan	-
86	Pangenan	Rawa Urip	H.Darma	100	-	Persejiwaan	-
87	Pangenan	Rawa Urip	Taryadi	100	-	Persejiwaan	-
88	Pangenan	Rawa Urip	H.Tarmidi	200	-	Persejiwaan	-
89	Pangenan	Rawa Urip	H.Nur	300	-	Persejiwaan	-
90	Pangenan	Rawa Urip	Sadwad	100	-	Persejiwaan	-
91	Pangenan	Rawa Urip	Bukrob	100	-	Persejiwaan	-
92	Pangenan	Rawa Urip	Dalman	150	-	Persejiwaan	-
93	Pangenan	Rawa Urip	Taswan	100	-	Persejiwaan	-
94	Pangenan	Rawa Urip	Wawan	100	-	Persejiwaan	-
95	Pangenan	Rawa Urip	Epi	100	-	Persejiwaan	-
96	Pangenan	Rawa Urip	Kardi	100	-	Persejiwaan	-
97	Pangenan	Rawa Urip	Lukman	300	-	Persejiwaan	-
98	Kapetakan	Pegagan Lor	Nurdin	150	2015*	Persejiwaan	Tanah Negara
99	Suranenggala	Suranenggala	H. Atmaja	135	2007*	Sewa	Pribadi

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

No	Kecamatan	Desa	Nama Petambak	Kapasitas Gudang Garam (Ton)	Tahun Pembangunan	Status Kepemilikan Gudang	Status Lahan Gudang
100	Losari	Ambulu	Kosidah	240	2016*	Persejiwaan	Ajb
101	Losari	Ambulu	Ruyati	252	2016*	Persejiwaan	Ajb
102	Losari	Kalisari	Satori	144	2016*	Persejiwaan	Ajb
103	Pangenan	Bendungan	Taufik	100	2015*	Persejiwaan	Shm
104	Pangenan	Bendungan	Arsad	150	2016*	Persejiwaan	Shm
105	Pangenan	Bendungan	H. Asiyah	200	-	Persejiwaan	Shm
106	Pangenan	Bendungan	Mahmud	105	-	Persejiwaan	Shm
107	Pangenan	Bendungan	Hakim	150	-	Persejiwaan	Shm
108	Pangenan	Bendungan	H. Ratini	100	-	Persejiwaan	Shm
109	Pangenan	Bendungan	H. Salam	150	-	Persejiwaan	Shm
110	Pangenan	Bendungan	Alpian	165	-	Persejiwaan	Shm

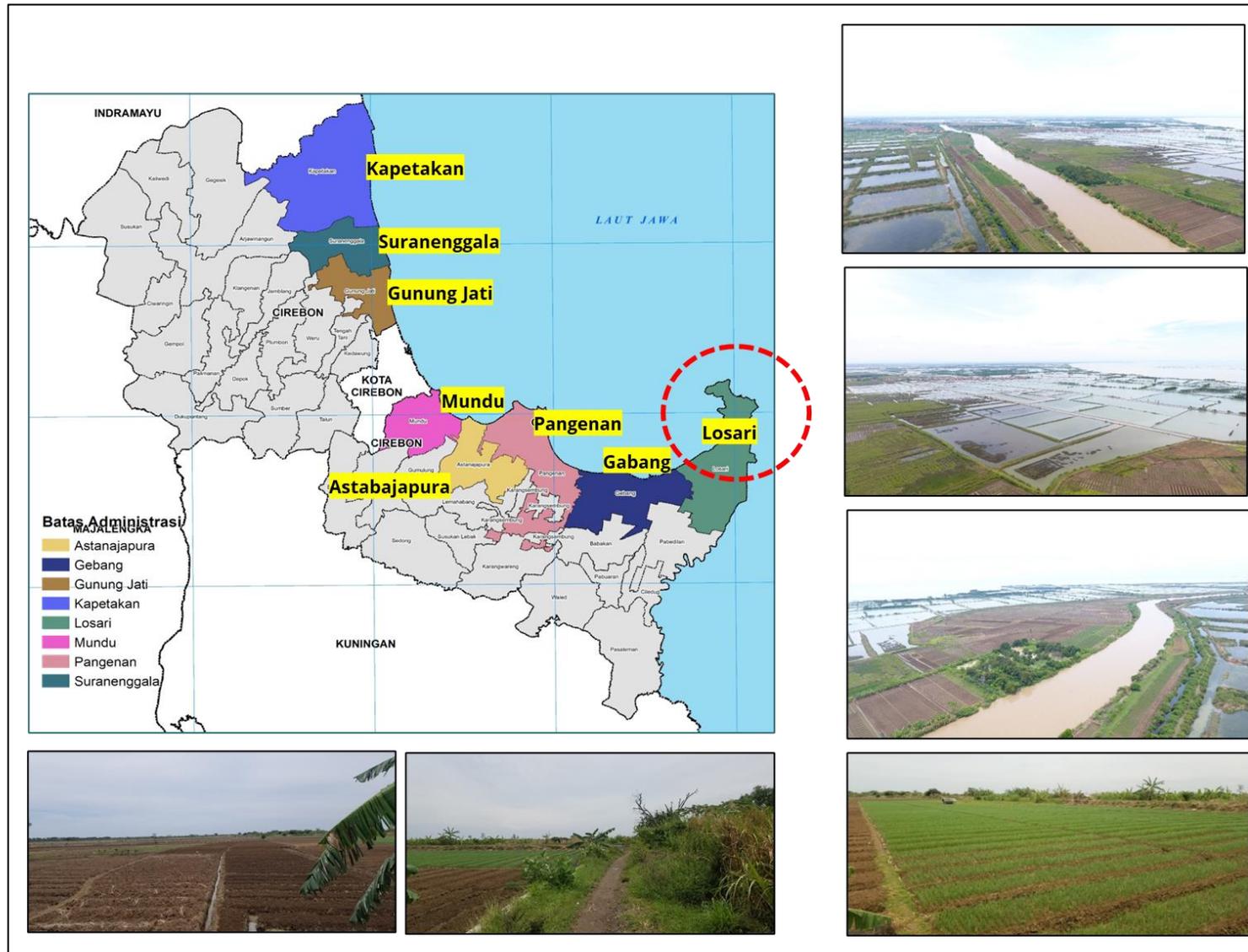
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 3.6 Hasil Survey Lapangan Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapatekan

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 3.7 Hasil Survey Lapangan Desa Tawangsari, Kecamatan Losari

BAB 4

METODOLOGI

4.1 Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan kegiatan kajian pengembangan kawasan pegaraman dipersiapkan persiapan di awal dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan;
- b. Metodologi pelaksanaan kegiatan;
- c. Review terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait.

4.2 Tahap Pengumpulan dan Kompilasi Data

Pengumpulan data bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi dan kolekting data-data yang dibutuhkan sesuai list kebutuhan data melalui data/informasi yang dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan survei yang terdiri dari survei primer dan survei sekunder. Metode yang akan dilakukan dalam survei lapangan terdiri dari:

a. Survei primer

Melakukan pengumpulan data primer melalui survey lapangan dan konsultasi dengan perangkat daerah yang terkait. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara. Observasi lapangan dilakukan melalui pengamatan untuk mengidentifikasi fakta kondisi lapangan. Adapun tahapan pengumpulan data primer dilakukan dengan cara;

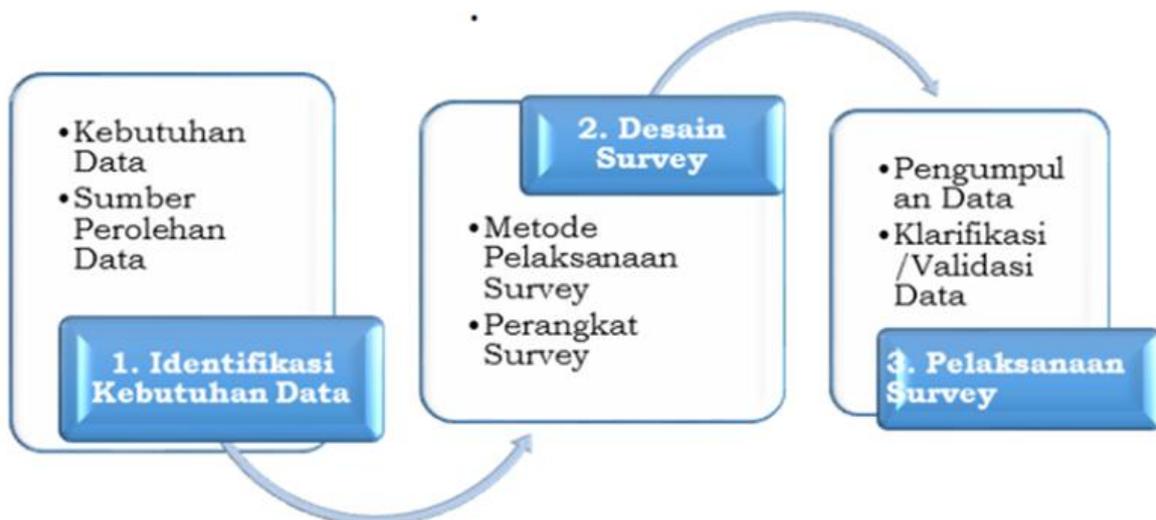
1. **Observasi** lapangan melalui pencatatan kondisi yang sebenarnya, melihat penggunaan lahan eksiting dan kondisi aktual di lapangan.
2. **Wawancara/ kuisisioner** kepada responden terpilih (pejabat pemerintahan, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha
3. **Dokumentasi** sebagai alat bukti yang menggambarkan kondisi real di lapangan serta potensi dan masalah yang terindikasi.

b. Survei Sekunder

1. Melakukan pengumpulan data sekunder dari instansi dan pemangku kepentingan terkait.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

2. Menyelenggarakan diskusi dengan perangkat daerah terkait, dalam rangka menjangkau saran dan masukan guna terwujudnya pengembangan kawasan pegaraman di kabupaten Cirebon yang komperhensif
3. Kunjungan ke instansi-instansi terkait untuk mengumpulkan data sekunder. Bahan yang digunakan adalah *check list* data dengan sumbernya yang sudah dipersiapkan pada tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan. Dalam pengumpulan data dan informasi ini, secara garis besar diidentifikasi kebutuhan data dalam pekerjaan ini meliputi:
 - **klasifikasi data** menurut kelompok subyek datanya, yang kemudian dirinci lebih lanjut dengan jenis-jenis data yang dibutuhkan;
 - **series data**, yaitu cakupan seri waktu dari data tersebut berdasarkan periode waktu data tersebut;
 - **jenis survei** yang dilakukan untuk memperoleh data tersebut, yaitu meliputi survei data primer dan pengumpulan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang ada di lembaga-lembaga tertentu di daerah;
 - **skala data** yang meliputi skala kabupaten, kecamatan, dan kelurahan.

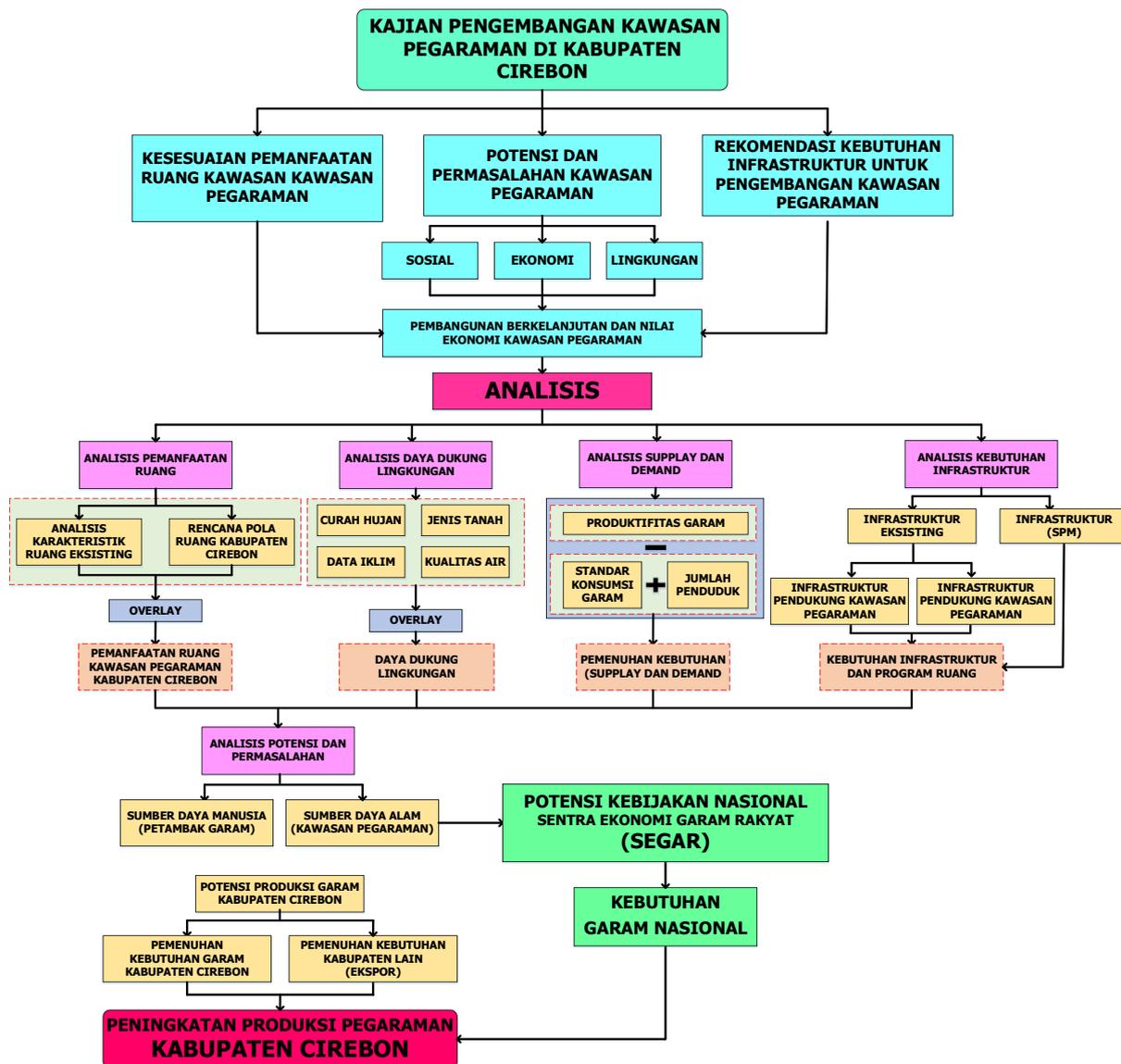


Gambar 4.1 Tahapan Pengumpulan Data Dan Informasi

4.3 Tahap Analisis dan Kajian

Pada tahap ini akan dilakukan analisis dalam Kajian Pengembangan Kawasan Pegaraman di Kabupaten Cirebon. Fokus dalam kajian ini terkait aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dengan tujuan agar dapat meningkatkan pengembangan kawasan pegaraman di Kabupaten Cirebon. Terdapat beberapa analisis yang digunakan yaitu terkait dengan kesesuaian lokasi kawasan pegaraman dengan peruntukan ruang atau rencana tata ruang, kemudian analisis untuk mengetahui daya dukung lahan untuk kawasan pegaraman dilihat dari karakteristik fisik kawasan seperti kondisi curah hujan, iklim, kualitas air, tekstur tanah atau jenis tanah yang mendukung kawasan pegaraman dari aspek fisik dasar lingkungan, kemudian dianalisis juga terkait supply dan demand untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan garam untuk kabupaten Cirebon bahkan untuk luar kabupaten Cirebon, kemudian dianalisis juga kebutuhan infrastruktur pegaraman dan kebutuhan infrastruktur penunjang kawasan pegaraman, selanjutnya akan diidentifikasi potensi dan permasalahan yang muncul baik dari hasil analisis yang telah dilakukan maupun dari hasil survey dan wawancara di lokasi kajian. Lokasi dengan potensi produktifitas tinggi akan menjadi lokasi prioritas pengembangan kawasan dengan adanya peluang program pemerintah pusat yaitu Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). Pengembangan kawasan yang menjadi Sentra Ekonomi Garam Rakyat akan dibuat konsep pengembangan dengan rantai pasok untuk mengetahui integrasi melalui mata rantai *supplier* yang terkait dalam hal ini produk garam mulai dari *supplier* awal (*raw material supplier*) hingga pelanggan akhir (*end customer*). Keseluruhan rangkaian tersebut akan dihasilkan kesimpulan dan rekomendasi dari Kajian Pengembangan Kawasan Pegaraman di Kabupaten Cirebon.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 4.2 Kerangka Analisis

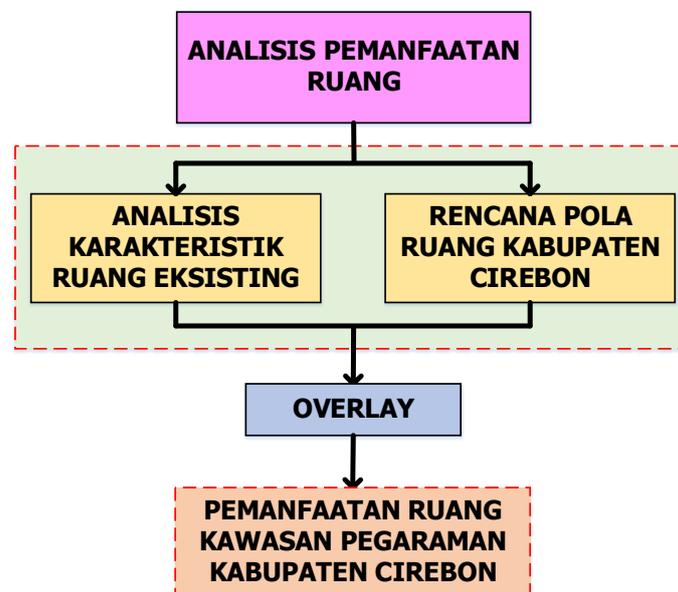
4.3.1 Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Analisis yang digunakan untuk mengetahui analisis pemanfaatan ruang yaitu bersifat komparatif karena membandingkan suatu kondisi mengenai obyek berdasarkan kondisi riil yang ada dan baku mutu yang telah ditetapkan, kesesuaian lokasi kawasan pegaraman dengan peruntukan ruang atau rencana tata ruang, sehingga dari kajian ini akan menghasilkan perbandingan data berdasarkan kesesuaian pemanfaatan ruang. Dalam kajian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengkompilasi data, kemudian dianalisis menggunakan software Arcgis untuk menjelaskan dan menggambarkan pola pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya. Data yang digunakan dalam kajian ini meliputi data primer dan data sekunder, baik untuk aspek tata ruang maupun aspek sosial dan ekonomi.

Data yang diperoleh akan dianalisa melalui tiga tahapan yaitu:

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

1. analisis deskriptif mengenai kondisi umum dan potensi sumber daya alam yang ada disekitar lokasi kajian dalam hal ini terkait dengan kawasan pegaraman.
2. dengan metode untuk mengeksplorasi keinginan masyarakat atas penataan ruang di kawasan pegaraman melalui pemetaan partisipatif dan FGD.
3. analisis SIG (Arcgis) untuk menganalisis spasial penentuan kesesuaian lahan pola pemanfaatan ruang fisik perairan berdasarkan pola pemanfaatan yang ada saat ini kemudian disandingkan dengan rencana peruntukan menggunakan peta RTRW Kabupaten Cirebon. Analisis pemanfaatan kawasan pegaraman yang dihasilkan dilakukan dengan menggunakan metode skoring. Metode skoring mempermudah penentuan kelayakan suatu wilayah perairan, penentuan prioritas kelayakan dan tingkat kepentingan dari elemen dalam proses hirarki. Berdasarkan parameter-parameter kelayakan, skor yang diberikan didasarkan perbandingan sesuai skala yang digunakan



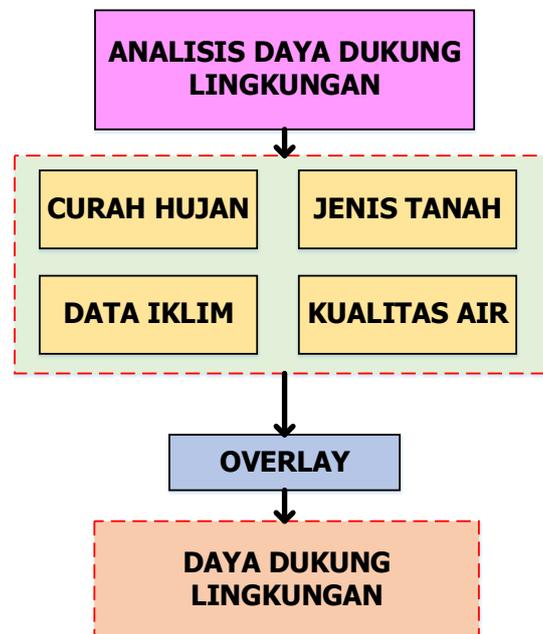
Gambar 4.3 Metode Analisis Pemanfaatan Ruang

4.3.2 Analisis Daya Dukung Lingkungan

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui daya dukung lingkungan kawasan pegaraman dilihat dari karakteristik fisik kawasan seperti kondisi curah hujan, iklim, kualitas air, tekstur tanah atau jenis tanah yang mendukung kawasan pegaraman dari aspek fisik dasar lingkungan, yaitu metode overlay yang didukung oleh *software* Arcgis dan juga didukung oleh data statistic berdasarkan hasil survey dari walidata terkait pegaraman di kabupaten Cirebon, Berdasarkan klasifikasinya setiap data, terutama data iklim terutama pada bulan kering diberikan bobot nilai sesuai dengan tingkatan klasifikasinya. Luas dan produktivitas garam rakyat, nilai yang digunakan adalah sesuai dengan data. Angka-angka ini akan digunakan untuk keperluan analisis statistic deskriptif. Setelah itu di analisis dengan menggunakan

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

metode overlay peta dan statistik, hasil dari analisis ini akan mengidentifikasi kesesuaian lokasi menentukan kriteria lokasi pegaraman berdasarkan daya dukung lingkungannya, agar terciptanya keseimbangan lingkungan dengan diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kawasan pegaraman di Kabupaten Cirebon.



Gambar 4.4 Metode Analisis Daya Dukung Lingkungan

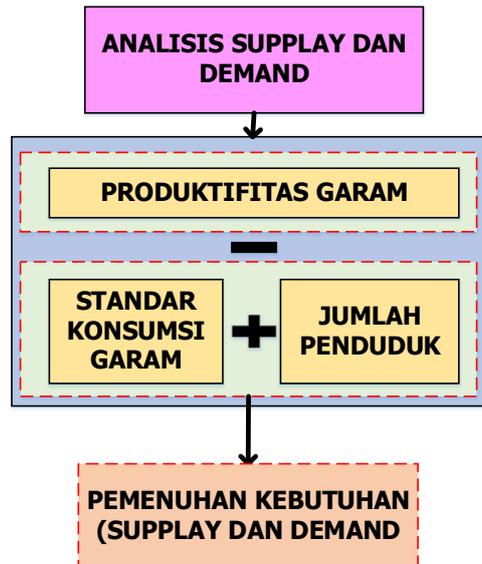
4.3.3 Analisis Supply - Demand dan Nilai Tambah

Analisis pengembangan suatu produk atau barang dalam hal ini adalah sektor garam, hakekatnya menekankan pada analisis terhadap kondisi pemuasan (*satisfying*) antara penyediaan/ penawaran (*supply*) dengan kebutuhan/ permintaan (*demand*). *Supply* adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen dalam hal ini adalah produksi garam. *Demand* adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen.

Analisis *supply* dan *demand* yang digunakan dalam kajian pengembangan kawasan pegaraman akan diidentifikasi pemenuhan kebutuhan garam di kabupaten Cirebon dan proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan di luar kabupaten Cirebon, terkait data yang digunakan yaitu produktifitas garam di Kabupaten Cirebon yang akan dibandingkan dengan konsumsi garam berdasarkan kebutuhan perorang sesuai dengan standar konsumsi garam perorangnya. Data dan rumus perhitungan proporsi konsumsi garam adalah sebagai berikut:

1. Data produksi garam (ton/tahun)
2. Data jumlah penduduk (jiwa)
3. Standar konsumsi garam (orang/hari)

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



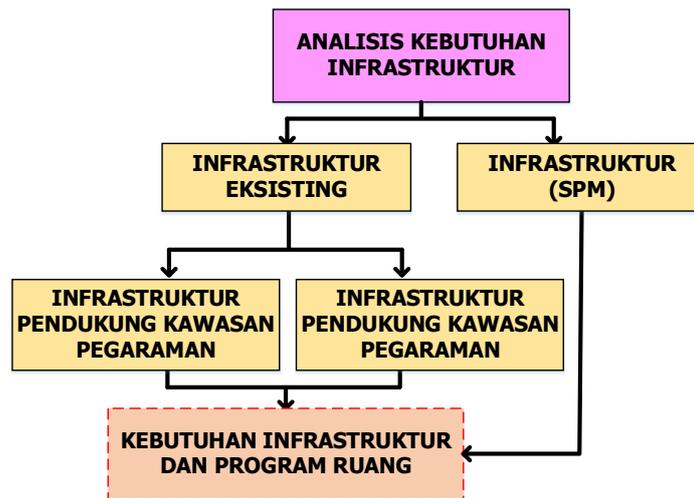
Gambar 4.5 Metode Analisis Supply dan Demand

4.3.4 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Pengembangan Sentra Garam

Kebutuhan infrastruktur pegaraman berdasarkan penzanaan (program ruang) maka digunakan metode analisis berupa analisis komparasi. Analisis komparasi yaitu membandingkan antara kondisi eksisting dengan standar, tujuan menggunakan metode analisis ini dalam kajian pengembangan kawasan pegaraman yaitu untuk mengidentifikasi dan membandingkan infrastruktur yang ada saat ini (eksisting) dengan infrastruktur sesuai dengan standar yang nantinya akan menghasilkan kebutuhan infrastruktur berdasarkan Zona Kawasan Pegaraman.

Dalam melakukan analisa identifikasi kondisi eksisting infrastruktur digunakan dilakukan *Theoritical Descriptive*. Dimana dalam analisisnya dilakukan pendiskusian antara kebutuhan infrastruktur yang diperoleh dari kajian pustaka dengan berbagai peraturan perundangan bahkan dari kajian terdahulu yang berhubungan dengan kebutuhan infrastruktur pegaraman, sehingga dapat diketahui kondisi eksisting infrastruktur tambak di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya setelah teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur kemudian merumuskan arahan pengembangan infrastruktur berdasarkan peran dan fungsinya melalui data-data primer dan sekunder yang telah diperoleh

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 4.6 Metode Analisis Kebutuhan Infrastruktur Pegaraman

4.3.5 Analisis Potensi dan Masalah

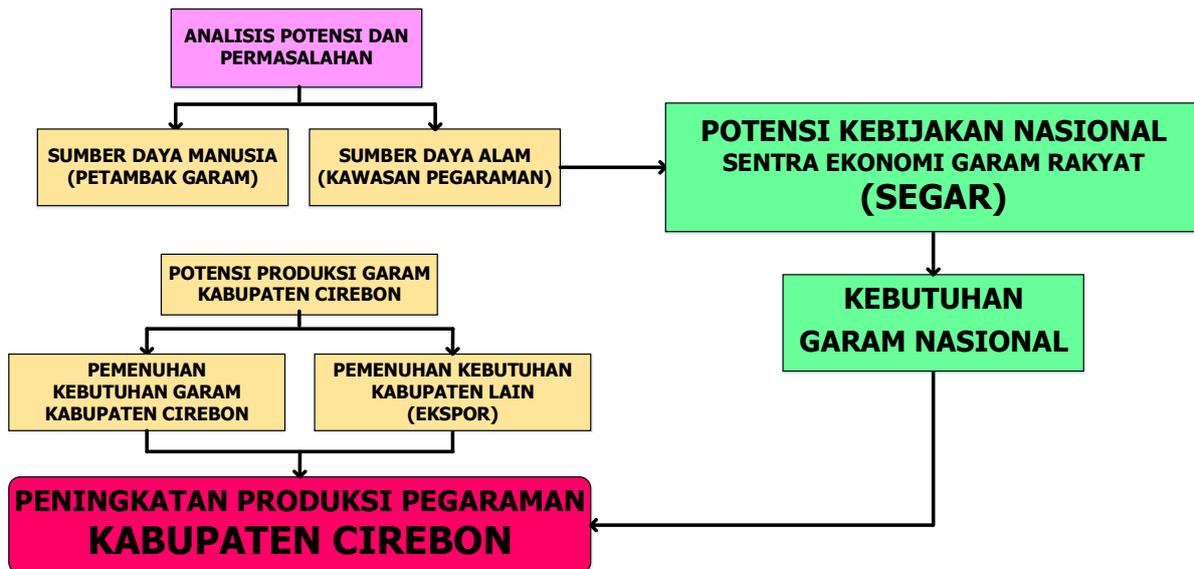
Analisis SWOT dapat dipergunakan dalam rangka merumuskan keunggulan strategik guna mengidentifikasi dengan jelas kekuatan dan kelemahan suatu institusi atau kelembagaan pada saat ini. Strategik didesain sebagai bagian dari usaha memperbaiki kelemahan institusi untuk mengubahnya menjadi kekuatan dan bahkan menjadi kompetensi yang unik (Hubeis dan Najib, 2008). Menurut David (2004), setiap institusi bersifat unik dalam arti memiliki karakteristiknya sendiri yang khas dan berbeda dengan institusi lain.

Kekuatan eksternal secara langsung berpengaruh kepada suatu institusi untuk itu evaluasi peluang dan ancaman eksternal sangat diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan mengembangkan kebijakan (Hubeis dan Najib, 2008). Pendekatan metode rumusan SWOT dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1 Kerangka Metode Analisis SWOT

ANALISIS SWOT	Strength (S) Tentukan Variabel Kekuatan Internal	Weaknesses (W) Tentukan Variabel Kelemahan Internal
Oportunities (O) Tentukan variabel peluang Eksternal	Strategi (S.O) Gunakan Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang	Strategi (S.O) Atasi Kelemahan Dengan Memanfaatkan Peluang
Treaths (T) Tentukan Variabel Ancaman Eksternal	Strategi (S.T) Gunakan Kekuatan Untuk Menghindari Ancaman	Strategi (W.T) Minimalkan Kelemahan dan Hindari Ancaman

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 4.7 Metode Analisis Potensi dan Permasalahan

4.3.6 Analisis Lokasi Prioritas untuk Pengembangan SEGAR

Berdasarkan lingkup wilayah dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah seluruh kawasan pesisir di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan maka untuk mengidentifikasi lokasi yang menjadi prioritas pengembangan kawasan dihasilkan dari rangkuman seluruh hasil analisis. Lokasi prioritas tersebut nantinya akan diroyeksikan untuk program Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang merupakan program pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No 126 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Penentuan lokasi prioritas pengembangan kawasan pegaraman selain memperhatikan dari hasil analisis pada sub bab sebelumnya, dilakukan juga analisis konstelasi kawasan untuk mendukung analisis prioritas pengembangan kawasan untuk melihat konstelasi kawasan dari masing-masing kecamatan/kawasan. dengan menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografi). Data dikumpulkan dari berbagai dinas berupa peta-peta dari setiap sektor yang nantinya akan menjadi pendukung penentuan lokasi prioritas.

4.3.7 Arahan Pengembangan Konsep SEGAR

Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.

1. Pembangunan Pergaraman Nasional

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional. Kebutuhan Garam nasional:

- a. Garam konsumsi;
- b. Garam untuk industri aneka pangan;

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

- c. Garam untuk industri penyamakan kulit;
- d. Garam untuk water treatment,
- e. Garam untuk industri pakan ternak;
- f. Garam untuk industri pengasinan ikan;
- g. Garam untuk peternakan dan perkebunan;
- h. Garam untuk industri sabun dan deterjen;
- i. Garam untuk industri tekstil;
- j. Garam untuk pengeboran minyak;
- k. Garam untuk industri farmasi;
- l. Garam untuk kosmetik; dan
- m. Garam untuk industri kimia atau *chlor alkali*.

Kebutuhan harus dipenuhi dari Garam produksi dalam negeri oleh Petambak Garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024. Selain untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, percepatan pembangunan Pergaraman nasional dilakukan untuk pengembangan Garam Indikasi Geografis. Percepatan pembangunan Pergaraman nasional dilaksanakan pada SEGAR.

2. Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR)

Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan Usaha Pergaraman dengan kriteria:

- a. tersedia lahan untuk produksi Garam;
- b. tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman;
- c. terdapat pangsa pasar Garam; dan
- d. terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan.

Percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada SEGAR sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui sistem bisnis Pergaraman yang meliputi tahapan:

- a. praproduksi;
- b. produksi;
- c. pascaproduksi;
- d. pengolahan; dan
- e. pemasaran.

Pelaksanaan sistem bisnis Pergaraman dilakukan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional

Rencana induk pergaraman daerah paling sedikit memuat:

- a. kondisi umum lokasi Pergaraman;

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

- b. kondisi eksisting prasarana dan sarana Pergaraman;
- c. kebutuhan dan pasokan;
- d. kondisi pasar Garam;
- e. arah kebijakan dan strategri dan
- f. rencana aksi pembangunan Pergaraman daerah.

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional diukur berdasarkan besaran target indikator kinerja yang terdiri atas:

- a. produksi Garam pada SEGAR;
- b. kualitas Garam pada SEGAR; dan
- c. penyerapan hasil produksi Garam pada SEGAR.

BAB 5

ANALISIS

5.1 Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengetahui kesesuaian lokasi kawasan pegaraman dengan peruntukan ruang atau rencana tata ruang. Analisis ini bersifat komparatif, sehingga dari kajian ini akan dihasilkan perbandingan data berdasarkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Analisis yang digunakan untuk mengetahui analisis pemanfaatan ruang yaitu bersifat komparatif karena membandingkan suatu kondisi mengenai obyek berdasarkan kondisi riil yang ada dan baku mutu yang telah ditetapkan, kesesuaian lokasi kawasan pegaraman dengan peruntukan ruang atau rencana tata ruang, sehingga dari kajian ini akan menghasilkan perbandingan data berdasarkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Dalam kajian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengkompilasi data, kemudian dianalisis menggunakan software Arcgis untuk menjelaskan dan menggambarkan pola pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya. Adapun hasil dari analisis kesesuaian pemanfaatan ruang yakni sebagai berikut.

Tabel 5.1 Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon

Rencana Pola Ruang	Penggunaan Lahan 2015	Keterangan	Luas Lahan (ha)	%
Budidaya Garam	Air Empang	Sesuai	3,14	0,09%
Budidaya Garam	Air Penggarapan	Sesuai	3.403,21	92,79%
Budidaya Garam	Air Tawar Sungai	Sesuai	230,26	6,28%
Budidaya Garam	Kebun Campuran	Kurang Sesuai	23,12	0,63%
Budidaya Garam	Sawah	Kurang Sesuai	6,34	0,17%
Budidaya Garam	Tanah Kosong / Gundul	Kurang Sesuai	1,60	0,04%
Total			3.667,67	100,00%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 5.2 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon

Keterangan	Luas Lahan (ha)	%
Sesuai	3.636,61	99,78
Kurang Sesuai	31,06	0,22
Total	3.667,67	100

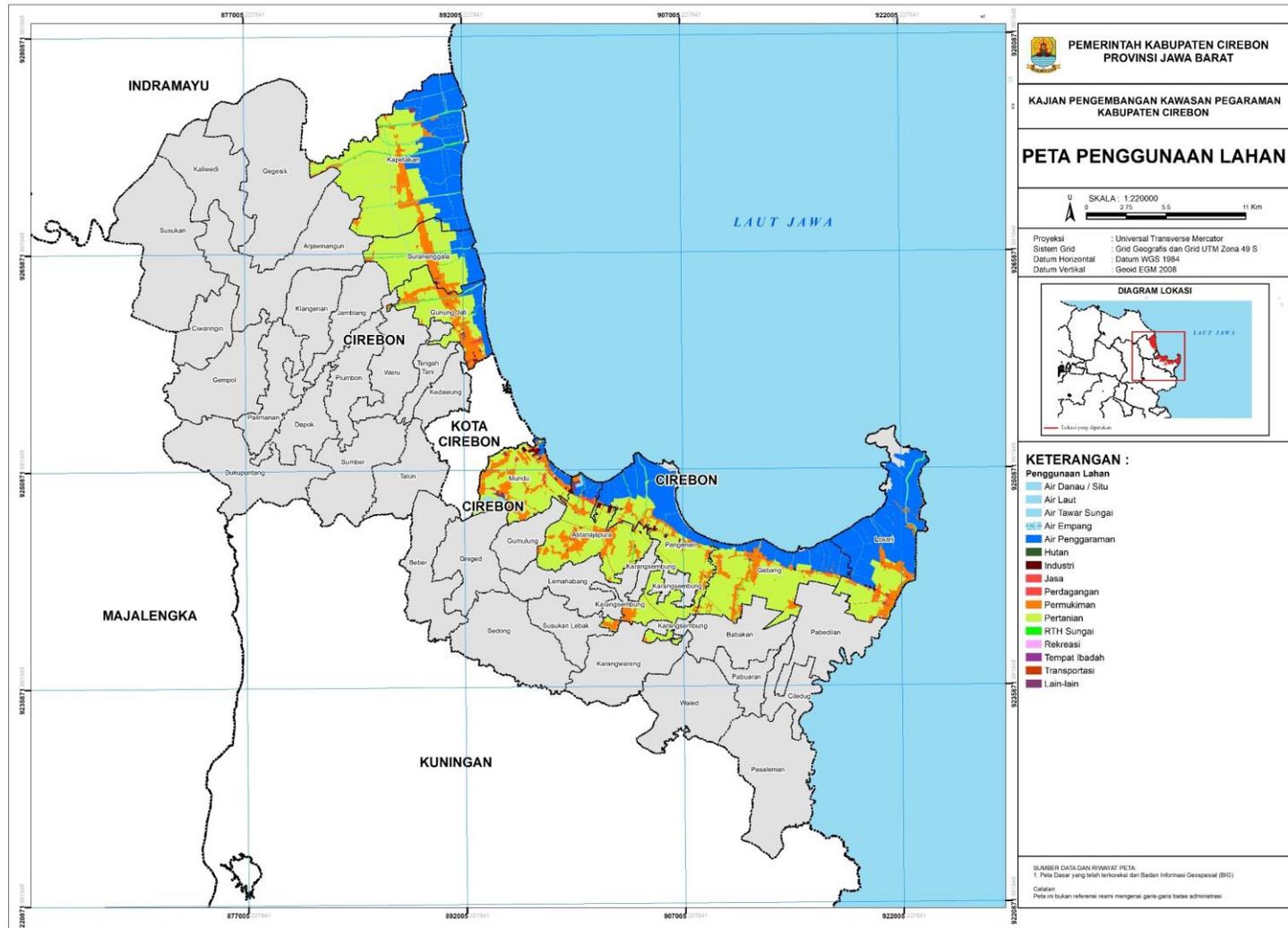
Sumber: Hasil Analisis, 2022

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan tabel di atas, diketahui perbandingan antara penggunaan lahan di Kabupaten Cirebon tahun 2015 dengan rencana pola ruang budidaya garam. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan lahan yaitu air empang, air penggaraman, air tawar sungai, dan kebun campuran dinilai sesuai dengan rencana pola ruang budidaya garam. Namun terdapat ketidaksesuaian yakni penggunaan lahan sawah dan tanah kosong.

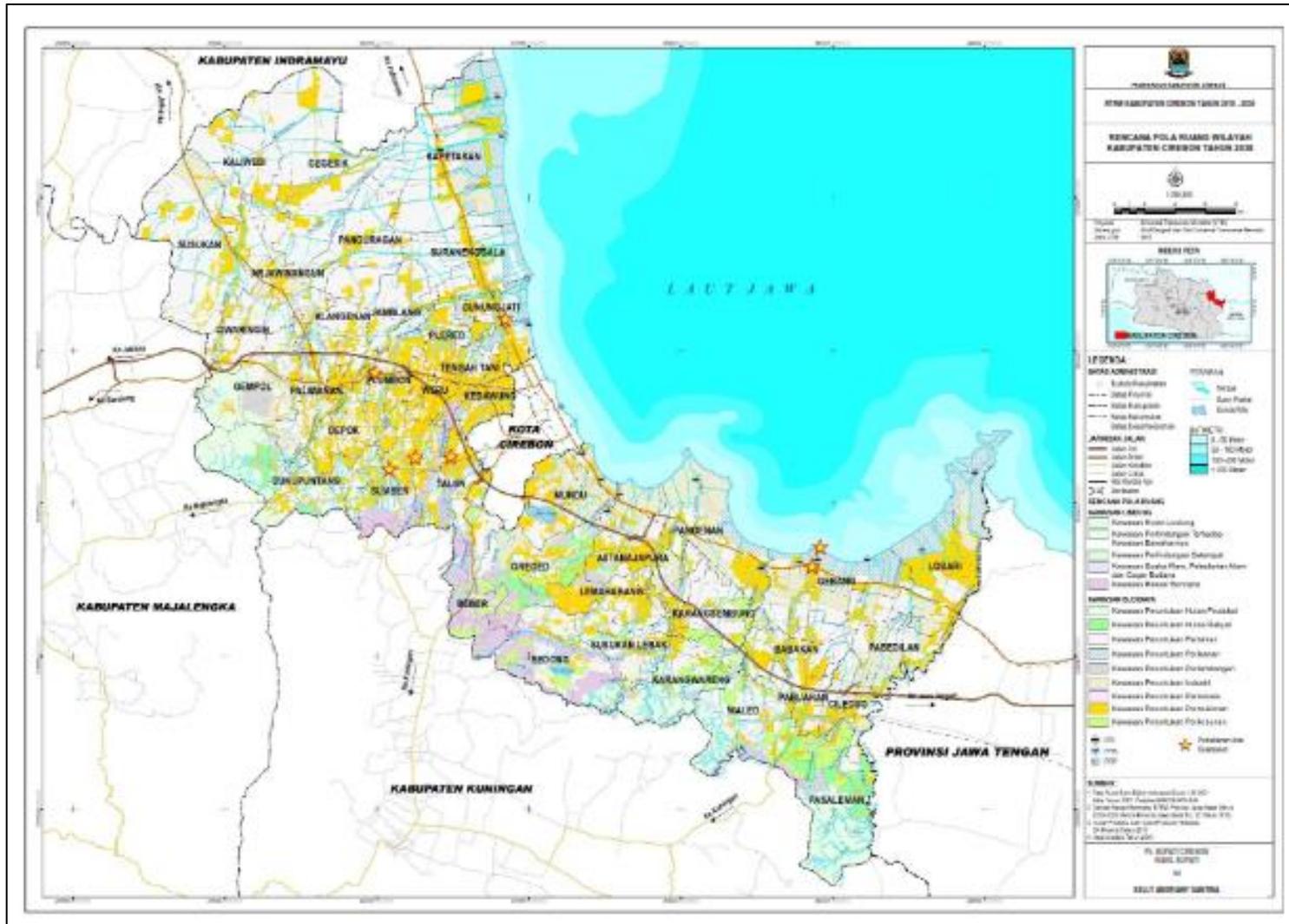
Secara keseluruhan, penggunaan lahan di Kabupaten Cirebon sebagian besar sudah sesuai dengan rencana pola ruang budidaya garam dengan persentase sebesar 99,78%. Sedangkan lahan yang belum sesuai dengan rencana pola ruang hanya sebesar 0,22% yakni dengan luas lahan 31,06 hektar.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



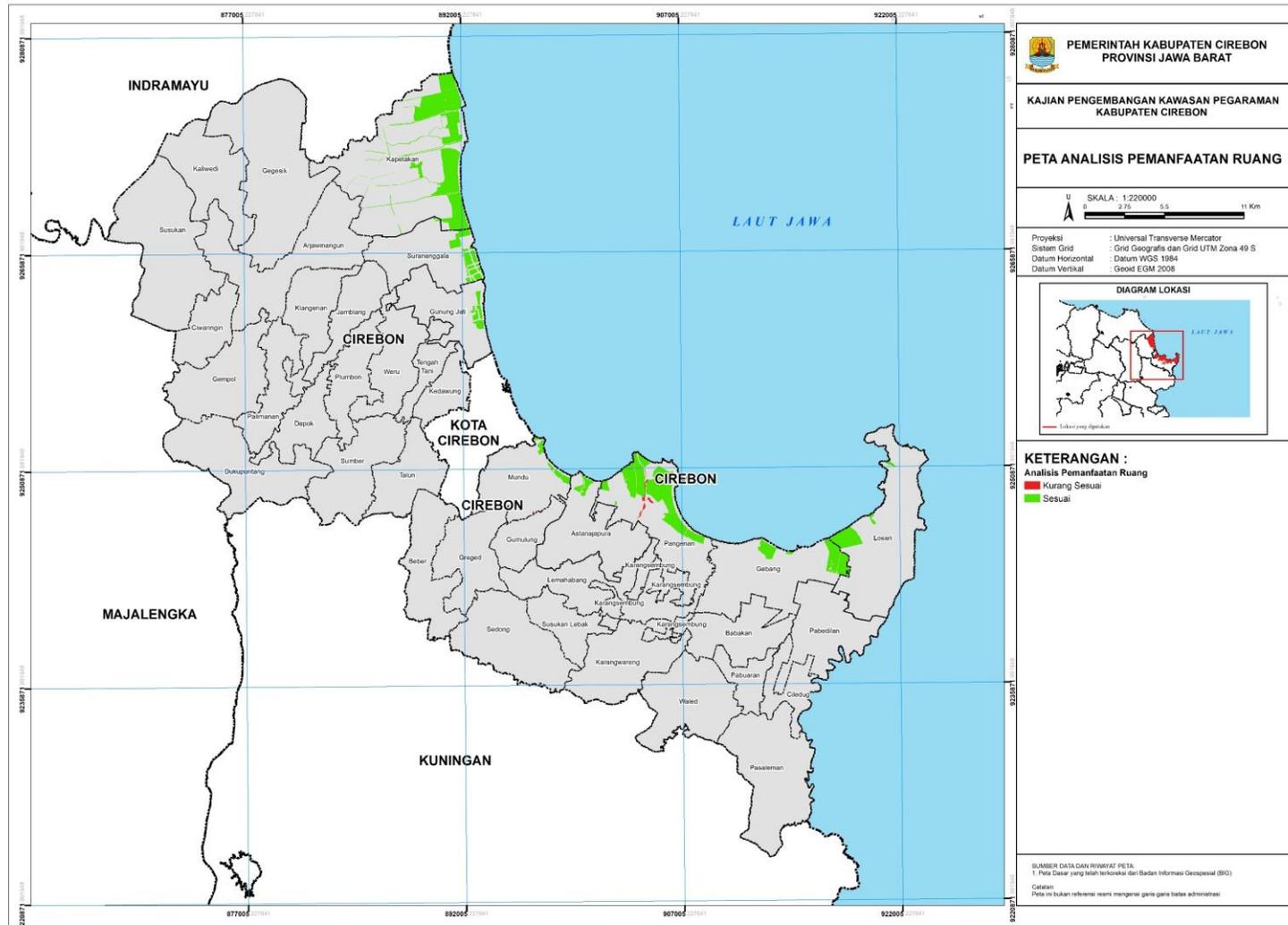
Gambar 5.1 Peta Penggunaan Lahan Eksisting

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 5.2 Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Cirebon

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 5.3 Peta Analisis Analisis Pemanfaatan Ruang Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon

5.2 Analisis Daya Dukung Lingkungan

Karakteristik fisik kawasan seperti kondisi curah hujan, iklim, kualitas air, tekstur tanah atau jenis tanah yang mendukung kawasan pegaraman dari aspek fisik dasar lingkungan, yaitu metode overlay yang didukung oleh *software* Arcgis dan juga didukung oleh data statistic berdasarkan hasil survey dari walidata terkait pegaraman di kabupaten Cirebon,

Berdasarkan klasifikasinya setiap data, terutama data iklim terutama pada bulan kering diberikan bobot nilai sesuai dengan tingkatan klasifikasinya. Luas dan produktivitas garam rakyat, nilai yang digunakan adalah sesuai dengan data. Angka-angka ini akan digunakan untuk keperluan analisis statistic deskriptif. Setelah itu di analisis dengan menggunakan metode overlay peta dan statistik, hasil dari analisis ini akan mengidentifikasi kesesuaian lokasi menentukan kriteria lokasi pegaraman berdasarkan daya dukung lingkungannya, agar terciptanya keseimbangan lingkungan dengan diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kawasan pegaraman di Kabupaten Cirebon

Daya dukung lingkungan merupakan luas lahan yang masih dapat didukung dalam kegiatan budidaya. Hasil dari analisis ini dapat memprediksi daya dukung suatu kawasan berdasarkan kondisi eksisting. Analisis ini merupakan nilai kualitas lingkungan yang ditimbulkan oleh interaksi dari semua unsur atau komponen fisika, kimia, dan biologi dalam satu kesatuan ekosistem. Hal ini berkaitan dengan kesesuaian lahan yang bersifat kualitatif dengan daya dukung lingkungan yang bersifat kuantitatif karena kesesuaian lahan juga dapat dipakai untuk mengevaluasi potensi kawasan untuk kawasan pegaraman. Analisis ini akan mengkuantifikasikan kelas kesesuaian lahan untuk pertambahan menjadi nilai daya dukung kawasan pegaraman.

Analisis daya dukung lingkungan dapat diolah dengan mengetahui curah hujan, tekstur tanah, jenis tanah, serta luas lahan. Luas lahan sebesar 29.687, 66 Ha terbagi menjadi tiga kelas yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kelas tinggi sebesar 22,49% dari luas lahan, kelas sedang 72,61% dari luas lahan, dan kelas rendah sebesar 4,91% dari luas lahan.

Tabel 5.3 Analisis Daya Dukung Lingkungan Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon

Curah Hujan	Tekstur Tanah	Jenis Tanah	Keterangan	Luas Ha	%
1500 - 2000mm	Tekstur Halus (Liat)	Aliviat Kelabu	Tinggi	750,44	2,53%
1500 - 2000mm	Tekstur Halus (Liat)	Alluvial Kelabu Tua	Tinggi	5.033,13	16,95%

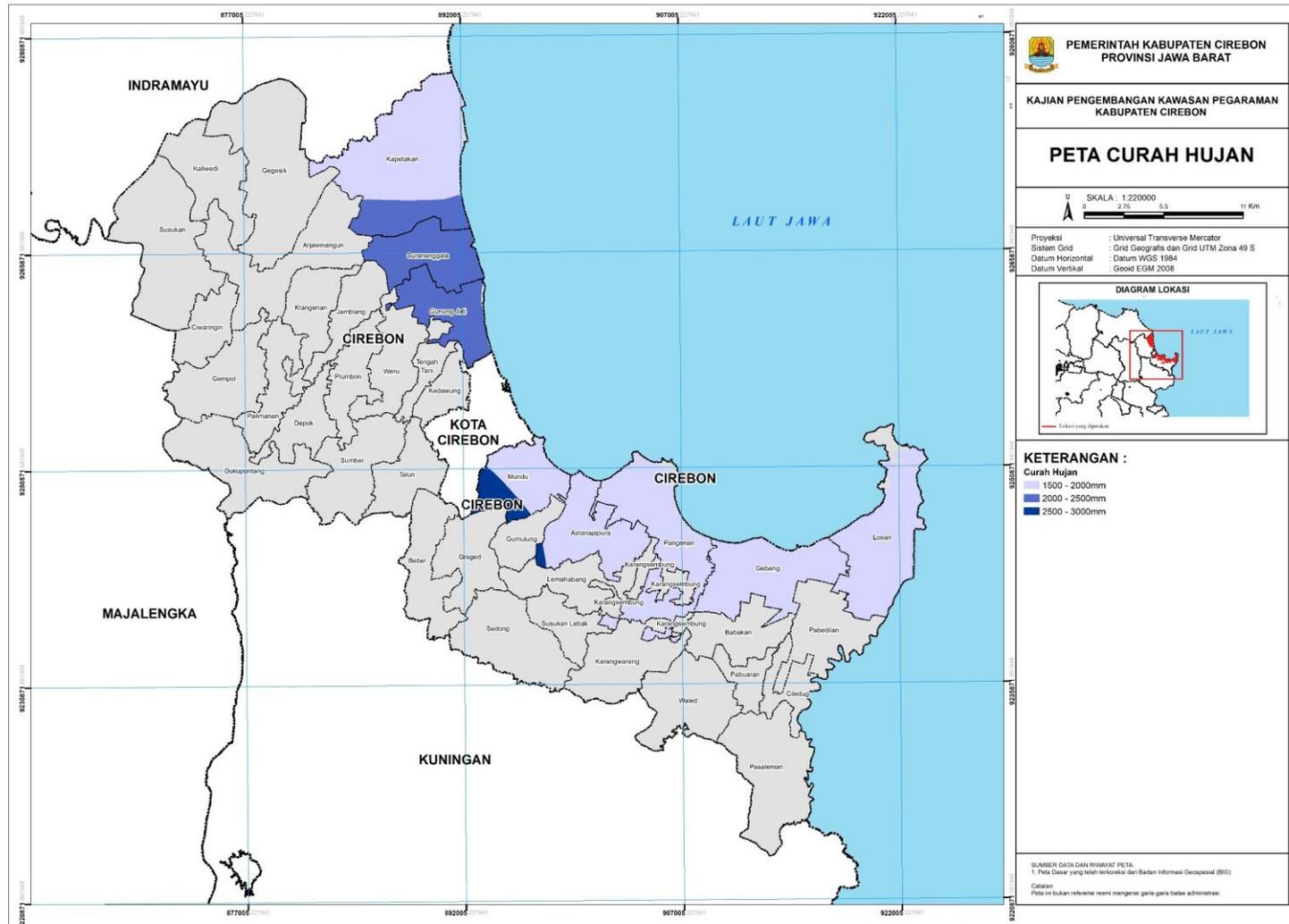
KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Curah Hujan	Tekstur Tanah	Jenis Tanah	Keterangan	Luas Ha	%
1500 - 2000mm	Tekstur Halus (Liat)	Asosiasi Aluvial Kelabu&Gleihumus Rendah	Tinggi	400,20	1,35%
1500 - 2000mm	Tekstur Halus (Liat)	Regosol Coklat Keabu-abuan	Tinggi	491,74	1,66%
1500 - 2000mm	Tekstur Sedang (Lempung)	Aliviat Kelabu	Sedang	3.794,32	12,78%
1500 - 2000mm	Tekstur Sedang (Lempung)	Alluvial Kelabu Tua	Sedang	5.303,71	17,87%
1500 - 2000mm	Tekstur Sedang (Lempung)	Asosiasi Aluvial Kelabu&Gleihumus Rendah	Sedang	5.498,92	18,52%
1500 - 2000mm	Tekstur Sedang (Lempung)	Asosiasi Mediteran Coklat dan Crumosol	Sedang	1.210,73	4,08%
2000 - 2500mm	Tekstur Halus (Liat)	Alluvial Kelabu Tua	Sedang	2.881,72	9,71%
2000 - 2500mm	Tekstur Halus (Liat)	Asosiasi Gleihumus Rendah & Aluvial Kelabu	Sedang	494,99	1,67%
2000 - 2500mm	Tekstur Halus (Liat)	Asosiasi Regosol Kelabu Regosol Coklat Keterabuan	Sedang	535,69	1,80%
2000 - 2500mm	Tekstur Halus (Liat)	Regosol Coklat Keabu-abuan	Sedang	1.835,30	6,18%
2000 - 2500mm	Tekstur Sedang (Lempung)	Alluvial Kelabu Tua	Rendah	167,46	0,56%
2000 - 2500mm	Tekstur Sedang (Lempung)	Asosiasi Regosol Kelabu Regosol Coklat Keterabuan	Rendah	163,85	0,55%
2000 - 2500mm	Tekstur Sedang (Lempung)	Regosol Coklat Keabu-abuan	Rendah	310,36	1,05%
2500 - 3000mm	Tekstur Sedang (Lempung)	Asosiasi Mediteran Coklat dan Crumosol	Rendah	815,10	2,75%
Total				29.687,66	100,00%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

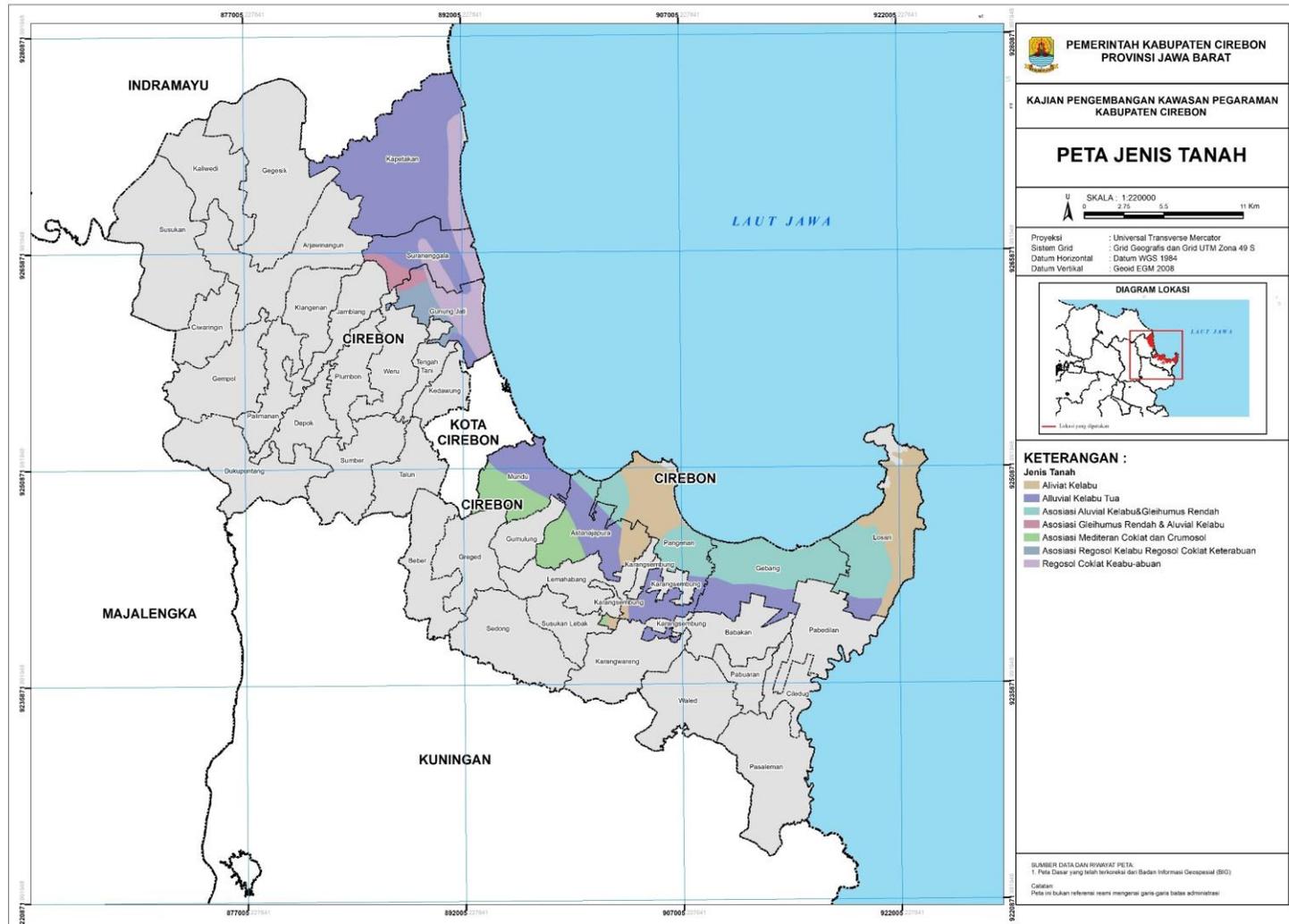
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa intensitas curah hujan dan tekstur tanah dapat mengetahui seberapa besar daya dukung lingkungan di kawasan pegaraman Kabupaten Cirebon. Untuk curah hujan 1500-2000mm dengan tekstur halus (Liat) masuk dalam klasifikasi daya dukung lingkungan tinggi, curah hujan 1500-2500mm dengan tekstur tanah sedang (Lempung) dan teksus halus (Liat) masuk dalam klasifikasi daya dukung lingkungan sedang, dan unruk curah hujan 2000-3000mm dengan tekstur tanah sedang (Lempung) masuk dalam klasifikasi daya dukung rendah. Dari total luas lahan sebesar 29.687,66 Ha, daya dukung lingkungan tinggi sebesar 22,49 % atau seluas 6.675,51 Ha, daya dukung lingkungan sedang sebesar 72,61% atau seluas 21.555,38 Ha, dan daya dukung lingkungan rendah sebesar 4,91% atau seluas 1.456,77 Ha.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



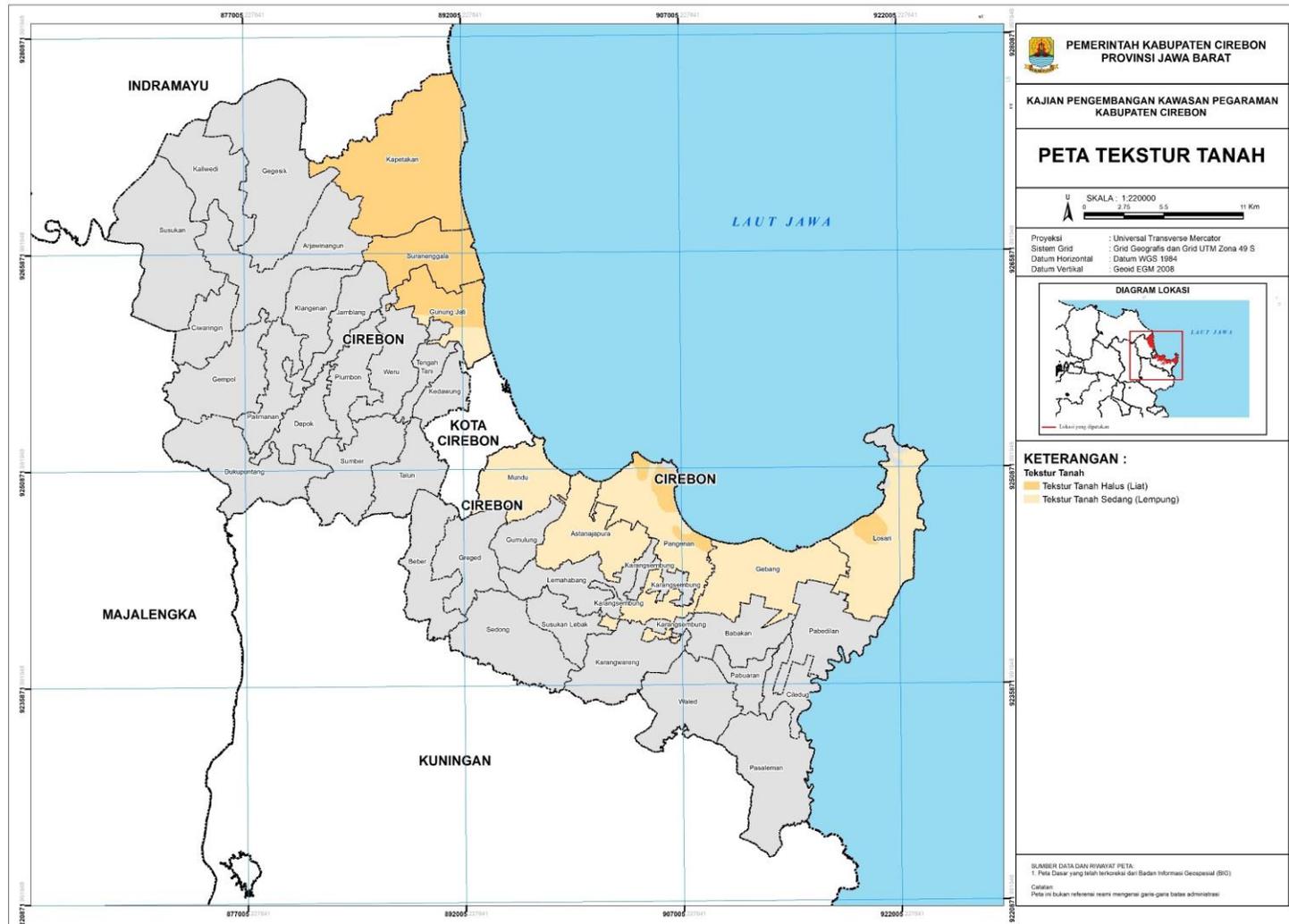
Gambar 5.4 Peta Curah Hujan

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



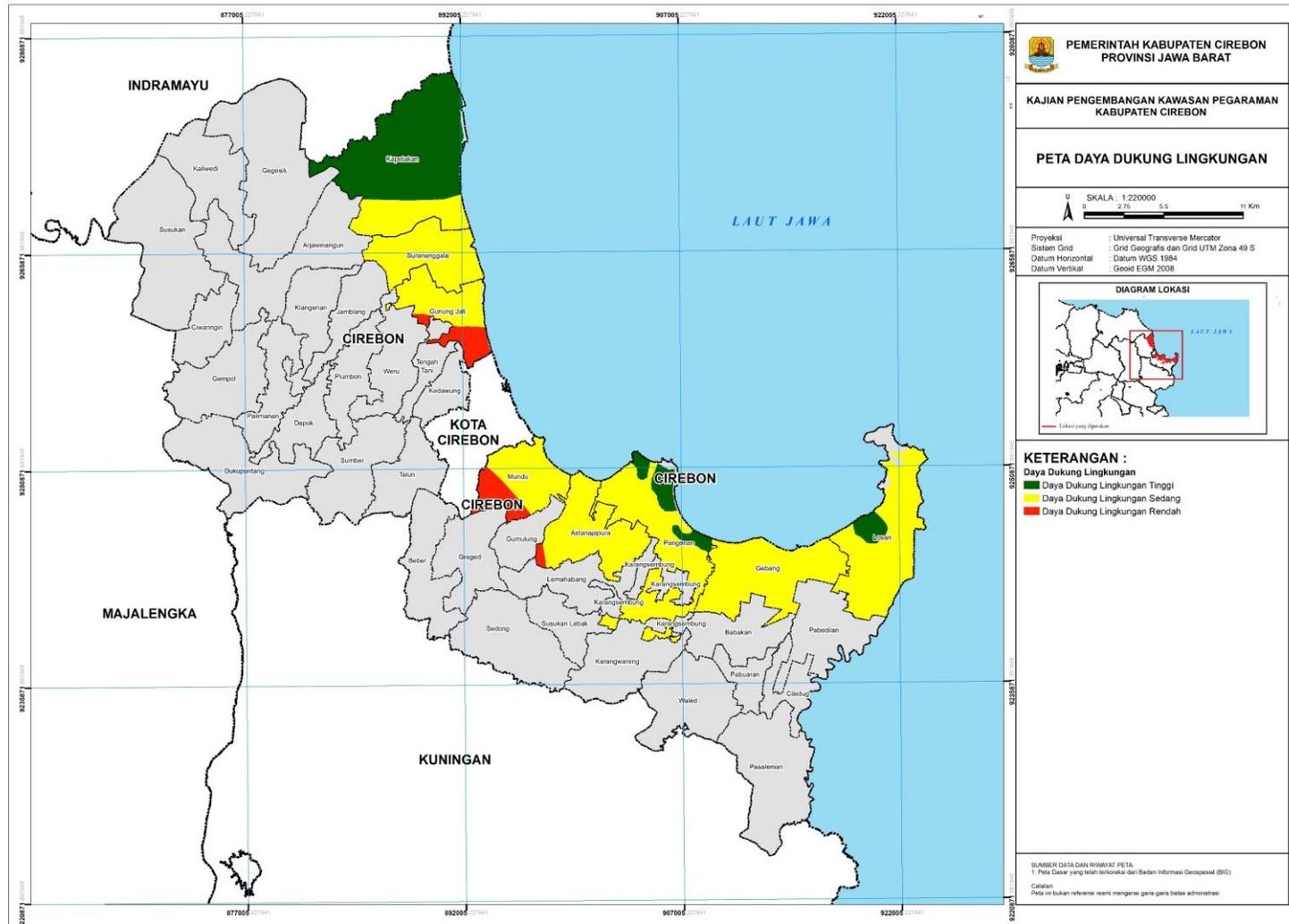
Gambar 5.5 Peta Jenis Tanah

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 5.6 Peta Tekstur Tanah

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 5.7 Peta Analisis Daya Dukung Lingkungan Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

5.3 Analisis Supply - Demand dan Nilai Tambah

Analisis pengembangan suatu produk atau barang dalam hal ini adalah sektor garam, hakekatnya menekankan pada analisis terhadap kondisi pemuasan (*satisfying*) antara penyediaan/ penawaran (*supply*) dengan kebutuhan/ permintaan (*demand*). *Supply* adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen dalam hal ini adalah produksi garam. *Demand* adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen.

Analisis supply dan demand ditujukan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan garam di Kabupaten Cirebon serta kebutuhan untuk pemenuhan di luar Kabupaten Cirebon. Data yang digunakan antara lain produktifitas garam di Kabupaten Cirebon yang kemudian akan dibandingkan dengan konsumsi garam berdasarkan kebutuhan perorang sesuai dengan standar konsumsi garamnya.

Adapun data yang digunakan pada analisis ini ialah berdasarkan data dari tiga provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Berikut merupakan hasil dari perhitungan pemenuhan kebutuhan garam pada ketiga provinsi.

Tabel 5.4 Kebutuhan Garam Nasional

Kebutuhan Garam Nasional	Kebutuhan 2022 (Ton/Tahun)	Produksi Garam (Ton/Tahun)		GAP	
		Tahun 2018	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2021
Garam Konsumsi	800.000	2.350.768	1.050.000	- 3.450.000	2.149.232
Garam Industri	3.700.000				
Total	4.500.000	2.350.768	1.050.000	- 3.450.000	2.149.232

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 5.5 Kebutuhan Garam Provinsi

Provinsi	Jumlah Penduduk 2020	Produksi Normal 2018	Produksi Garam 2020 (ton)	Kebutuhan Garam (Ton/Tahun)	GAP Kebutuhan & Produksi		Pemenuhan %
					Ton/Tahun	%	
Jawa Barat	48.274.162	479.085	41.489,21	75.766			
DKI Jakarta	10.562.088			16.577			
Banten	11.904.562			18.684			

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Provinsi	Jumlah Penduduk 2020	Produksi Normal 2018	Produksi Garam 2020 (ton)	Kebutuhan Garam (Ton/Tahun)	GAP Kebutuhan & Produksi		Pemenuhan
					Ton/Tahun	%	%
Total	70.740.812,00	479.085	41.489,21	111.028	- 69.538,50	-62,63%	37,37%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

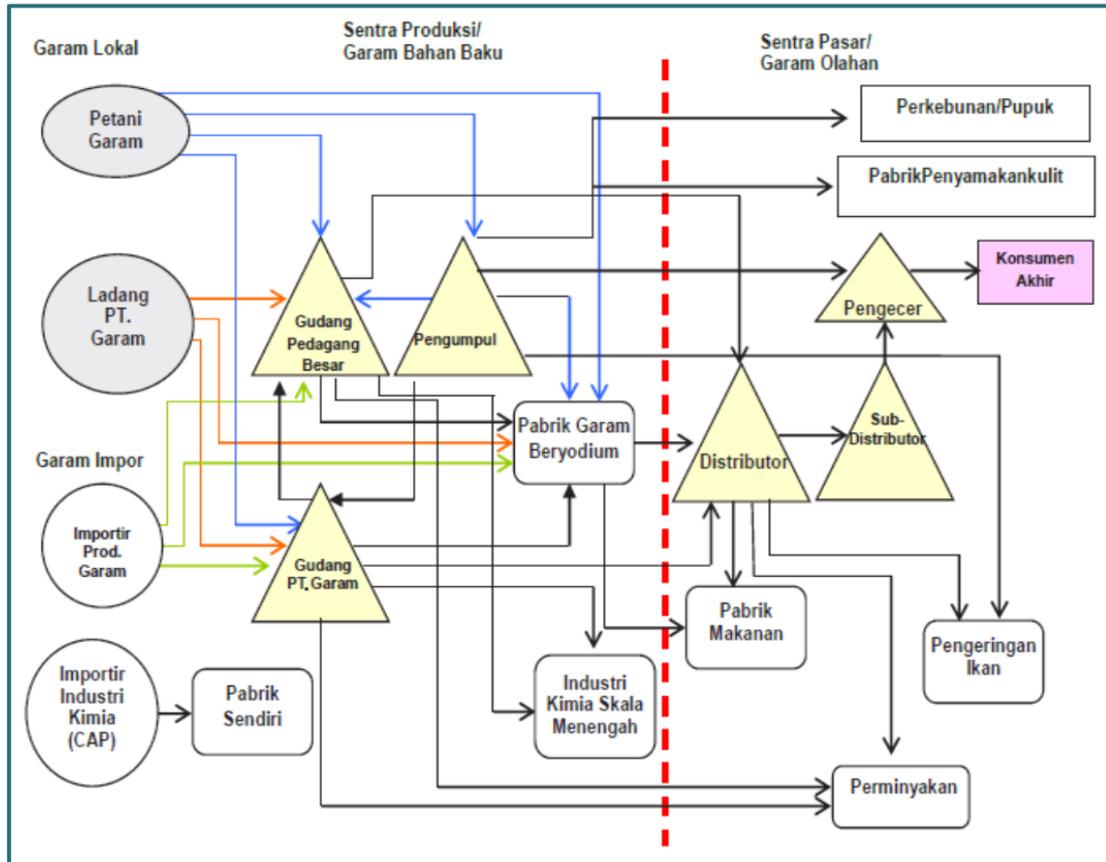
Tabel 5.6 Kebutuhan Garam Kabupaten Cirebon

Kebutuhan Garam Kab. Cirebon	Kebutuhan (Ton/Tahun)	Produksi (Ton/Tahun)		GAP Kebutuhan&Produksi	
		Tahun 2018	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2021
Industri Garam Konsumsi	88.920				
Industri Pakan Ternak	9.000	148.384	1.203	47.464	99.717
Industri Olahan Makanan (Ikan Asin&Telur)	3.000				
Total	100.920	148.384	1.203	47.464	99.717

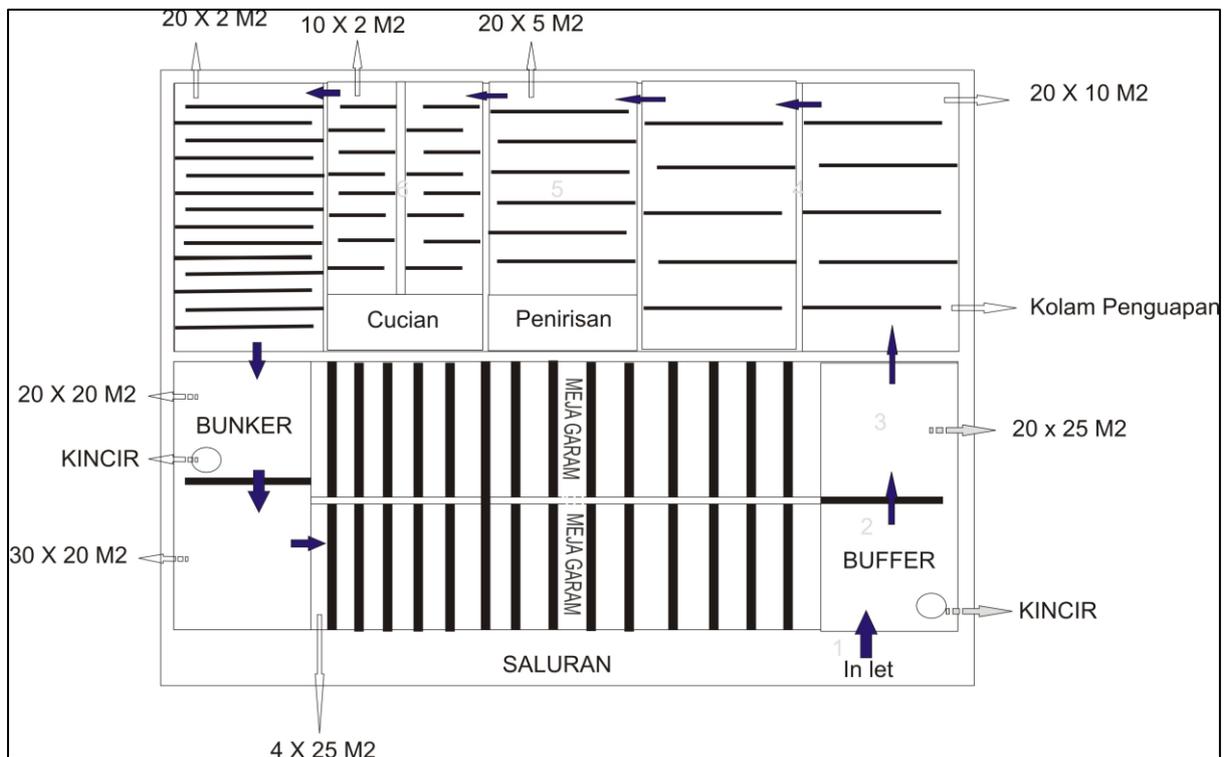
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Perhitungan pemenuhan kebutuhan garam dilakukan berdasarkan data yang ada pada ketiga provinsi antara lain Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Adapun kebutuhan garam ketiga provinsi dihitung berdasarkan perkiraan kebutuhan garam perseorangan yakni 30 gram/orang/minggu. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan garam bagi ketiga provinsi tersebut baru terpenuhi sebesar 37%, dengan kekurangan produksi garam Jawa Barat bagi ketiga provinsi ialah sebesar 63% atau senilai 70.657 ton. Dengan demikian, hal ini dapat dijadikan target baru bagi produksi garam Jawa Barat untuk meningkatkan persentase pemenuhan kebutuhan garam.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 5.8 Konsep Rantai Pasok Kawasan Pegaraman

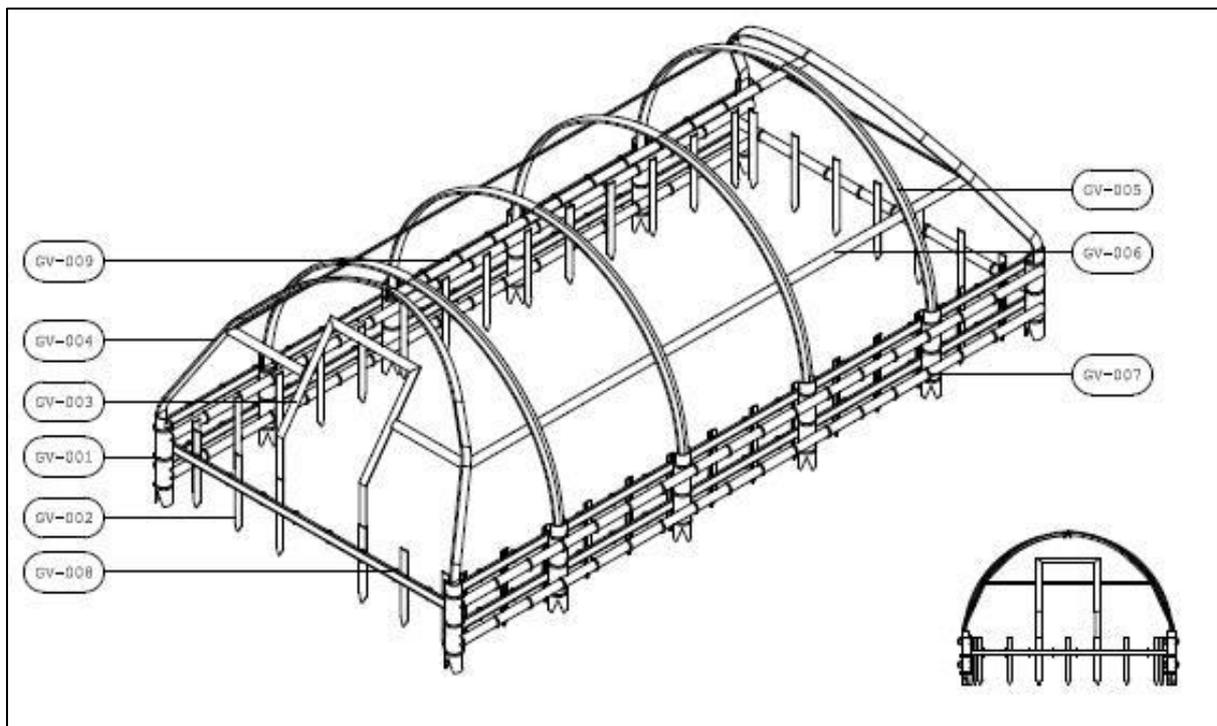


Gambar 5.9 Metode Tambak Garam Konvensional

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Keterangan :

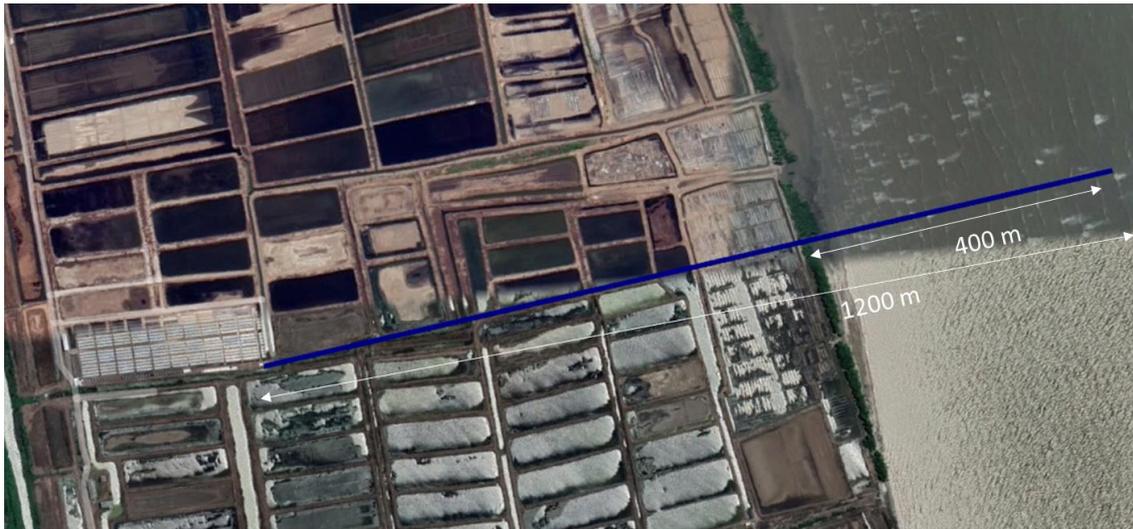
1. Saluran Primer (in let)
2. Tempat penampungan pertama (Buffer) ukuran 20 x 25 M²
3. Kolam penguapan ukuran 20 x 25 M²
4. Kolam penguapan dengan ulir pertama ukuran 20 x 10 M²
5. Kolam ulir kedua ukuran 20 x 5 M²
6. Kolam ulir ketiga ukuran 10 x 2 M²
7. Kolam ulir keempat ukuran 20 x 2 M²
8. Kolam penampungan air tua (Bunker) ukuran 20 x 20 M²
9. Kolam penggorengan ukuran 30 x 20 M²
10. Meja garam



Gambar 5.10 Metode Tambak Garam Rumah Tunnel

1. Proses produksi tidak terganggu jika ada hujan karena seluruh proses tertutup.
2. Pembentukan kristal garam lebih cepat.
3. Kualitas garam lebih putih karena tidak tercampur dengan tanah.
4. Peningkatan kadar NaCl.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 5.11 Skema Tambak Garam Rumah Tunnel Eksisting di Kabupaten Cirebon



Gambar 5.12 Skema Tambak Garam Rumah Tunnel Rencana di Kabupaten Cirebon

Tabel 5.7 Analisis Produktifitas

Metode Produksi	Produksi (Ton/Tahun)	Luas Lahan (Ha)	Produksi Ton/Hektar/Tahun	Lahan Produksi Eksisting (Ha)		Lahan Potensi+Eksisting (Ha)	
				Luas Lahan Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Per Tahun)	Luas Lahan Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Per Tahun)
Metode Tunnel	800	2,5	320	1.557,75	498.480,00	3.637	1.163.840
Metode Konvensional	1000	14	71	1.557,75	111.267,86	3.637	259.786

Sumber: Hasil Analisis, 2022

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Tabel 5.8 Analisis Produktifitas Kontribusi Terhadap Nasional

Metode Produksi	Lahan Potensi+Eksisting (Ha)		Kontribusi Terhadap Kabupaten		Kontribusi Terhadap Wilayah Jabar, DKI, Banten		Kontribusi Terhadap Nasional	
	Luas Lahan Produksi (Ha)	Produksi (Ton/Per Tahun)						
Metode Tunnel	3.637	1.163.840	100.920	1.062.920	111.028	1.052.812	4.500.000	3.336.160
Metode Konvensional	3.637	259.786						
Keterangan			Surplus/Terpenuhi	Surplus/Terpenuhi	25,86%			

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 5.9 Analisis Produktifitas Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Lahan Produksi Eksisting (Ha)	Luas Lahan Produksi Potensi +Eksisting (Ha)	Metode Konvensional		Metode Tunnel	
				Lahan Eksisting	Lahan Potensi+Eksisting	Lahan Eksisting	Lahan Potensi +Eksisting
				1	Kecamatan Pangenan	288	923,03
2	Kecamatan Astanajapura	120	101,77	8.571	7.269	38.400	32.566
3	Kecamatan Gebang	41,3	367,01	2.950	26.215	13.216	117.443
4	Kecamatan Gunungjati	62	97,36	4.429	6.954	19.840	31.155
5	Kecamatan Kapetakan	800	1586,77	57.143	113.341	256.000	507.766
6	Kecamatan Losari	109,6	231,22	7.829	16.516	35.072	73.990
7	Kecamatan Mundu	136	89,6	9.714	6.400	43.520	28.672
8	Kecamatan Suranenggala	0,8	239,85	57	17.132	256	76.752
Total		1.558	3636,61	111.264	259.758	498.464	1.163.715

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 5.10 Analisis Nilai Tambah Pegaraman Kabupaten Cirebon

Metode Produksi	Produksi Normal 2018 ((Ton/ Per Tahun)	Produksi (Ton/ Per Tahun)	Nilai Tambah Ekonomi Garam					
			Harga Rp 700		Harga Rp 1500		Harga Rp 4000	
			Produksi Normal	Produksi Optimal	Produksi Normal	Produksi Optimal	Produksi Normal	Produksi Optimal
Metode Tunnel	148.384	1.163.840	814.688.000	222.576.000	1.745.760.000	593.536.000	4.655.360.000	
Metode Konvensional		259.786	181.850.000		389.678.571		1.039.142.857	
Metode Tunnel	Peningkatan	1.015.456	710.819.200	1.523.184.000	4.061.824.000			
	Persentase Peningkatan	684%	684%	684%	684%			

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Metode Produksi	Produksi Normal 2018 ((Ton/ Per Tahun)	Produksi (Ton/ Per Tahun)	Nilai Tambah Ekonomi Garam					
			Harga Rp 700		Harga Rp 1500		Harga Rp 4000	
			Produksi Normal	Produksi Optimal	Produksi Normal	Produksi Optimal	Produksi Normal	Produksi Optimal
	Kali Lipat	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Metode Konvensional	Peningkatan	111.402	77.981.200	167.102.571	445.606.857			
	Persentase Peningkatan	175%	175%	175%	175%			
	Kali Lipat	1,8	1,8	1,8	1,8			

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 5.11 Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pegaraman Kabupaten Cirebon

Metode Produksi	Luas Lahan Produksi Eksisting (Ha)	Luas Lahan Produksi Eksisting + Potensi (Ha)
Metode Tunnel	1.558	3.637
Metode Konvensional		
Jumlah Petambak	2.887	3.637
Persentase Peningkatan		126%
Kali Lipat		1,3

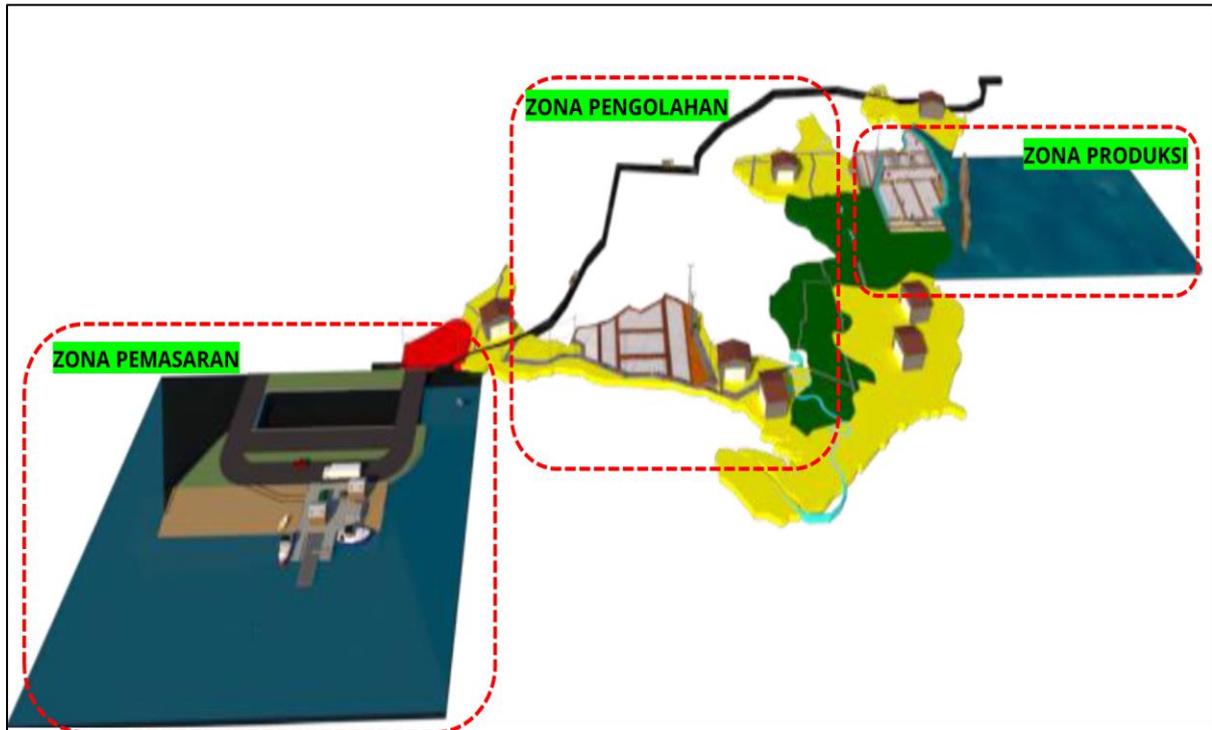
Sumber: Hasil Analisis, 2022

5.4 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Sentra Garam

Infrastruktur pegaraman merupakan penunjang dari kegiatan budidaya tambak garam yang dibutuhkan untuk adanya peningkatan nilai tambah. Pada analisis ini kebutuhan infrastruktur pegaraman disesuaikan berdasarkan penzanaan (program ruang), maka digunakan metode analisis berupa analisis komparasi.

Analisis komparasi yaitu membandingkan antara kondisi eksisting dengan standar, tujuan menggunakan metode analisis ini dalam kajian pengembangan kawasan pegaraman yaitu untuk mengidentifikasi dan membandingkan infrastruktur yang ada saat ini (eksisting) dengan infrastruktur sesuai dengan standar yang nantinya akan menghasilkan kebutuhan infrastruktur berdasarkan Zona Kawasan Pegaraman.

Dalam melakukan analisa identifikasi kondisi eksisting infrastruktur digunakan dilakukan *Theoritical Descriptive*. Dimana dalam analisisnya dilakukan pendiskusan antara kebutuhan infrastruktur yang diperoleh dari kajian pustaka dengan berbagai peraturan perundangan bahkan dari kajian terdahulu yang berhubungan dengan kebutuhan infrastruktur pegaraman, sehingga dapat diketahui kondisi eksisting infrastruktur tambak di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya setelah teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur kemudian merumuskan arahan pengembangan infrastruktur berdasarkan peran dan fungsinya melalui data-data primer dan sekunder yang telah diperoleh



Gambar 5.13 Program Ruang Kebutuhan Infrastruktur Kabupaten Cirebon

Program Ruang | ZONA PRODUKSI

1. Menyediakan sarana mesin pompa air dan kincir angin pada lokasi yang memiliki topografi daratan yang lebih tinggi dari pada laut.
2. Menyediakan geisolator.
3. Menyediakan sarana rabunan, prasarana cadangan pelapis tanggul, batu bator, gedeg bambu
4. Melakukan pemeliharaan tiap tahun secara berkala terhadap mesin pompa air, kincir angin, baumemeter, senggut, pengais, panyacca, keranjang, gerobak sorong, gilis, pelapis tanggul
5. Peningkatan kinerja prasarana drainase dengan cara pembuatan drainase terbuka.
6. Merevitalisasi prasarana pintu saluran air, tanggul, saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier

Program Ruang | ZONA PENGOLAHAN

1. Menyediakan prasarana jaringan air bersih di wilayah pesisir
2. Menyediakan jaringan air bersih pada zona produksi dan zona pengolahan kawasan pegaraman.
3. Menyediakan jaringan listrik pada zona pengolahan kawasan pegaraman dan meningkatkan kinerja jaringan listrik di wilayah pesisir
4. Menyediakan gudang yang cukup besar agar dapat menampung hasil panen garam secara maksimal

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

5. Menggunakan material gudang yang sesuai dengan standar gudang garam PT. Garam.

Program Ruang | ZONA PEMASARAN

1. Meningkatkan aksesibilitas yang baik seperti penyediaan jaringan jalan dari zona produksi - zona pengolahan - zona pemasaran
2. Menyediakan Moda transportasi pengangkutan

Infrastruktur kawasan pegaraman yang ideal merupakan perpaduan antara sarana produksi, prasarana produksi, prasarana pengolahan, dan prasarana pemasaran. Untuk kebutuhan infrastruktur tambak garam berdasarkan zona kawasan pegaraman yaitu:

1. Mesin pompa air
 - a. Mesin pompa air sangat dibutuhkan dalam proses produksi garam, jika tidak ada mesin pompa air, proses produksi garam masih bisa tetap berjalan akan tetapi masih membutuhkan sedikit waktu yang lebih lama dikarenakan proses produksi garam memerlukan air laut yang pasang supaya bisa masuk ke lahan tambak garam.
 - b. Perlu adanya pengawasan dan perbaikan terhadap mesin pompa air.
 - c. Menggunakan mesin pompa yang memiliki kualitas bagus supaya tidak cepat rusak dan tahan lama, jadi tidak perlu adanya pergantian mesin pompa air setiap tahunnya.



Gambar 5.14 Mesin Pompa Air

2. Kincir angin

Pemanfaatan kincir angin yang optimal sangat diperlukan, karena kincir angin memiliki fungsi yang sama dengan mesin pompa air, yaitu menyalurkan air ke saluran sekunder. Dengan kata lain jika tidak ada mesin pompa air masih bisa digantikan dengan kincir angin, jika tidak ada keduanya maka akan memperlambat dalam proses produksi garam.



Gambar 5.15 Kincir Angin

3. Baumemeter

Baumemeter diperlukan untuk mempermudah petambak garam mengukur tingkat Be (*derajat Baume*) air pada tambak garam.



Gambar 5.16 Baumemeter

4. Pemasat

Pemasat diperlukan untuk mempermudah petambak garam dalam hal meratakan tanah yang akan digunakan sebagai lahan tambak garam atau meja kristal.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 5.17 Pematat

5. Pengais atau Pakem

Pengais diperlukan untuk mempermudah petambak garam dalam hal mengais hasil produksi garam yang berada pada lahan tambak garam



Gambar 5.18 Pengais atau Pakem

6. Panyacca

Panyacca diperlukan untuk mempermudah tambak garam dalam hal memilah bakal garam agar tidak tertumpuk.



Gambar 5.19 Panyacca

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

7. Keranjang atau Pikulan

Keranjang atau pikulan diperlukan untuk mempermudah petambak garam membawa atau mengangkut hasil panen garam ke gudang.



Gambar 5.20 Keranjang Atau Pikulan

8. Gerobak sorong

Gerobak sorong memiliki fungsi yang sama dengan keranjang atau pikulan, yaitu membawa atau mengangkut hasil panen garam ke gudang



Gambar 5.21 Gerobak Sorong

9. Geisolator

- a. Geisolator sangat dibutuhkan untuk melapisi lahan tambak yang tidak merata sempurna atau terdapat kebocoran pada lahan.
- b. Menggunakan geisolator memberikan cukup keuntungan bagi para petambak garam, yaitu dari hasil garamnya yang putih dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan geisolator.



Gambar 5.22 Geoisolator

10. Rabunan

- a. Rabunan biasanya digunakan sebagai alat untuk menyaring air hasil produksi garam.
- b. Untuk di wilayah penelitian, petambak garam rakyat tidak ada yang menggunakan rabunan tersebut, biasanya yang menggunakan hanya petambak garam dari PT. Garam saja.



Gambar 5.23 Rabunan

11. Drainase

Drainase dibutuhkan untuk mencegah terjadinya luapan air yang mengakibatkan banjir maupun air yang berlebih dari proses garam supaya tidak terjadi genangan air pada lahan tambak garam

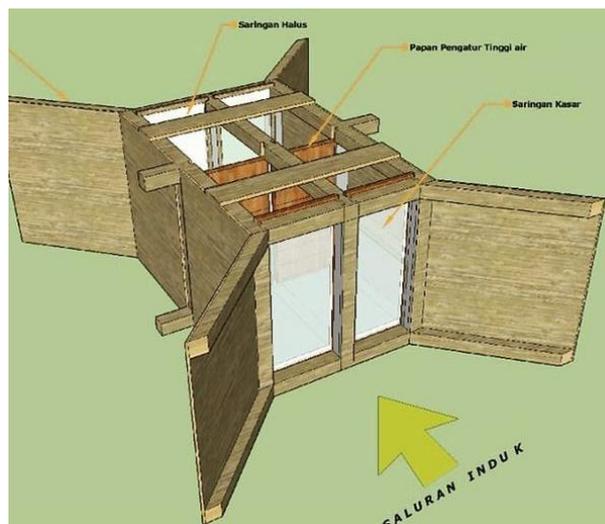
KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 5.24 Drainase

12. Pintu saluran air

Pintu saluran air sangat dibutuhkan oleh petambak garam sebagai tutup sirkulasi air laut dalam proses produksi garam. Jika tidak ada pintu saluran air laut maka air laut akan terus mengalir masuk ke dalam lahan tambak garam dan menyebabkan gagal panen



Gambar 5.25 Pintu Saluran Air

13. Tanggul

- Tanggul sangat dibutuhkan oleh petambak garam untuk membatasi dan mencegah air laut masuk ke lahan tambak garam.
- Adakalanya air laut dapat merusak dan melebihi batas tanggul yang telah dibangun, maka tanggul juga perlu diperhatikan ketinggian dan apakah ada retakan atau tidak pada tanggul supaya air laut tidak dapat masuk ke dalam lahan tambak garam dan menyebabkan gagal panen.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 5.26 Tanggul

14. Gedeg bambu

Gedeg bambu biasanya digunakan untuk menahan supaya tidak terjadi longsor pada lahan tambak garam.



Gambar 5.27 Gedeg Bambu

15. Saluran primer

Saluran primer sangat dibutuhkan oleh petambak garam karena, saluran primer merupakan saluran utama (suplai air tambak) yang langsung mengalir dari laut/muara

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 5.28 Saluran Primer

16. Saluran sekunder

Saluran sekunder sangat dibutuhkan oleh petambak garam, karena saluran sekunder atau sering disebut dengan peminihan merupakan tempat penampungan air bahan baku atau air tua.



Gambar 5.29 Saluran Sekunder

17. Saluran tersier

Saluran tersier sangat dibutuhkan oleh petambak garam, karena setelah air bahan baku ditampung di peminihan maka air akan dialirkan ke meja kristal melalui jaringan tersier tersebut.



Gambar 5.30 Saluran Tersier

18. Jaringan air bersih

Jaringan air bersih sangat dibutuhkan oleh petambak garam karena selain untuk mencuci hasil penen garam, jaringan air bersih juga digunakan sebagai air minum petambak garam atau kebutuhan sehari-hari petambak garam dan masyarakat pesisir di wilayah penelitian.

19. Jaringan listrik

Kebutuhan energi listrik pada pesisir sudah terpenuhi, Pengembangan yang dapat dilakukan, yaitu dapat mengikuti perkembangan jenis kegiatan yang dibutuhkan seperti pada kawasan pegaraman

20. Pengolahan limbah

a. Pengolahan limbah merupakan prasarana yang tidak dibutuhkan dalam zona pengolahan kawasan pegaraman.

b. Dimana dalam pengolahannya garam tidak menghasilkan limbah sama sekali, karena air sisa dari produksi garam tersebut akan terus mengalir dalam lahan tambak garam tersebut.

c. Pengolahan limbah biasanya sering digunakan pada pabrik garam.

21. Gudang

Gudang sangat diperlukan oleh petambak garam, karena gudang di kawasan pegaraman digunakan untuk menyimpan hasil produksi garam.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 5.31 Gudang

22. Moda transportasi

- a. Moda transportasi darat yang paling dominan adalah sepeda motor yang lebih sering digunakan untuk mobilitas internal wilayah.
- b. Moda transportasi berupa truck dan sepeda digunakan masyarakat sebagai moda sarana pengangkut hasil produksi garam pada kawasan pegaraman.



Gambar 5.32 Moda Transportasi

23. Jaringan jalan

Akses dari zona pengolahan ke zona produksi garam masih belum di aspal (makadam) di kawasan pegaraman.



Gambar 5.33 Jaringan Jalan

5.5 Analisis Potensi dan Permasalahan

Analisis SWOT dapat dipergunakan dalam rangka merumuskan keunggulan strategik guna mengidentifikasi dengan jelas kekuatan dan kelemahan suatu institusi atau kelembagaan pada saat ini. Strategik didesain sebagai bagian dari usaha memperbaiki kelemahan institusi untuk mengubahnya menjadi kekuatan dan bahkan menjadi kompetensi yang unik (Hubeis dan Najib, 2008). Menurut David (2004), setiap institusi bersifat unik dalam arti memiliki karakteristiknya sendiri yang khas dan berbeda dengan institusi lain.

Kekuatan eksternal secara langsung berpengaruh kepada suatu institusi untuk itu evaluasi peluang dan ancaman eksternal sangat diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan mengembangkan kebijakan (Hubeis dan Najib, 2008).

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Tabel 5.12 Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">ANALISIS SWOT KAJIAN PEGARAMAN KAB.CIREBON</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTH (S) Kekuatan Internal</p>	<p style="text-align: center;">WEAKNESSES (W) Kelemahan Internal</p>
	<p style="text-align: center;">OPORTUNITIES (O) peluang Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> Target produksi garam nasional pada 2024 harus mencapai 3,4 juta ton Perpres 126 tentang Percepatan Pegaraman Nasional Sentra produksi garam direncanakan di wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara (termasuk Kab.Cirebon) Kebutuhan Garam nasional tidak hanya untuk garam konsumsi tetapi untuk industri dll Meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan nilai tambah Program pemerintah pusat yaitu Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) dengan konsep kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat luas tambak garam (1.557,75 Ha Sumber: DKPP Kab.Cirebon) Jumlah petambaka garam Kab.Cirebon yaitu 1.216 Jiwa Sumber: DKPP Kab.Cirebon Terdapat 17 (tujuh belas) IKM khusus untuk produk hasil garam konsumsi Kesesuaian arahan Rencana Tata Ruang untuk kawasan pegaraman dengan kondisi eksisting 99,15% yang artinya sudah sesuai peruntukannya Daya dukung lingkungan dari segi fisik kawasan untuk kawasan pegaraman dominasi tinggi 22,49% dan sedang 72,61%
<p style="text-align: center;">TREATHS (T) Ancaman Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> Perubahan Iklim Curah Hujan yang tinggi Risiko Banjir 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun tanggul untuk membatasi dan mencegah air laut masuk ke lahan tambak garam 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan pada zona produksi - zona pengolahan - zona pemasaran Menyediakan sarana dan prsarana kawasan pegaram yaitu Mesin pompa air, Kincir angin, Baumemeter, Pemadat, Senggut, Pengais atau Pakem, Panyacca, Keranjang atau Pikulan, Gerobak sorong, Geoisolator, Gilis, Rabunan, Drainase, Pintu saluran air, Tanggul, Pelapis tanggul, Batu bator, Gedeg bamboo, Saluran primer, Saluran sekunder, Saluran tersier, Jaringan air bersih, Jaringan listrik, Pengolahan limbah, Gudang, Moda transportasi, Telekomunikasi, Jaringan jalan Membangun kemitraan usaha Menggunakan system tunnel dan geomembrane disesuaikan dengan karakteristik lokasi

Sumer: Hasil Analisis Tahun 2022

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

5.6 Analisis Lokasi Prioritas untuk Pengembangan SEGAR

Analisis lokasi prioritas pengembangan SEGAR dilakukan pada seluruh kawasan pesisir di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari delapan kecamatan. Analisis ini dilakukan berdasarkan potensi dan kesiapan lahan, serta kesesuaian pemanfaatan ruang, yang kemudian lokasi prioritas tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil analisisnya. Adapun Lokasi prioritas pengembangan SEGAR di Kabupaten Cirebon adalah Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan. Berikut merupakan tabel lahan produksi garam eksisting serta potensi lahan produksi dari kedelapan kecamatan di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon.

Tabel 5.13 Potensi Lahan Produksi Garam Kabupaten Cirebon

No	Kecamatan	Desa	Luas Lahan Produksi (ha)	Potensi Lahan Produksi (ha)
1	Kapetakan	Bungko	288	400
		Bungko Lor		
2	Suranenggala	Sura Lor	120	250
		Muara		
3	Mundu	Citemu	41,3	62
		Waruduwur		
4	Astanajapura	Kanci	62	60
		Kanci Kulon		
5	Pangenan	Ender	800	1628
		Pangenan		
		Bendungan		
		Rawaurip		
		Pengarengan		
		Astanamukti		
6	Losari	Ambulu	109,6	250
		Kalisari		
		Tawang Sari		
		Kalirahayu		
7	Gebang	Gebang Mekar	136	420
		Melakasari		
		Playangan		
		Gebang Ilir		
		Gebang Kulon		
		Kalipasung		
8	Gunungjati	Jatimerta	0,8	50
Total			1.558	3.120

Sumer: Hasil Analisis Tahun 2022

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa terdapat potensi lahan produksi garam di Kecamatan Kapetakan yang terdiri dari Desa Bungko dan Desa Bungko Lor, yakni sebesar 400 hektar. Selain berdasarkan potensi lahan produksi, penentuan lokasi prioritas pengembangan SEGAR juga ditentukan berdasarkan kesesuaian pemanfaatan ruang. Telah diketahui berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang, penggunaan lahan di Kabupaten Cirebon sebagian besar sudah sesuai dengan rencana pola ruang budidaya garam dengan persentase sebesar 99,78%. Kemudian pada Kecamatan Kapetakan, seluruh wilayah pegaraman sudah sesuai dengan rencana pola ruang budidaya garam, termasuk Desa Bungko Lor. Dengan demikian, Desa Bungko Lor dapat dijadikan lokasi prioritas pengembangan SEGAR karena telah sesuai dengan tata ruang berdasarkan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang, serta didukung oleh adanya potensi lahan yang dimiliki oleh desa tersebut.



Gambar 5.34 Peta Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 5.35 Peta Akses Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Pegaraman Kabupaten Cirebon



Gambar 5.36 Lahan Pegaraman Desa Bungko Lor A



Gambar 5.37 Lahan Pegaraman Desa Bungko Lor B

5.7 Arahan Pengembangan Konsep SEGAR

5.7.1 Intervensi KKP melalui PUGaR

Indonesia merupakan kepulauan dengan total garis pantai mencapai 95 ribu km. Wilayah perairan lautnya yang lebih luas dibanding wilayah daratannya menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Salah satu potensi sektor kelautan dan perikanan yang perlu digali dan dikembangkan adalah garam. Garam merupakan komoditas penting karena merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dikonsumsi. Tetapi di sisi lain, produksi garam dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Hal ini mengakibatkan Indonesia masih melakukan impor garam. Pada dasarnya, dengan potensi kelautan yang besar, Indonesia seharusnya mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan garam sendiri. Oleh karena itu, upaya pengembangan usaha garam melalui penguatan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan.

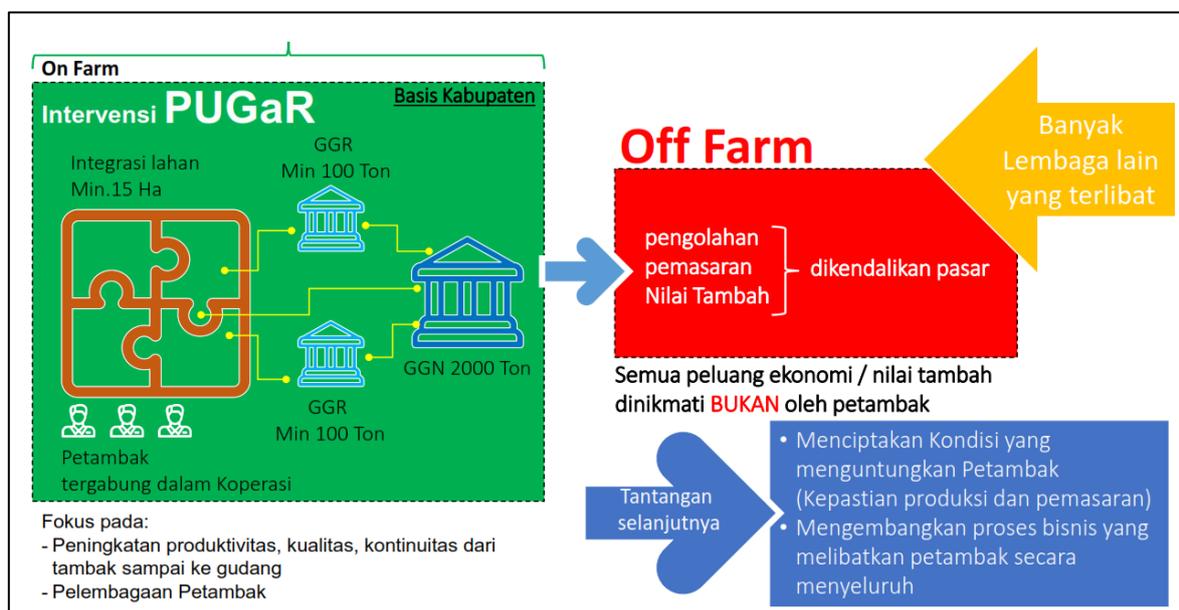
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas garam di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor cuaca dan iklim, kualitas garam rakyat yang kurang bersaing, teknologi yang belum berkembang, sarana dan prasarana produksi garam rakyat yang kurang memadai, serta kemampuan pemasaran garam rakyat yang umumnya masih skala lokal. Hal ini menyebabkan garam lokal cenderung kalah bersaing dengan garam impor. Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu usaha strategis dan sistematis yang dapat membantu petambak garam untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus jangkauan pasar. Program pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk membantu dalam

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

penyelesaian permasalahan yang dihadapi petambak garam. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengembangkan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) sejak tahun 2011.

PUGaR dibentuk sebagai program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam Nasional.

- Kegiatan peningkatan produktivitas lahan garam, kualitas dan kontinuitas pasokan garam berbasis kelembagaan usaha garam rakyat
- Pendekatan PUGaR
 1. Penguatan SDM dan Kelembagaan
 2. Peningkatan sarana/prasarana usaha pegaraman

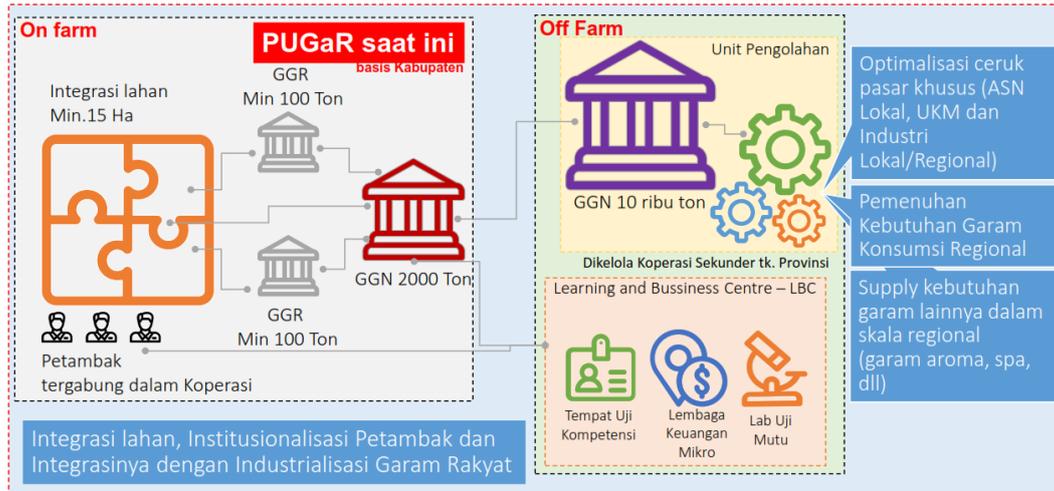


Gambar 5.38 Program PUGaR dan Isu Off Farm

5.7.2 Sentra Ekonomi Garam (SEGAR)

Sentra Ekonomi Garam (SEGAR) merupakan Implementasi teknis Perpres No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Salah satu pilar kebijakan kelautan Indonesia adalah ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, yang dilakukan melalui "pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu, dengan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis"

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON



Gambar 5.39 Ilustrasi Konsep SEGAR (1)



Gambar 5.40 Ilustrasi Konsep SEGAR (1)

Dukungan Jangka Panjang KKP mewujudkan SEGAR dalam rangka meningkatkan nilai tambah

1. Mengusulkan RanPerpres Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional sebagai Payung Hukum
2. Menyusun RaPermen KP Sentra Ekonomi Garam Nasional
3. Dukungan Pendanaan Reguler untuk Provinsi dan Kabupaten (antara lain: Penyusunan Master Plan Sentra Ekonomi Pembangunan fisik Fasilitas dan Kelembagaan)

Peranan SEGAR Melalui payung hukum Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (1)

1. Media Integrasi-sinkronisasi inter K/L
2. Media Pengelolaan garam indikasi geografis, peternakan, perkebunan, jasa spa, dan garam lainnya sebagai garam konsumsi non iodium
3. Media Pengelolaan pasokan bahan baku (Konsumsi dan Industri)
4. Media Pengembangan industry garam, khususnya Pemberdayaan IKM garam

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

5. Media pengembangan investasi industri pengolah dan pengguna Garam

Pondasi yang dikembangkan KKP menuju SEGAR

1. Penguatan Unit Bisnis Koperasi

Mengoptimalkan fungsi GGN-GGR yang dikelola Koperasi sebagai 'Pusat Transaksi Garam', termasuk implementasi Skema SRG dalam skala luas

2. Pengembangan Jaringan Koperasi Primer melalui Pembentukan Koperasi Sekunder Intermediasi Pasar, Modal dan Teknologi

3. Sertifikasi Kompetensi dan Standarisasi usaha

Penyiapan Koperasi sebagai pelaku utama Sentra Ekonomi Garam

4. Pengembangan Konsep Korporasi Koperasi

Pilot Project Koperasi Ronggolawe Makmur dengan dukungan Kemenkop dan UKM dan Agriterra Indonesia

5. Intermediasi Koperasi dengan Industri Pengguna dan Swasta

Implementasi konsep Business to business yang setara, termasuk implementasi skema Joint Venture dengan investor

Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan Usaha Pergaraman dengan kriteria:

1. tersedia lahan untuk produksi Garam;

2. tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman;

3. terdapat pangsa pasar Garam; dan

4. terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan.

Percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada SEGAR sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui sistem bisnis Pergaraman yang meliputi tahapan:

1. praproduksi;

2. produksi;

3. pascaproduksi;

4. pengolahan; dan

5. pemasaran.

Pelaksanaan sistem bisnis Pergaraman dilakukan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional

Rencana induk pergaraman daerah paling sedikit memuat:

1. kondisi umum lokasi Pergaraman;

2. kondisi eksisting prasarana dan sarana Pergaraman;

3. kebutuhan dan pasokan;

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

4. kondisi pasar Garam;
5. arah kebijakan dan strategri dan
6. rencana aksi pembangunan Pergaraman daerah.

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional diukur berdasarkan besaran target indikator kinerja yang terdiri atas:

1. produksi Garam pada SEGAR;
2. kualitas Garam pada SEGAR; dan
3. penyerapan hasil produksi Garam pada SEGAR

5.8 Kesimpulan dan Rekomendasi

5.8.1 Kesimpulan

Perencanaan pembangunan nasional telah dituangkan dalam Perpres 18/2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 disebutkan rencana pembangunan terkait dengan komoditas garam, target produksi garam nasional pada 2024 disebutkan harus mencapai 3,4 juta ton, Peningkatan produksi sebesar 3,4 juta ton pada 2024 menjadi program prioritas, Strategi yang dilakukan akselerasi produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pegaraman dan peningkatan kualitas garam. Kebutuhan garam nasional tidak hanya untuk garam konsumsi tetapi untuk industri dan lain sebagainya sesuai Peraturan Presiden No 126 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang menjelaskan salah satunya terkait kebutuhan garam

Potensi Kabupaten Cirebon untuk sektor garam terkait kesiapan lahan yaitu luas tambak garam 1.557,75 Ha (Sumber DKPP Kab.Cirebon) dengan jumlah petambaka garam Kabupaten Cirebon yaitu 1.216 Jiwa (Sumber DKPP Kab.Cirebon) kemudian terdapat 17 (tujuh belas) IKM khusus untuk produk hasil garam konsumsi. Kesesuaian arahan Rencana Tata Ruang untuk kawasan pegaraman dengan kondisi eksisting 99,15% yang artinya sudah sesuai peruntukannya. Daya dukung lingkungan dari segi fisik kawasan untuk daya dukung kawasan pegaraman dominasi tinggi 22,49% dan sedang 72,61% yang artinya memiliki kategori baik.

Industrialisasi atau hilirisasi untuk sektor garam yang terintegrasi mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran yang saling terhubung melalui konsep dari program ruang pada masing-masing zona seperti program ruang pada zona produksi, program ruang pada zona pengolahan, dan program ruang pada zona pemasaran yang akan mengembangkan kawasan pegaraman di Kabupaten Cirebon.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pegaraman untuk aspek ekonomi dapat meningkatkan produktifitas, kualitas, dan kontinuitas produk garam, kemudian jika dilihat dari aspek social (sumber daya manusia) meningkatkan pendapatan perkapita petambak garam, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan nilai tambah.

Peluang pemenuhan kebutuhan garam sangat luas jika dilihat dari permintaan dan pemenuhan kebutuhan masih sangat berpeluang untuk pemenuhan produk garam dalam negeri, dan Kabupaten Cirebon dapat menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan garam untuk kabupaten kota sekitarnya.

Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan Usaha Pergaraman dengan kriteria:

1. tersedia lahan untuk produksi Garam;
2. tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman;
3. terdapat pangsa pasar Garam; dan
4. terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan.

Percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis Pergaraman yang meliputi tahapan:

1. praproduksi;
2. produksi;
3. pascaproduksi;
4. pengolahan; dan
5. pemasaran.

5.8.2 Rekomendasi

1. Arahan budidaya tambak harus sesuai dengan peruntukan ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon yang berlaku.
2. Akselerasi produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pegaraman dan peningkatan kualitas garam di Kabupaten Cirebon.
3. Optimalisasi lahan pada kawasan pegaraman untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas, kualitas, dan kontinuitas produk garam
4. Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur berdasarkan penzanaan (program ruang) program ruang pada zona produksi, program ruang pada zona pengolahan, dan program ruang pada zona pemasaran.
5. Penyediaan akses untuk pengangkutan hasil panen garam.

KAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEGARAMAN DI KABUPATEN CIREBON

6. Pelatihan untuk petambak garam agar meningkatkan kemampuan untuk praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
7. Penggunaan metode produksi seperti penambahan rumah prisma atau rumah tunnel untuk meminimalisir ketergantungan terhadap cuaca/curah hujan dan iklim.
8. Pengoptimalan lokasi prioritas pengembangan kawasan pegaraman yang saat ini sudah berjalan untuk merespon peluang program pemerintah pusat terkait Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) di Kabupaten Cirebon.
9. Selain pemenuhan kebutuhan garam di Kabupaten Cirebon, harus juga mengidentifikasi potensi rantai pasok (pasar produk garam) agar dapat ekspor ke kabupaten/kota lain.
10. Semua Stakeholder yang terkait harus bekerjasama dan berkomitmen untuk meningkatkan pengembangan kawasan pegaraman yang ada di Kabupaten Cirebon.